



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan penyesuaian sasaran dan indikator tahunan dan target pencapaian, indikator kinerja daerah dan perubahan penjabaran visi misi kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan akhir periode perencanaan serta menindaklanjuti hasil reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 Nomor 1/E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

FADELI

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (2) mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi program Bupati/Wakil Bupati 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan, keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta program kewilayahan, yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kewenangan ini pada prinsipnya diperlukan kesiapan secara keseluruhan baik pada aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana beserta perangkat pendukungnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kesiapan sejak awal. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan review RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Regulasi tersebut membawa perubahan mendasar terhadap tata laksana pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang terbagi atas pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang berdampak terhadap kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga akan berdampak pula kepada keberadaan perangkat daerah yang ada.

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun RPJMD Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Lamongan serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Lamongan dengan wilayah sekitarnya dan sebagai pedoman dasar bagi penyusunan rencana program pembangunan di Kabupaten Lamongan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Grafik	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-01
1.1 Latar Belakang.....	I-01
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-04
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-07
1.4 Sistematika Penulisan	I-87
1.5 Maksud dan Tujuan.....	I-89
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-01
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-01
2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah	II-01
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	II-02
2.1.2.1 Posisi Geografis.....	II-02
2.1.2.1 Kondisi Kawasan Kabupaten Lamongan	II-03
2.1.2.1 Topografi	II-03
2.1.2.1 Geologi.....	II-04
2.1.2.1 Hidrologi.....	II-05
2.1.2.1 Klimatologi.....	II-05
2.1.2.1 Penggunaan Lahan.....	II-06
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-07
2.1.3.1 Wilayah Pembangunan I (WP I) Lamongan	II-07
2.1.3.2 Wilayah Pembangunan II (WP II) Paciran- Brondong.....	II-08
2.1.3.3 Wilayah Pembangunan III (WP III) Babat.....	II-08
2.1.3.4 Wilayah Pembangunan IV (WP IV) Sukodadi.....	II-09
2.1.3.5 Wilayah Pembangunan V (WP V) Ngimbang.....	II-10
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana	II-10
2.1.4.1 Bencana Banjir	II-11
2.1.4.2 Bencana Gelombang Pasang.....	II-11
2.1.5 Demografi	II-11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15

2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-15
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	II-15
2.2.1.2	PDRB Perkapita.....	II-17
2.2.1.3	Laju Inflasi.....	II-18
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-19
2.2.2.1	Urusan Pendidikan	II-20
2.2.2.2	Urusan Kesehatan.....	II-24
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-27
2.2.3.1	Urusan Kebudayaan.....	II-27
2.2.3.2	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	II-29
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-32
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-32
2.3.1.1	Urusan Pendidikan.....	II-32
2.3.1.2	Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	II-35
2.3.1.3	Urusan Perumahan dan Permukiman	II-37
2.3.1.4	Urusan Ketentraman, Tribum dan Linmas	II-38
2.3.1.5	Urusan Penanaman Modal	II-38
2.3.1.6	Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah.....	II-39
2.3.1.7	Kependudukan Dan Catatan Sipil	II-40
2.3.1.8	Ketenagakerjaan.....	II-41
2.3.1.9	Ketahanan Pangan.....	II-43
2.3.1.10	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-45
2.3.1.11	Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.....	II-45
2.3.1.12	Urusan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.....	II-46
2.3.1.13	Urusan Sosial.....	II-47
2.3.1.14	Urusan Kearsipan.....	II-48
2.3.1.15	Urusan Perpustakaan	II-48
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-50
2.3.2.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	II-50
2.3.2.2	Urusan Pertanian	II-50
2.3.2.3	Urusan Kehutanan	II-54
2.3.2.4	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	II-55
2.3.2.5	Urusan Perindustrian	II-56
2.3.2.6	Urusan Pariwisata	II-56

2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-57
2.4.1	Transportasi.....	II-57
2.4.2	Utilitas	II-58
BAB III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-01
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-01
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-02
3.1.2	Neraca Daerah.....	III-13
3.1.3	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-16
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-21
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-21
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	III-23
3.2.3	Kebijakan Pembiayaan	III-28
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-28
3.3.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-29
3.3.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-30
3.3.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-31
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-01
4.1	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Lamongan.....	IV-01
4.1.1	Permasalahan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur).....	IV-14
4.1.2	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait Capaian Indikator Daerah.....	IV-14
4.1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia	IV-14
4.1.2.2	Pertumbuhan Ekonomi	IV-14
4.1.2.3	PDRB Per Kapita.....	IV-15
4.1.2.4	Inflasi	IV-16
4.1.2.5	Indeks Kinerja Infrastruktur	IV-17
4.1.2.6	Indeks Kepuasan Masyarakat	IV-17
4.1.2.7	Angka Kemiskinan	IV-18
4.1.2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	IV-18
4.2	Isu-Isu Strategis	IV-20
4.2.1	Kekuatan (Strength)	IV-20
4.2.1.1	Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana.....	IV-20
4.2.1.2	Kondisi Sosial Budaya	IV-21
4.2.1.3	Kondisi Perekonomian.....	IV-21
4.2.2	Kelemahan (Weaknesses).....	IV-24
4.2.2.1	Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana.....	IV-24

	4.2.2.2	Kondisi Sosial Budaya	IV-24
	4.2.2.3	Kondisi Perekonomian.....	IV-25
	4.2.3	Peluang (Opportunity)	IV-25
	4.2.3.1	Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana.....	IV-25
	4.2.3.2	Kondisi Sosial Budaya	IV-26
	4.2.3.3	Kondisi Perekonomian.....	IV-28
	4.2.4	Ancaman (Treath)	IV-28
	4.2.4.1	Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana.....	IV-28
	4.2.4.2	Kondisi Sosial Budaya dan Perekonomian	IV-29
BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-01
	5.1	Visi.....	V-01
	5.2	Misi.....	V-02
	5.3	Tujuan dan Sasaran	V-03
BAB	VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-01
	6.1	Strategi	VI-01
	6.2	Arah Kebijakan.....	VI-02
BAB	VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM	VII-01
	7.1	Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021	VII-01
BAB	VIII	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-01
BAB	IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-01
BAB	X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-01
	10.1	Pedoman Transisi	X-01
	10.2	Kaidah Pelaksanaan	X-01
BAB	XI	PENUTUP	XI-01

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasn Visi RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMN Tahun 2015-2019.....	I-10
Tabel 1.2	Keselarasn Misi RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMN Tahun 2015-2019.....	I-10
Tabel 1.3	Keselarasn Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lamongan dengan Prioritas Program Nasional RPJMN	I-11
Tabel 1.4	Keselarasn Visi Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur	I-61
Tabel 1.5	Keselarasn Misi Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur	I-61
Tabel 1.6	Keterkaitan Visi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lamongan.....	I-55
Tabel 1.7	Keterkaitan Misi RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lamongan.....	I-55
Tabel 1.8	Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan RPJPD Kab. Lamongan.....	I-64
Tabel 1.9	Keterkaitan Kebijakan RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan.....	I-71
Tabel 1.10	Keterkaitan Strtegi RPJMD dengan RTRW Kab. Lamongan	I-73
Tabel 1.11	Keterkaitan Program RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan	I-75
Tabel 1.12	Telaah RPJMN, RPJMD Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Lamongan....	I-82
Tabel 1.13	Telaah RPJMN dan RPJMD Jawa Timur	I-83
Tabel 1.14	Keterkaitan RPJMD Lamongan dengan RPJMD Daerah Sekitar	I-86
Tabel 2.1	Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Desa/Kelurahan	II-02
Tabel 2.2	Luas Daerah Per Kecamatan Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Lamongan	II-04
Tabel 2.3	Rata-rata Jumlah hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Lamongan.....	II-06
Tabel 2.4	Kondisi Tata Guna Tanah Kabupaten Lamongan Tahun 2017	II-06
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016	II-13
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk menurut Agama Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016	II-14
Tabel 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016	II-16
Tabel 2.8	Peranan Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-17

Tabel 2.9	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-22
Tabel 2.10	Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2016.....	II-22
Tabel 2.11	Perkembangan Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-31
Tabel 2.12	Perkembangan Jumlah Lapangan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2014 – 2016.....	II-32
Tabel 2.13	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-33
Tabel 2.14	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-33
Tabel 2.15	Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-34
Tabel 2.16	Prosentase Penduduk Dengan Akses Air Bersih di Kabupaten Lamongan Tahun 2016	II-36
Tabel 2.17	Perkembangan Jumlah PMDN, Domestik, dan PMA Tahun 2011-2016 ..	II-39
Tabel 2.18	Persentase Koperasi Aktif 2011-2016.....	II-40
Tabel 2.19	Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016.....	II-40
Tabel 2.20	Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-41
Tabel 2.21	Jumlah Perpustakaan di Kab. Lamongan Tahun 2011-2016	II-50
Tabel 2.22	Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-50
Tabel 2.23	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2015.....	II-51
Tabel 2.24	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-52
Tabel 2.25	Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-53
Tabel 2.26	Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-53
Tabel 2.27	Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-54
Tabel 2.28	Data Kehutanan Kabupaten Lamongan.....	II-54
Tabel 2.29	Perkembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Menengah dan Industri Besar Tahun 2011-2016	II-56
Tabel 2.30	Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Lamongan	II-57
Tabel 3.1	Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2011-2016.....	III-02

Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2016.....	III-04
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	III-05
Tabel 3.4	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAU Dalam APBD Tahun Anggaran 2011-2016.....	III-07
Tabel 3.5	Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2011-2016.....	III-09
Tabel 3.6	Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2011-2016	III-12
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Asset Tahun 2011-2016	III-14
Tabel 3.8	Tren Realisasi DAU dengan Belanja Pegawai Tahun 2011-2016	III-17
Tabel 3.9	Proporsi Komponen Belanja Langsung Tahun 2011-2016.....	III-19
Tabel 3.10	Perkembangan Pengeluaran Periodik Tahun 2011-2016.....	III-27
Tabel 3.11	Perkembangan Defisit APBD dan Realisasinya Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	III-28
Tabel 3.12	Proyeksi Pendapatan Tahun 2017-2021	III-33
Tabel 3.13	Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021.....	III-34
Tabel 3.14	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2021	III-34
Tabel 3.15	Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016-2021	III-37
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016.....	IV-15
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama.....	V-03
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	V-06
Tabel 6.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-04
Tabel 7.1	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program	VII-03
Tabel 8.1	Daftar Rencana Program Prioritas beserta Pagu Indikatif Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021	VIII-02
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah.....	IX-02

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Nilai Dan Perkembangan PDRB Perkapita Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-18
Grafik 2.2	Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-19
Grafik 2.3	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-19
Grafik 2.4	Indeks Pendidikan Kab. Lamongan Tahun 2011-2016	II-20
Grafik 2.5	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-20
Grafik 2.6	Rata – Rata Lama Sekolah Di Kab. Lamongan Lamongan	II-21
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-23
Grafik 2.8	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B Kab. Lamongan Tahun 2011-2016	II-23
Grafik 2.9	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA / Paket C Kab. Lamongan Tahun 2011-2016	II-24
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-24
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Lamongan Tahun 2012-2016.....	II-25
Grafik 2.12	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Kab. Lamongan Tahun 2012-2016.....	II-26
Grafik 2.13	Jumlah Gizi Buruk Di Kab. Lamongan Tahun 2011-2016	II-26
Grafik 2.14	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-28
Grafik 2.15	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-28
Grafik 2.16	Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Menerima Pembinaan Tahun 2011-2016.....	II-29
Grafik 2.17	Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang Di Tingkat Nasional Tahun 2011-2016.....	II-29
Grafik 2.18	Jumlah Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga Tahun 2011-2016.....	II-30
Grafik 2.19	Perkembangan Bangunan Sekolah Kondisi Baik Tahun 2011-2016	II-34

Grafik 2.20	Perkembangan Pembuatan KTP, KK & Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011-2016.....	II-41
Grafik 2.21	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-42
Grafik 2.22	Perkembangan Ketersediaan Pangan, Cadangan Pangan Dan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011-2016.....	II-43
Grafik 2.23	Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Lamongan 2012-2016.....	II-44
Grafik 2.24	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2011-2016.....	II-45
Grafik 2.25	Prevelensi Peserta KB Aktif Tahun 2011-2016.....	II-46
Grafik 2.26	Perkembangan IKM Kab. Lamongan Tahun 2011-2016	II-47
Grafik 2.27	Perkembangan Urusan Sosial Tahun 2011-2016.....	II-47
Grafik 2.28	Perkembangan Jumlah SKPD Menerapkan Pengelolaan Arsip Baku Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-48
Grafik 2.29	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	II-49
Grafik 2.30	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2011-2016	II-57
Grafik 2.31	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2011-2016.....	II-58
Grafik 2.32	Panjang Jalan Poros Desa Strategis Kondisi Baik Tahun 2011-2016.....	II-59
Grafik 2.33	Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik Tahun 2011-2016.....	II-59
Grafik 2.34	Jumlah Jembatan Kondisi Baik Tahun 2011-2016.....	II-60
Grafik 2.35	Jumlah Ketersediaan PJU Tahun 2011-2016	II-60
Grafik 2.36	Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun 2011-2016	II-61
Grafik 2.37	Ketersediaan Air Baku Tahun 2011-2016	II-61
Grafik 2.38	Luas RTH Tahun 2011-2016	II-62
Grafik 2.39	Rumah Layak Huni Tahun 2011-2016.....	II-62
Grafik 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	III-06
Grafik 3.2	Perbandingan DAU Terhadap PAD Pada APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011-2016.....	III-07
Grafik 3.3	Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2016.....	III-10
Grafik 3.4	Pertumbuhan dan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016	III-10
Grafik 3.5	Pertumbuhan dan Komposisi Realisasi Pembiayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016	III-11
Grafik 3.6	Tren Kenaikan DAU dengan Belanja Pegawai	III-17

Grafik	3.7	Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Tahun 2011-2016.....	III-18
Grafik	3.8	Proporsi Komposisi Belanja Langsung Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	III-20
Grafik	3.9	Proporsi Komposisi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	III-21
Grafik	4.1	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	IV-14
Grafik	4.2	Nilai dan Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	IV-16
Grafik	4.3	Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016.....	IV-16
Grafik	4.4	Tingkat Kemiskinan Kab. Lamongan Tahun 2011-2016	IV-18
Grafik	4.5	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Lamongan Tahun 2011-2016.....	IV-18

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2016 -2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh pemerintah kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode tahun 2016-2021 yang telah dilantik. Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah perodesasi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Dengan dilantiknya H. Fadeli sebagai Bupati Lamongan dan Hj. Kartika Hidayati sebagai Wakil Bupati Lamongan yang dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2).

RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumberdaya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumentasi rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, serta meningkatkan daya guna potensi daerah dan keaneragaman sumber daya daerah.

Pemberian otonomi kepada Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, kesinambungan pembangunan, dan hubungan yang sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, pemerintah propinsi dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah di sekitarnya, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek paling penting yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga keselarasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah aspek hubungan keuangan, hubungan pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan

umum, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alokasi sumberdaya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional disamping masalah yang ada di daerah masing-masing, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah “bersinergi” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat.

RPJMD sebagai suatu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan dengan memperhatikan pendekatan dalam penyusunan perencanaan, penelaahan kondisi dan permasalahan daerah serta identifikasi potensi sumberdaya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan dokumentasi rencana pemenuhan kebutuhan nyata serta untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan.

Dokumen perencanaan dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perubahan RPJMD diatur dalam ketentuan Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ketentuan tersebut diatas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, dengan maksud untuk menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya karena telah terjadi perubahan dalam kewenangan dan struktur perangkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan ini dikarenakan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian pembentukan dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja Perangkat Daerah paling lambat akhir Tahun 2016. Berdasarkan perkembangan kondisi diatas, sangat berpengaruh terhadap substansi dan muatan materi dalam dokumen perencanaan yang sudah disusun.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 agustus 2016 Perihal Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menginstruksikan kepada Gubernur, ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 Nomor 1/E);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

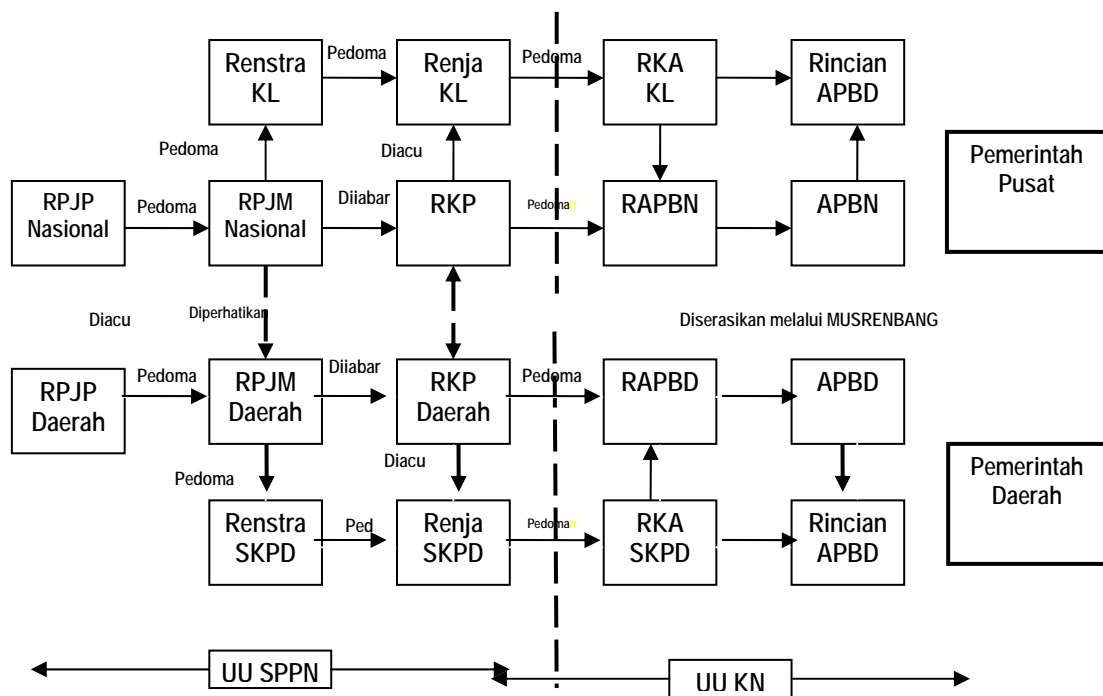
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum pada penyusunan RPJMD Perubahan (RPJMDP), maka dokumen RPJMDP Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMDP merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMDP harus sinkron dan sinergi antar daerah, antarwaktu, antarruang dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

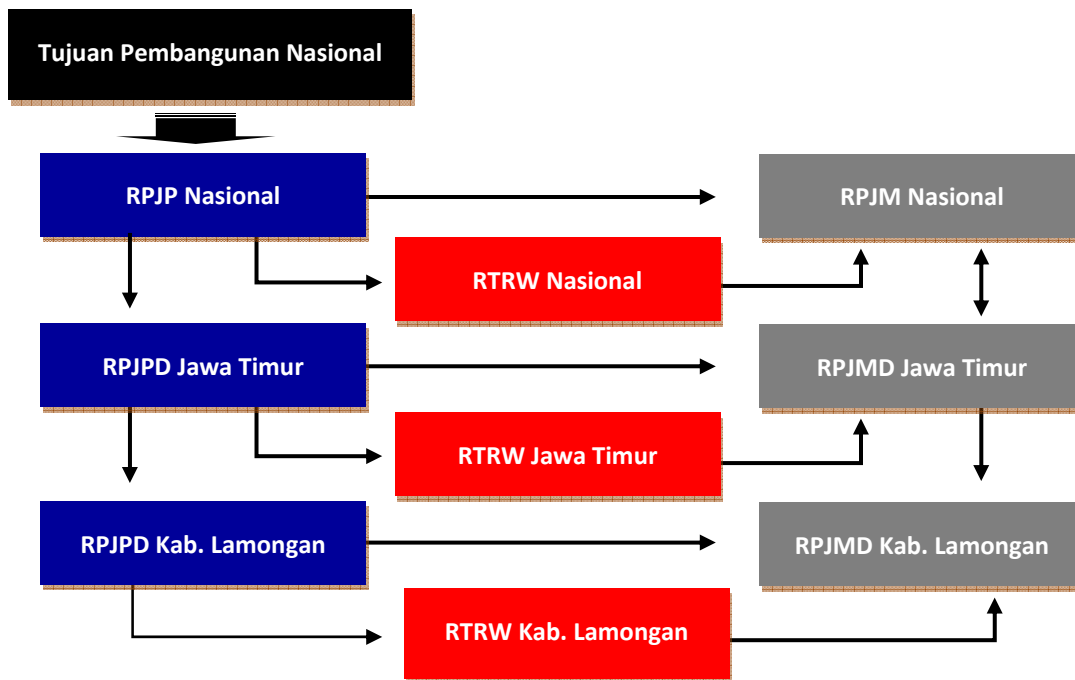
2. Substansi RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMDP Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMDP Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Secara lebih lanjut bahwa RPJMDP membentuk keterkaitan secara hirarkis dengan penyusunan RKPD setiap tahunnya.
3. Penyusunan RPJMDP juga memperhatikan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lamongan.
4. Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan RPJMDP juga memperhatikan: Pelingkupan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. RKPD yang merupakan penjabaran RPJMDP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk program/kegiatan yang akan didanai dari APBD. Sementara program/kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai dana APBN akan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) melalui proses musrenbang nasional. RKP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN).



Perencanaan makro selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional dan spasial.



Penyusunan RPJMDP Tahun 2016-2021 Kabupaten Lamongan akan mempengaruhi perencanaan tata ruang kabupaten. Visi dan misi bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Sehubungan dengan penyusunan RPJMD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan yang sedang dilaksanakan Peninjauan Kembali, saat ini harus diselaraskan antara dokumen perencanaan dengan tata ruang kewilayahan. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Lamongan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019

1.3.1.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019

Visi RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021 “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” didasarkan pada Visi RPJMN 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Keselarasan antara Visi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Keselarasn Visi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021	RPJM Nasional 2015-2019
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong
Keselarasn Visi	
Sejahtera	Berdaulat
	Mandiri
Berdaya saing	Berkepribadian
	Gotong Royong

Keterangan: —————> = Mendukung/Selaras

Adapun Keselarasan Misi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1.2
Keselarasn Misi RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RPJMN 2015-2019

RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	RPJM Nasional 2015-2019
Mewujudkan SDM berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan revolusi karakter bangsa. ➤ Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah,	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan,	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
		aturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah.
2	Peningkatan Persaingan Usaha yang sehat <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Persaingan Usaha yang Sehat • Pengawasan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan mekanisme Persaingan Usaha yang Sehat • Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat 	- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem perizinan nasional • Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional • Pemantauan PTSP di daerah 	- Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
4	Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian pengaduan masalah investasi 	- Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5	Perencanaan investasi sektor strategis <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Investasi Industri prioritas • Perencanaan Investasi pariwisata • Perencanaan investasi sektor maritim dan logistik • Perencanaan investasi di Kawasan Strategis Nasional • Perencanaan investasi Infrastruktur Prioritas 	- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; - Prog. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan; - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; - Program Perencanaan Pembangunan Daerah; - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	Peningkatan Kemudahan Berusaha		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha • Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan • Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti • Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik • Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak • Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan • Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak • Perbaikan kemudahan penyelesaian Perkara Kepailitan • Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas • Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara 	- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

2. Prioritas Nasional Peningkatan Ekspor Non Migas

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	<p>Peningkatan Realisasi investasi berorientasi ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi permasalahan investasi • Fasilitasi investasi industri berorientasi ekspor • Pemantauan dan pengendalian realisasi investasi berorientasi ekspor • Peningkatan promosi invest-tasi berorientasi ekspor 	- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	<p>Peningkatan ekspor produk KUMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas ekspor • Perluasan fasilitasi ekspor • Peningkatan diversifikasi dan kualitas produk • Peningkatan partisipasi 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	KUMKM dalam jaringan/ kemitraan rantai nilai		
3	Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana pengujian mutu dan standar • Penyediaan sistem informasi terkait standar dan mutu yang berlaku di negara tujuan ekspor • Peningkatan keberterimaan sertifikasi mutu • Pengembangan potensi ekspor daerah 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
4	<p>Penguatan market intelligence, promosi, dan asistensi ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) • Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas • Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa (termasuk produk kreatif dan produk halal) • Pelaksanaan market intelligence yang berkualitas 		
5	<p>Pengembangan fasilitas ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran impor barang modal & bahan baku untuk produksi ekspor nonmigas • Mengoptimalkan penerapan single window untuk proses ekspor-impor • Fasilitas pembiayaan ekspor 	<p>- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>
6	<p>Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan kepentingan nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil • Optimalisasi peran perwakilan RI di luar negeri 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses pasar barang olahan dan jasa Indonesia di pasar internasional • Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional • Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri 	- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3. Prioritas Nasional Reformasi Agraria

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Identifikasi dan Penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) • Identifikasi HGU yang habis masa berlakunya dan Identifikasi Tanah Terlantar • Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Aset 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Penyerahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) <ul style="list-style-type: none"> • Legalisasi Aset (PRONA, Lintas Sektor) 		
3	Kepastian Hukum Hak Atas Tanah <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan • Peningkatan Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan • Sosialisasi Peraturan Terkait Tanah Adat/Ulayat 		
4	Penerimaan Juru Ukur Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Jabatan • Penerimaan PNS Juru Ukur • Penyediaan Anggaran 		
5	Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah • Pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah 		

4. Prioritas Nasional Reformasi Fiskal

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Optimalisasi Penerimaan Negara <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Perpajakan • Optimalisasi PNB 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi keuangan daerah 	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendataan Wajib Pajak - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Penetapan - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pajak Dasar Pelaporan 	Badan Pendapatan Daerah
2	Peningkatan Kualitas Belanja Negara <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran • Peningkatan efektivitas transfer ke daerah dan Dana Desa 	Belanja tidak langsung: <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sosial - Bantuan Keuangan Kepada Desa 	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur 		

5. Prioritas Nasional Revolusi Mental

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum • Penegakan Hukum yang Berkualitas • Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan • Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik 	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		- Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas ASN	Badan Kepegawaian Daerah
2	Reformasi Birokrasi Pemerintahan		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan • Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting, E-reporting dan Complaint Center • Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Tata Pemerintahan - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 	<p>Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p>
3	<p>Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan • Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri • Internalisasi Nilai – nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; - Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro dan Koperasi yang Kondusif. - Program Peningkatan Akses Kemitraan terhadap Sumberdaya Produktif - Program Pengembangan Produk bagi UM dan Koperasi - Program Pengembangan Pemasaran bagi UM dan Koperasi 	<p>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>
4	<p>Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Berbasis Karakter • Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan • Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi • Apresiasi Seni dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 	<p>Dinas Pendidikan</p>

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Kreativitas Karya Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Non Formal; - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; - Program Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin. - Program Pendidikan Sekolah Dasar - Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; - Program Pengembangan Nilai Seni dan Budaya; - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan <ul style="list-style-type: none"> • Toleransi dan Hidup Rukun • Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti • Gotong Royong, Kesuka-relawan dan Solidaritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

6. Prioritas Nasional Pelayanan Pendidikan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
----	----------------------------	-----------------------------	---------------------

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	<p>Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum yang Andal • Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel • Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; - Program Pendidikan Non Formal; - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. - Program Pendidikan Sekolah Dasar; - Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 	Dinas Pendidikan
2	<p>Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi LPTK • Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen • Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen • Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen • Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 	Dinas Pendidikan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
3	Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Berbudaya Mutu • Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah • Assessment Mutu Satuan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; - Program Pendidikan Non Formal; - Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP; - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Program Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin. 	Dinas Pendidikan
4	Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Afiriasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus • Bantuan Biaya Operasional Pendidikan • Bantuan Peningkatan Prestasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; - Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP. 	Dinas Pendidikan
5	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan • Afiriasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar jawa • Peningkatan Peran Pemda • Kebutuhan Infrastruktur Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; - Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP; - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 	Dinas Pendidikan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan. 	Dinas Perpustakaan Daerah
6	<p>Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan • Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; - Program Pendidikan SD; - Program Pendidikan SMP; - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 	Dinas Pendidikan
7	<p>Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Otonomi PT • Pengembangan Prodi Inovatif • Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi • Perlindungan Prodi Langka Peminat • Penguatan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
8	Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi • Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa • Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan Sitasi • Perolehan HAKI dan Paten dari Litbang PT • Penerapan Hasil Litbang PT di masyarakat 		
9	Peningkatan Relevansi Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Pengabdian Masyarakat • Pendidikan Vokasi • Pendidikan kewirausahaan • Penguatan Kemitraan dengan Dunia usaha – Dunia Industri 	Belanja tidak langsung: - Bantuan Hibah	

7. Prioritas Nasional Pelayanan Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pembiayaan Kesehatan • Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan • Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas • Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan • Penyediaan, Persebaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; - Program Upaya Kesehatan Masyarakat; - Program Perbaikan Gizi Masyarakat; - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; - Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; 	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	dan Kualitas SDM Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Program Pengawasan Obat dan Makanan; - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; - Program Standarisasi pelayanan Kesehatan; - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; - Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. - Program Sumber Daya Kesehatan. 	
2	<p>Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat • Kampanye Hidup Sehat • Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa Transportasi • Konsumsi Pangan Sehat • Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini • Lingkungan Sehat • Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras • Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; - Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 	Dinas Kesehatan
3	<p>Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak • Ketersediaan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perbaikan Gizi Masyarakat 	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini • Manajemen dan pencegahan penyakit • Peningkatan sanitasi dan akses air bersih • Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana • Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye 		
4	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan KB • Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB • Pembinaan Remaja • Pembangunan Keluarga • Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Keluarga Berencana; - Program Pelayanan Kontrasepsi; - Program Pengendalian Penduduk; - Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. 	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

8. Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Fasilitas Penyediaan Hunian Layak Baru <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) • Penyediaan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Baru MBR <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat • Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR • Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan 		
2	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan berbasis komunitas (Perbedaan masyarakat yang berkelanjutan) • Percepatan pendataan (baseline dan nett kumuh) dan perencanaan • Penguatan kelembagaan di daerah dalam upaya penangkalan kumuh • Konsolidasi lahan (<i>land consolidation</i>) untuk penanganan permukiman kumuh 	- Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi • Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS) • Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi 	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
4	Peningkatan Ketersediaan Air Baku <ul style="list-style-type: none"> • Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air) • Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan) • Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum) 	- Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

9. Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain <ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; 	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan • Pengendalian Konversi Lahan Padi • Reformasi Agraria • Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit • Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih • Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; - Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan. - Program peningkatan produksi hasil peternakan 	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan pengendalian harga pangan • Cadangan Pangan Pemerintah • Pengendalian impor dan tata niaga pangan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan • Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
3	Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi • Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) • Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan 	Dinas Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan keamanan pangan 		
4	Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) • Asuransi Pertanian • Pengembangan Budidaya Adaptif • Bantuan input produksi akibat bencana 	- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

10. Prioritas Nasional Kedaulatan Energi

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Penyediaan Energi Primer <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi • Perbaikan Tata Kelola Migas • Pengembangan Lapangan Migas Baru • Pengendalian Produksi Batubara 		Kewenangan Provinsi
2	Pengembangan Cadangan Energi <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi • Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG • Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak • Pembentukan Cadangan Penyangga Energi 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
3	<p>Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PLT Matahari, Mikrohidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir • Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi EBT • Pembangunan PLTP • Pengembangan industri penunjang EBT • Pembangunan Bioenergi 		
4	<p>Peningkatan Aksesibilitas Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik • Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi • Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas Dalam Negeri • Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi 		
5	<p>Efisiensi dan Konservasi Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) • Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien • Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi 		
6	<p>Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan, dan Tepat Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel • Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik		

11. Prioritas Nasional Kelautan dan Kemaritiman

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Konektivitas (tol) laut dan industri maritime • Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum • Pengembangan Layanan Pelayaran nasional • Insentif Usaha dan Iklim Investasi • Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan • Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan • Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran	- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
2	<p>Industri Perikanan dan Hasil Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan • Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Program Optimalisasi Pe-ngelolaan dan Pemasa-ran Produksi Perikanan 	Dinas Per-ikanan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan • Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek • Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta karantina ikan 		
3	<p>Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir • Konservasi pesisir dan laut • Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut • Pengendalian pencemaran pesisir dan laut • Pengelolaan Wisata Bahari 		
4	<p>Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya • Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi • Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan • Sistem informasi kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Budidaya Perikanan; - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; - Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 	Dinas Perikanan
5	<p>Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan lembaga, aparatur pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat • Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran 		
6	<p>Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut • Penamaan dan pendaftaran pulau • Pengelolaan pulau-pulau kecil 		

12. Prioritas Nasional Antar Kelompok Pendapatan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	<p>Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial • Keahlian Pekerja • Layanan Informasi Pasar kerja • Iklim Investasi • Infrastruktur Padat Pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kesempatan Kerja; - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 	Dinas Tenaga Kerja
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	<p>Perkuatan basis perekonomian perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Keuangan berbasis komunitas • Keterampilan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi • Pendampingan Masyarakat Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan . 	Desa
3	Pengembangan kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil 	Dinas Koperasi dan UM
4	Perluasan pelayanan dasar <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Layanan Dasar • Peningkatan Tata Kelola • Pendampingan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini; - Program Pendidikan Non Formal; - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 	Dinas Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; 	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Lingkungan Sehat; - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; - Program Standarisasi pelayanan Kesehatan; - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; - Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 	
5	<p>Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) • Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah (RASKIN/RASTRA) • Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) • Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) • Bantuan sosial di luar sistem keluarga 	<p>Belanja tidak langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Sosial Program Rumah Sehat, Panti Sosial; <p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya.</p>	Dinas Sosial
6	<p>Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan Usaha • Akses Pembiayaan • Kualitas Produk dan Akses Pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil 	Dinas Koperasi dan UM

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi dan Kemitraan Usaha • Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha 		

13. Prioritas Nasional Daerah Perbatasan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	<p>Pengembangan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarpras di kota pusat pertumbuhan • Pembangunan sarpras ke-maritiman penunjang pengelolaan sumber daya laut • Pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan di kota pusat pertumbuhan • Regulasi perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara • Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri Pembangunan industri hilir dan Industri Kecil Menengah • Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan • Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan 		
2	<p>Membuka Isolasi Lokpri, peningkatan Sarpras, SDM dan Ekonomi Perbatasan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka isolasi • Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan, TIK, dan penyiaran • Pembangunan Sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik; - Program Pengembangan 	<p>Dinas Perhubungan</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Prasana Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pelatihan SDM • Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan • Pembangunan perumahan, kawasan permukiman layak huni dan penyediaan air baku Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan 	Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	
3	Pengembangan PLBN Terpadu <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu • Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan <i>Custom, Imigrasi, Quarantine and Security</i> • Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN • Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Lingkungan Sehat Perumahan 	Dinas Pekerjaan umum Bina Marga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, laut dan udara <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama internasional pengamanan kawasan perbatasan • Pembangunan Pos TNI dengan fasilitas pengamanan penunjang • Patroli pengamanan batas wilayah • Pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara 		
5	Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Sosial - Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan diplomasi perundingan 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koordinasi materi dan instrumen perundingan antar K/L • Penyelesaian segmen batas negara • Pembuatan peta kawasan perbatasan, database regulasi, dan dokumen teknis pengelolaan perbatasan 		

14. Prioritas Nasional Daerah Tertinggal

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	<p>Pengembangan Ekonomi Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan • Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry • Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM • Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah • Perizinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha • Peningkatan Kapasitas Petani/Nelayan/Pelaku Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil; - Program Peningkatan Produksi Perternakan; - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan. 	<p>Dinas Koperasi dan UM</p> <p>Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan</p>
2	<p>Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Ketenagalistrikan • Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan • Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan • Pemenuhan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Anak Usia Dini; - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 	<p>Dinas Pendidikan</p>

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<p>dan Permukiman layak huni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan air bersih dan sanitasi • Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Standarisasi pelayanan Kesehatan; - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; - Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. 	<p>Dinas Kesehatan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 	<p>Dinas PU SDA dan PU Bina Marga</p>
3	<p>Peningkatan SDM dan Iptek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan • Pembangunan SMK dan Politeknik • Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja • Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis dan Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Pendidikan Menengah 	<p>Dinas Pendidikan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 	<p>Dinas Tenaga Kerja</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penelitian dan Kajian Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi; - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. 	<p>Badan penelitian dan pengembangan Daerah</p>
4	<p>Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Pembangunan Dermaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 	<p>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga</p>

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara • Pengadaan Moda Transportasi Darat, Udara, Laut dan ASDP • Pelayanan Angkutan Perintis • Pembangunan Perkeretaapian • Penyediaan Akses Telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 	Dinas Perhubungan

15. Prioritas Nasional Daerah Tertinggal

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) • Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan • Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi • Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah • Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; - Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 	Dinas Pekerjaan Umum SDA
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan; - Program Lingkungan Sehat Perumahan 	Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
2	<p>Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Permukiman Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa • Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM • Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna • Penguatan Permodalan dan Akses Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; - Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. 	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
3	<p>Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata • Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi; - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil. 	<p>Dinas Koperasi dan UM</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian. 	<p>Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; 	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
		- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama antar desa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa • Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha • Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di pedesaan • Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi • Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri • Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing • Peningkatan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah • Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa. 	
4	<p>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan 	- Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
			dan Perkebunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi • Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim • Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup & teknologi tepat guna • Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/shareholding 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; - Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura/Perkebunan/ Hasil Peternakan; - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/ Peternakan. 	
5	<p>Penguatan Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa • Penataan wilayah, penataan kewenangan dan administrasi pemerintahan desa • Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa • Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan aset pemerintahan desa • Peningkatan kapasitas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	dalam penyediaan informasi desa dan evaluasi perkembangan desa		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
6	<p>Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa • Pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan • Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan • Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan & pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas • Penyiapan teknologi & komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masy. desa serta antar desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	<p>Pengawasan Impelementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Lintas Kementerian/Lembaga dalam perencanaan, pengendalian dan pembangunan desa • Sosialisasi dan penyusunan revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa; - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi, supervisi, pemantauan DD dan ADD agar berjalan secara efektif 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Transmigrasi Regional; - Program Fasilitasi dan 	Dinas Tenaga Kerja Bagian

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	dan efisien	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa.	Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

16. Prioritas Nasional Perkotaan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Mewujudkan Sistem Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan KSN Perkotaan • Peningkatan Konektivitas 	- Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yg Aman, Nyaman, dan Layak Huni, serta Tertata Baik <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana permukiman • Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan • Tersedianya sistem transportasi publik • Penanggulangan kemiskinan perkotaan • Pendidikan • Kesehatan 	- Program Pengembangan Perumahan;	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		- Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perhubungan
		- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Pendidikan
		- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
3	Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana <ul style="list-style-type: none"> • Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan • Green transportation • Green waste • Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan • Membangun ketahanan kota (urban resilience) 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Bangunan Gedung dan Penataan Ruang 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK <ul style="list-style-type: none"> • City Branding • Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) • Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik; - Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika. 	Dinas Komunikasi dan Informatika
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Penelitian dan Kajian Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi; - Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah. 	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota <ul style="list-style-type: none"> • Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan • Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; - Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah & Besar. 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan Memperkuat status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan • Basis data informasi dan peta perkotaan yg terpadu 		

17. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	<p>Pelayanan Prima Kepolisian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Pelayanan Kepolisian • Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian • Penguatan Sistem Kepolisian • Profesionalisme SDM 		
2	<p>Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF • Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan • Pembangunan Sarpras Alutsista TNI • Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI • Penguatan Industri Pertahanan 		
3	<p>Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi Persandian dan Siber • Operasional Pengamanan Persandian dan Siber • Peningkatan Kapasitas SDM Sandi 	- Program Persandian Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	<p>Keamanan dan Keselamatan Laut yang Terkendali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarpras Pendukung Keamanan Laut • Sistem Informasi Kamla yang Terpadu • Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum • Pengembangan SDM Keamanan Laut 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
5	Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba <ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba • Pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba • Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba • Litbang Penanganan Narkoba 	- Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Dinas Pemuda dan Olah Raga
6	Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme <ul style="list-style-type: none"> • Deteksi Dini dan Penanggulangan Terorisme • Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi • Teknologi Intelijen 	- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

18. Prioritas Nasional Kepastian dan Penegakan Hukum

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan <ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Terkait HAM 	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum sekretariat daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan HAM • Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu • Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat • Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Pendidikan HAM bagi Apgakum 	- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penegakan Hukum yang Berkualitas <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Hukum Tindak 	- Program Penataan	Bagian Hukum

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan • Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum • Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif • Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Cepat • Budaya Hukum 	Peraturan Perundang-undangan	sekretariat daerah
3	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif <ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Anti Korupsi • Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi • Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi • Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 	- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum sekretariat daerah

19. Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan • Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim • Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan 		
2	Pemantapan Peran di ASEAN <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan • Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi 		
3	Penguatan Lembaga Demokrasi <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu • Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol • Revisi UU Kepemiluan 	Belanja tidak langsung: - Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
4	Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal • Pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu • Pusat Pendidikan Pemilih • Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat 	- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik • Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik • Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 	- Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehumasan dan Protokol - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa - Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Pencegahan Konflik Sosial & Penanggulangan Terorisme <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi • Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) • Penguatan Tim Terpadu 	- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Penanganan Konflik <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme • Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme 		
7	Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Diplomasi • Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan rezim internasional bidang energy dan food security • Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik • Peningkatan diplomasi ekonomi di Tingkat Bilateral 		
8	Penguatan Diplomasi Soft Power <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik • Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media • Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri 		
9	Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri 		

20. Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi • Pengawasan yang Independen dan Profesional • Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pendidikan Kedinasan; - Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas ASN; - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; - Program Pendidikan dan Pelatihan ASN. 	Badan Kepegawaian Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; - Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinera 	Inspektorat
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; - Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah. 	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
2	Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengelolaan RB 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan 	Bagian

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa • Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional • Penerapan Manajemen ASN • Penataan tata kelola birokrasi • Penataan kelembagaan birokrasi 	Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan; - Program Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Organisasi Sekretariat Daerah
3	Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik • Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik 	- Program Peningkatan dan Pembinaan Unit Pelayanan Publik; - Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Bidang Keorganisasian.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

21. Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Peningkatan Populasi <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Tumbuhnya industri baru • Promosi Investasi • Tax Holiday/Tax Allowance • Kemudahan memulai usaha • Pembangunan Science dan Technopark • Pertumbuhan IKM • Penumbuhan Industri Kreatif 	- Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi - Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		- Program Promosi dan Kerjasama Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Produktivitas dan Daya Saing Industri <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri Hijau • Fasilitasi dan Insentif • Pengembangan 	- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	Infrastruktur Mutu <ul style="list-style-type: none"> • Perbaruan Permesinan Industri • Peningkatan Kemampuan Desain Produk • SDM yang Kompetitif 		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
3	Pengembangan Kawasan Industri/KEK <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Lahan Kawasan Industri • Konektivitas / Aksesibilitas • Insentif Fiskal dan Non Fiskal • Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda Bermasalah) • Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan • Ketersediaan Infrastruktur Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
4	Pembiayaan dengan akses dan biaya kompetitif <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan Pembangunan Program Infrastruktur dan Industri • Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan • Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Sentral Mengenai Suku Bunga Kredit 		
5	SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan NSPK SDM Industri • Peningkatan Kualitas SMK Industri • Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri • Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri 		
6	Hubungan Industrial yang Bersahabat <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 	Dinas Tenaga Kerja

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
7	Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis <ul style="list-style-type: none"> • Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri Luar Negeri Bilateral dan Multilateral • Insentif bagi Industri Bernilai Tambah Tinggi 		
8	Ketersediaan Energi dan Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas • Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM • Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan 	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan • Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Pertanian • Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Kelautan • Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Petrokimia • Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Migas 		
10	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pembangunan Ekraf • Perlindungan HKI • Akses ke sumber modal • Akses ke pasar 		

22. Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
1	Promosi Wisata Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Promosi produk wisata • Peningkatan Citra Pariwisata Nasional • Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Kemitraan - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pengembangan Destinasi Wisata <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan daya tarik wisata • Pembangunan sarana dan prasarana transportasi • Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan • Penyediaan BBM dan Listrik • Kelembagaan Pengembangan destinasi • Koordinasi pembangunan destinasi 		
3	SDM dan Kelembagaan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan • Peningkatan kualitas SMK pariwisata • Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata • Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata • Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata 		
4	Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat • Penumbuhan industri dan usaha kecil pariwisata 		
5	Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk		

No	Program Prioritas Nasional	Program RPJMD Kab. Lamongan	PD penanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pintu masuk udara • Kemudahan pintuk masuk laut 		
6	Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib • Penciptaan destinasi wisata sehat 		

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Keselarasan Visi Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing	Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak
Sejahtera	Sejahtera
	Berkeadilan
	Mandiri
Berdaya saing	Berdaya Saing
	Berakhlak

Keterangan: —————> = Mendukung/Selaras

Adapun Keselarasan Misi Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Keselarasan Misi Kabupaten Lamongan dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021	RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019
MISI KE - 1	MISI KE - 1
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan	Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	RPJMDP Provinsi Jawa Timur 2014-2019
kesehatan	
MISI KE - 2	MISI KE - 2
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
MISI KE - 3	MISI KE - 3
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
MISI KE - 4	MISI KE - 4
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik .	Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik
MISI KE - 5	MISI KE - 5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal	Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

1.3.3 Keterkaitan RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan

1.3.3.1 Keterkaitan Visi Misi RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 selaras dengan dokumen RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6
Keterkaitan Visi RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021	RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
VISI	VISI
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing	Terwujudnya Lamongan Yang Adil Merata, Sejahtera dan Berdaya Saing
Sejahtera	Adil
	Merata
	Sejahtera
Berdaya saing	Berdaya Saing

Keterangan: —————> = Mendukung/Selaras

Tabel 1.7
Keterkaitan Misi RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021	RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
---	---

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021		RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025	
Keselarasan Misi			
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	MISI 1	Mewujudkan Masyarakat Lamongan yang sehat, terdidik, bermoral dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah	MISI 2	Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah.
MISI 3	Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan	MISI 3	Mewujudkan pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang terisolir dan menghubungkan antar kawasan.
		MISI 5	Mewujudkan kemampuan dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Lamongan secara luas dan merata.
MISI 4	Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public.	MISI 4	Mewujudkan Lamongan yang Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik).
MISI 5	Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal	MISI 6	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal.

1.3.3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lamongan

Keterkaitan antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Lamongan juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan sasaran RPJPD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Keterkaitan Sasaran RPJMDP dengan RPJPD Kabupaten Lamongan

Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 	<p>Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sehat, terdidik, bermoral, dan berdaya saing untuk meningkatkan ke-sejahteraan hidupnya, ditandai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terciptanya sistem pendidikan yang baik, sehingga tidak hanya terjadi proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan lebih pada menanamkan dan membangun ma-syarakat terdidik, serta masyarakat yang cerdas dan berbudaya. b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki kemudahan akses terhadap pendidikan berkualitas, berpendidikan dan berkompentensi tinggi, berdaya saing, bermoral, dan menerapkan nilai-nilai budaya lokal; c. Terwujudnya kemampuan sumber daya manusia dalam menguasai, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah; d. Terwujudnya masyarakat Lamongan yang sehat jasmani, rohani dan sosial serta memiliki aksesibilitas yang baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Lamongan; e. Meningkatnya pemahaman dan penerapan perilaku hidup

Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
	<p>masyarakat yang bersih dan sehat, terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan;</p> <p>f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan, serta mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara bertahap;</p> <p>g. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf serta Pendapatan Per-Kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>).</p> <p>h. Tercapainya pembangunan manusia dan penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs).</p>

Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani 2. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan. 3. Meningkatnya kualitas koperasi dan UM 4. Meningkatnya realisasi investasi 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan. 	<p>Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi dan produktivitas sektor-sektor andalan daerah ditunjukkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya potensi daerah yang unggul dan berdaya saing; b. Meningkatnya pengembangan kawasan cepat tumbuh (growth pool) dan strategis sebagai pemicu pembangunan di Kabupaten La-mongan dengan pendekatan pem-bangunan kawasan terpadu dan pendekatan kluster kewilayahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya; c. Berkembangnya agroindustri dan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil melalui pola kemitraan dengan industri pe-ngolahan skala menengah dan besar yang mempunyai daya saing se-hingga mampu memenuhi kebu-tuhan lokal, membuka lapangan kerja di daerah dan peningkatan nilai ekspor dengan difasilitasi penerapan teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan di sentra-sentra produksi; d. Optimalnya pengelolaan potensi sektor pertanian secara luas dikarenakan adanya peningkatan inovasi terhadap komoditas unggulan daerah yang memiliki peluang dan daya saing; e. Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan

Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
	<p>menengah (UMKM);</p> <p>f. Berkembangnya akses terhadap permodalan dan peningkatan mutu, efisiensi produksi serta pemasaran;</p> <p>g. Meningkatnya ragam dan kualitas produk pariwisata serta promosi dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri;</p>
<p>1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat</p> <p>2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam.</p>	<p>Terwujudnya pembangunan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang memadai guna membuka daerah yang terisolir dan menghubungkan antar kawasan yang ditandai oleh :</p> <p>a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi, sumberdaya air dan utilitas di wilayah Lamongan;</p> <p>b. Tersedianya lingkungan pemukiman sehat bagi semua kalangan beserta sarana pendukung tempat tinggal lainnya seperti air bersih, sanitasi, dan kelistrikan;</p> <p>c. Tersedianya sarana transportasi dan jalan raya yang akan meningkatkan mobilitas</p>

Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
	<p>dan distribusi barang dan jasa yang akan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;</p> <p>d. Terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan berdasarkan rencana tata ruang yang telah disepakati ;</p> <p>e. Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Lamongan sebagai kabupaten yang adil, merata, sejahtera, dan berdaya saing.</p>
	<p>Terwujudnya kemampuan Kabupaten Lamongan dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan</p> <p>a. Tersedianya regulasi yang melindungi ekosistem dan kelangsungan sumberdaya alam.</p> <p>b. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang efektif berdasarkan tata kelola yang baik melalui perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan.</p> <p>c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah.</p> <p>d. Penegakan sanksi terhadap usaha pelanggaran dan perusakan lingkungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>e. Meningkatnya kesadaran dan peri-laku masyarakat dalam pengelo-laan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p> <p>f. Meningkatnya pengelolaan</p>

Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
	<p>lingkungan hidup dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan dalam mendukung kualitas kehidupan.</p> <p>g. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kemandirian Fiskal Daerah. 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah 4. Meningkatnya kinerja pelayanan publik 5. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik Governance (<i>e-gov</i>) 	<p>Terwujudnya Lamongan yang Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) ditunjukkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterapkannya akuntabilitas dengan penetapan target kuantitatif atas pencapaian suatu program. b. Terciptanya efektivitas suatu pengeluaran dengan pemantauan yang berdasarkan pada pencapaian target berbagai indikator kinerja (<i>performance indicators</i>) yang ditetapkan sebelumnya dan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu program secara menyeluruh. c. Terciptanya mekanisme pertanggungjawaban publik secara reguler dan verifikasi untuk efektivitas dan efisiensi pelaporan. d. Diterapkannya mekanisme yang jelas dalam menangani pengaduan dan keluhan.

Sasaran RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021	Sasaran RPJPD Kabupaten Lamongan 2005-2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. 4. Terwujudnya desa yang mandiri 5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga 6. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah 7. Meningkatnya penduduk yang bekerja 8. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan 9. Meningkatnya ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum 	<p>Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memahami kondisi kearifan dan nilai-nilai budaya lokal, ditunjukkan oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar kelompok masyarakat; b. Meningkatnya perlindungan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dan swadaya masyarakat; c. Terciptanya lembaga kemasyarakatan sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat dalam kegiatan; d. Terbinanya kerjasama dengan antara lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan sehingga berkembangnya kegiatan dan komunikasi antar desa; e. Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam segala bidang sehingga sejajar dan dapat berpartisipasi serta mampu bersaing dalam berbagai sektor pembangunan. f. Tumbuhnya kesadaran, sikap dan tingkah laku serta pola hidup dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan nilai-nilai daerah dan budaya bangsa Indonesia.

1.3.4 Keterkaitan Kebijakan, Strategi dan Program RPJMDP Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan

Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara Kebijakan RTRW dengan Kebijakan RPJMD yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Keterkaitan Kebijakan RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan

No	Kebijakan RTRW Kabupaten Lamongan	Kebijakan RPJMDP Kabupaten Lamongan
1	kebijakan sistem perkotaan	
1.1	Pengembangan sistem perkotaan dengan membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi tertentu dalam wilayah Kabupaten Lamongan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan; ➤ Peningkatan sarana dan prasarana serta Layanan Perhubungan Guna Mendukung Konektivitas antar wilayah; ➤ Penguatan peran lintas sektor dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data; ➤ Penanganan Infrastruktur Permukiman secara entitas (keterpaduan) guna menuju permukiman yang sehat dan layak; ➤ Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan, serta didukung konservasi sumber daya alam.
2	kebijakan sistem perdesaan	
2.1	Pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya status desa dari desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang; ➤ Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh ketersediaan saprodi yang ramah lingkungan, infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM;

No	Kebijakan RTRW Kabupaten Lamongan	Kebijakan RPJMDP Kabupaten Lamongan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan populasi dan produksi hasil ternak dengan didukung bibit yang unggul, pembinaan, sarana dan prasarana serta kemitraan usaha; ➤ Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan yang berdaya saing dengan didukung peningkatan teknologi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan; ➤ Peningkatan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman dan ketersediaan pangan.
2.2	Pengembangan sektor ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan serta memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat, dengan pengembangan agropolitan dan minapolitan serta bahan baku pangan	
3	Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten	
3.1	Pengembangan sistem jaringan transportasi, prasarana energi, telekomunikasi dan prasarana sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan sarana dan prasarana serta Layanan Perhubungan Guna Mendukung Konektivitas antar wilayah
3.2	pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kemudahan dan kepastian waktu pelayanan bidang perhubungan ➤ penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan peningkatan peran serta masyarakat ➤ Meningkatkan Tata Kelola Kepengairan Dalam Rangka Mendukung Produktivitas Lahan dan Pembangunan Berkelanjutan ➤ Peningkatan pelayanan masyarakat berbasis Teknologi Informasi (IT) dan komunikasi

Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara strategi RTRW dengan strategi RPJMD yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.10
Keterkaitan Startegi RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan

No	Strategi RTRW Kabupaten Lamongan	Strategi RPJMD Kabupaten Lamongan
1	kebijakan sistem perkotaan	
1.1	Mendorong dan mempercepat pertumbuhan wilayah kabupaten sebagai bagian dari Gerbangkertasusila yang merupakan PKN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan ➤ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah ➤ Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan pemerintahan atasan. ➤ Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; ➤ Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menelaraskan pembangunan yang berkelanjutan.
1.2	Mempercepat pengembangan Perkotaan Paciran – Brondong sebagai PKLp untuk pusat pengembangan industri, pelabuhan dan pariwisata melalui kerjasama dengan daerah lain dan dengan investor	
1.3	Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Paciran - Brondong sebagai kota pelabuhan dan industri melalui promosi, kerjasama dalam penyediaan tanah, dan pengembangan pelabuhan	
1.4	Mendorong pusat kegiatan ekspor-impor yang mendukung nasional, pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala nasional atau beberapa propinsi, simpul transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa propinsi	
2	kebijakan dan Strategi sistem perdesaan	
2.1	Mempercepat pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah selatan melalui peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan, serta pengembangan infrastruktur penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu;

No	Strategi RTRW Kabupaten Lamongan	Strategi RPJMDP Kabupaten Lamongan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengembangkan penyuluhan untuk peningkatan kualitas produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan percontohan di wilayah kecamatan serta pengembangan kawasan; ➤ Peningkatan penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi biaya danantisipasi perubahan iklim; ➤ Mengembangkan pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan lokal sebagai penyedia bibit dan pakan ternak; ➤ Pembinaan terhadap peternak/ kelompok secara terpadu disertai dengan percontohan dan pengembangan kawasan peternakan serta introducing tehnology peternakan; ➤ Membangun sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan.
2.2	Memprioritaskan pengembangan wilayah tertinggal melalui peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan; ➤ Menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong Dalam pembangunan desa; ➤ Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan; ➤ Keterpaduan penanganan infrastruktur Permukiman kumuh (sektor air bersih, drainase, persampahan, airlimbah dan akses jalan).
3	Kebijakan dan Stretegi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten	
3.1	Pengembangan sistem jaringan jalan raya melalui percepatan realisasi jalan bebas hambatan, jalan lingkar selatan pantai utara, jalan lingkar utara lamongan, dan jalan lingkar selatan babat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan; ➤ Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah.

No	Strategi RTRW Kabupaten Lamongan	Strategi RPJMD Kabupaten Lamongan
3.2	Pengembangan sistem transportasi massal berupa kereta api dan bus metro melalui peningkatan pelayanan kereta api dan bus metro di Kabupaten Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan; ➤ Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat; ➤ Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan.
3.3	Adanya perencanaan BTS terpadu untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan

Selain Keterkaitan Kebijakan dan Strategi, Keterkaitan antara RPJMD dengan RTRW Kabupaten Lamongan juga dapat ditunjukkan melalui keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD. Pelaksanaan Program RTRW secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terdapat beberapa program RTRW pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Swasta/BUMN/BUMD.

Adapun keterkaitan antara program RTRW dengan program RPJMD dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.11
Keterkaitan Program RPJMD Kabupaten Lamongan dengan RTRW Kabupaten Lamongan

No	Program RTRW Kabupaten Lamongan	Program RPJMD Kabupaten Lamongan	Keterangan
1	Pemantapan ibukota kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; 	
2	Penetapan perkotaan Pusat Wilayah Pengembangan (WP) sebagai Pusat Kegiatan Lokal Prioritas (PKLp)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; ➤ Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 	
3	Penetapan perkotaan kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. 	
4	Pengembangan perkotaan Lamongan sebagai pusat kegiatan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; 	
5	Pengembangan perkotaan Paciran - Brondong sebagai pusat industri dan perhubungan laut	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; ➤ Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 	
6	Pengembangan perkotaan Ba-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Perencanaan 	

No	Program RTRW Kabupaten Lamongan	Program RPJMD Kabupaten Lamongan	Keterangan
	bat sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	
7	Pengembangan perkotaan Ngimbang sebagai pusat pelayanan kegiatan agropolitan	➤ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	
8	Jalan nasional bebas hambatan : Lamongan - Lamongan - Tuban		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat
9	Jalan nasional arteri Lamongan - Jl. Pang. Sudirman; Jl. Pang. Sudirman - Jl. Jaksa Agung Suprpto; Jl. Jaksa Agung Suprpto - Lamongan; Lamongan - Babat; Babat - Widang		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
10	Jalan nasional kolektor Babat - Bojonegoro dan Lamongan - Sadang -Tuban		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pusat
11	Jalan Provinsi jalan kolektor Babat - Temangkar; Jl. Lamongrejo; Jl. Akhmad Dahlan; Jl. Sunan Drajad; Jl. Raya Mantup; Lamongan - Bts Kab. Mojokerto; Babat - Bts. Kab. Jombang; Jalan Lamongan-Babat; Jalan Halte (Dradah, Ngimbang dan Kambangan)		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
12	Rencana pengembangan jalan antar kecamatan	➤ Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
13	Jalan Lingkar Selatan Pantura dengan ruas jalan Kecamatan Paciran-Solokuro-Brondong		
14	Jalan Lingkar Utara Lamongan dengan ruas jalan Deket - Lamongan - Turi		
15	Jalan Lingkar Selatan Babat (Kecamatan Babat - Kab. Bojonegoro)		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
16	Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Perkotaan Lamongan		
17	Peningkatan kelas terminal		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

No	Program RTRW Kabupaten Lamongan	Program RPJMD Kabupaten Lamongan	Keterangan
18	Pengembangan terminal terpadu pantura di Kecamatan paciran		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
19	Pengadaan trayek baru yang menghubungkan kecamatan Paciran dengan Kabupaten Tuban		
20	Rencana pengembangan terminal barang		
21	Rencana pengembangan dan peningkatan terminal		
22	Pengembangan jalur angkutan bus metro rute Surabaya – Lamongan - Babat		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMD
23	Pengembangan jalur perkeretaapian komuter rute Surabaya – Lamongan – Babat		Dilaksanakan oleh BUMN
24	Transportasi perkeretaapian		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMD
25	Pengembangan pelabuhan Brondong sebagai pelabuhan pengumpul		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
26	Pengembangan pelabuhan umum yaitu pelabuhan Lamongan Shorebase (LS)		
27	Relokasi Bandar Udara Juanda		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
28	Pengembangan sistem inter-connected Jawa – Bali		
29	Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
30	Pengembangan SUTET		
31	Pengembangan SUTT		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
32	pengembangan Gardu Induk PLN 500 KV dan 150 KV		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
33	Penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) secara bersama-sama		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
34	Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah terpencil		
35	Sumberdaya air lintas Provinsi		Dilaksanakan oleh Peme-

No	Program RTRW Kabupaten Lamongan	Program RPJMD Kabupaten Lamongan	Keterangan
			rintah Pusat
36	Normalisasi DAS Bengawan Solo		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
37	Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero		Sharing dg Pemerintah Pusat
38	Rehabilitasi Kali Corong	➤ Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Sharing dg Pemerintah Provinsi
39	TPA	➤ Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Sharing dg Pemerintah Pusat
40	Tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
41	Perlindungan setempat sempadan pantai	➤ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
42	Perlindungan setempat sempadan sungai	➤ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
43	Perlindungan Waduk dan embung, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan embung;	➤ Program Penanggulangan Banjir	
44	Perlindungan mata air	➤ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
45	Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata	➤ Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ➤ Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
46	Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan	➤ Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	
47	Perlindungan kawasan rawan gelombang pasang	➤ Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	
48	Perlindungan kawasan rawan banjir	➤ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan	

No	Program RTRW Kabupaten Lamongan	Program RPJMD Kabupaten Lamongan	Keterangan
		Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
49	Perlindungan kawasan Gua Maharani dan Zoo sebagai kawasan lindung geologi		Sharing dg swasta
50	Kawasan Agropolitan	➤ Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	
51	Pengembangan hutan produksi dan fungsi lindung		Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
52	Pengembangan kawasan hutan rakyat	➤ Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
53	Pertanian tanaman pangan	➤ Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
54	Pertanian Hortikultura		
55	Perkebunan	➤ Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
56	Pengembangan kawasan peternakan	➤ Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
57	Perikanan tangkap	➤ Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
58	Perikanan Budidaya	➤ Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
59	Pengolahan ikan	➤ Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	
60	Pengembangan kawasan pertambangan	➤ Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	
61	Pengembangan kawasan industri		Dilaksanakan oleh Swasta/ BUMN
62	Pengembangan kawasan pariwisata		Dilaksanakan oleh Swasta
63	Pengembangan kawasan permukiman	➤ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
64	Pengembangan kawasan pesisir	➤ Program Pengembangan Kemitraan	
65	Pengembangan Gerbang-kertosusila sebagai KSN	➤ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
66	Kawasan Strategis Ekonomi	➤ Program Pengelolaan	

No	Program RTRW Kabupaten Lamongan	Program RPJMD Kabupaten Lamongan	Keterangan
	Lamongan Shorebase (LS) sebagai KSP	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
67	Kawasan Agroindustri Gelang Utara (Lamongan - Lamongan) dg industri pengolahan ikan laut sebagai KSP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Pengembangan Perumahan ➤ Program Lingkungan Sehat Perumahan 	
68	Kawasan Kerjasama Regional segitiga emas pertumbuhan Tuban - Lamongan - Bojonegoro sebagai KSP		Dilaksanakan oleh Swasta
69	Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
70	Kawasan Wisata Pantai Utara Lamongan (Wisata Bahari Lamongan, Maharani Zoo dan Goa, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, dan TPI di Pantura).	➤ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Sharing dg Swasta
71	Kawasan Pelabuhan ASDP		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
72	Kawasan Agropolitan	➤ Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
73	Kawasan perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program Perencanaan Tata Ruang; ➤ Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 	
74	Monumen Van Der Wijck	➤ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
75	Makam Sunan Drajat	➤ Program Pengembangan Kemitraan	
76	Makam Sendang Duwur		
77	Makam Jaka Tingkir	➤ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
78	Kawasan Situs/Makam Nyai Ratu Andongsari		
79	Desa Balun		
80	Situs-situs lainnya	➤ Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
81	Kawasan Penyangga DAS Bengawan Solo sebagai KSP		Dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
82	Kawasan Waduk Gondang		
83	Kawasan berhutan bakau	➤ Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	

1.3.5 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Provinsi Jawa Timur (RPJPD Provinsi) dan Kabupaten Lamongan (RPJPD Lamongan)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Lamongan wajib untuk dijadikan dasar dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan telaah yang dilakukan, periode perumusan RPJMD Kabupaten Lamongan beririsan dengan RPJP Nasional pada tahap Ketiga (2015-2019), RPJPD Jawa Timur pada tahap Ketiga (2015-2019) dan RPJPD Lamongan pada tahap Ketiga (2016-2020).

Tabel 1.12
Telaah RPJMN, RPJMD Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Lamongan

RPJP NASIONAL 2005-2025		RPJD Jawa Timur 2005-2025		RPJPD Lamongan 2005-2025	
Tahapan	Tujuan	Tahapan	Tujuan	No	MISI
Ketiga (2015-2019)	Memantapkan pemba-ngunan secara menye-luruh di Pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif Perekono-mian berlandaskan ke-unggulan sumber daya alam dan sum-ber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat	Ketiga (2015-2019)	Memantapkan pemba-ngunan secara menye-luruh di pelbagai bidang dengan mene-kankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandas-kan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemam-puan ilmu dan teknologi yang terus meningkat	Ketiga (2016-2020)	Memantapkan pemba-ngunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif per-ekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

Sesuai dengan telaah pada Tabel 4.2 tujuan pembangunan jangka panjang pada tahap ketiga, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten merumuskan tujuan yang sama yaitu: “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”

1.3.6 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Provinsi Jawa Timur (RPJMD Jawa Timur)

Disamping melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat nasional, provinsi dan daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan, juga harus bersesuaian dengan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian ini disamping untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis, juga menjadi pendorong pencapaian rencana pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan telaah yang dilakukan, terdapat benang merah yang kuat antara dokumen RPJMN dan RPJMD Jawa Timur. Dari visi yang ditetapkan, antara RPJMN dan RPJMD Jawa Timur memiliki aspek yang identik pada perwujudan kemandirian dan kepribadian/berakhlak. Sedangkan jika diturunkan pada misi, antara nasional dan Jawa Timur juga memiliki kesamaan. Misi keempat pada RPJMN menyebutkan “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”, memiliki kesamaan dengan misi kesatu RPJMD Jawa Timur yang tertulis “Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan”.

Kesamaan yang lain terdapat pada misi kelima RPJMN tentang “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” dengan misi kedua RPJMN Jawa Timur yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi” (lihat Tabel 4.3)

Tabel 1.13
Telaah RPJMN dan RPJMD Jawa Timur

RPJMN 2015-2019		RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019	
VISI: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”		VISI: “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”	
NO	MISI	NO	MISI

RPJMN 2015-2019		RPJMD JAWA TIMUR 2014-2019	
VISI: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”		VISI: “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”	
NO	MISI	NO	MISI
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	1	Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	2	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime	3	Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	4	Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	5	Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.		
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan		

1.3.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi meliputi pengembangan:

1. wilayah;
2. struktur ruang;
3. pola ruang; dan
4. kawasan strategis.

Berdasarkan perencanaan kewilayahan Jawa Timur, Kabupaten Lamongan masuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosusila dan Malang. Tidak hanya itu, Kabupaten Lamongan juga masuk dalam wilayah pengembangan Germakertosusila Plus

dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri;

1.3.8 Telaah RPJMD Daerah Sekitar

Kabupaten Lamongan secara geografis berbatasan dengan lima kabupaten yaitu: Kabupaten Gresik, Mojokerto, Jombang, Tuban dan Bojonegoro. Dari lima kabupaten tersebut, tiga diantaranya memiliki perodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Lamongan, yaitu Mojokerto, Tuban dan Gresik. Sedangkan dua kabupaten yang lain masih menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan periodenya masing-masing.

Dalam konteks perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan, telaah terhadap dokumen RPJMD daerah sekitar yang masih berlaku, wajib hukumnya untuk dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi serta prediksi terhadap rencana pembangunan Lamongan di masa lima tahun yang akan datang. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, yang nantinya diturunkan dalam bentuk strategi dan kebijakan harus mempertimbangkan perkembangan dan kondisi di daerah sekitar, baik pada aspek yang telah dicapai maupun yang akan dilakukan oleh daerah sekitar.

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang, terdapat dua aspek/bidang pembangunan yang perlu mendapat perhatian. Pada ketiga kabupaten ditemukan kesamaan arah kebijakan di bidang pertanian dan perekonomian.

Tabel 1.14 menunjukkan bahwa pada kebijakan pertanian, kedua kabupaten memiliki kesamaan dalam mengembangkan agroindustri. Bahkan untuk Jombang, pengembangan agroindustri diarahkan juga menjadi agro wisata.

Sedangkan pada aspek perekonomian, Kabupaten Bojonegoro fokus pada pengembangan industri pariwisata. Pada aspek perekonomian ini, Kabupaten Bojonegoro juga memiliki kesamaan dengan Jombang berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis. Jika di Jombang adalah kawasan industri Ploso maka di Bojonegoro mengembangkan kawasan agropolitan KDK (Kapas, Dander, Kalitidu).

Tabel 1.14
Keterkaitan RPJMD Lamongan dengan RPJMD Daerah Sekitar

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021		RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2013-2018		RPJMD Kabupaten Jombang 2014-2018	
ASPEK	TUJUAN	ASPEK	TUJUAN	ASPEK	TUJUAN
Visi	Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing	Visi	Terwujudnya pondasi Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan	Visi	Jombang Sejahtera Untuk Semua
Arah Kebijakan Pertanian	Pengembangan kawasan sentra jagung dan komoditas unggulan lainnya	Arah Kebijakan Pertanian	Pengembangan Agro-industri pedesaan	Arah Kebijakan Pertanian	Meningkatkan fungsi & peran kawasan agropolitan sebagai sentra produksi, pemasaran dan kunjungan agrowisata
Arah kebijakan perekonomian	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan didukung ketersediaan infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM	Arah kebijakan perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Optimalisasi <i>cluster</i> industri kawasan agropolitan KDK (Kapas, Dander, Kalitidu) ➢ Meningkatkan destinasi pariwisata berbasis even ekonomi, olahraga, religi, seni dan budaya 	Arah kebijakan perekonomian	Penyediaan infrastruktur penunjang kawasan industri Ploso

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab-sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan diketahui kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
- 3.3 Kerangka Pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas.

- 4.1 Permasalahan Pembangunan;
- 4.2 Isu Strategis;
- 4.3 Telaah Dokumen Perencanaan Terkait.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan visi dan misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, serta tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

1.5 Visi;

1.6 Misi;

1.7 Tujuan dan Sasaran.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah daerah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program pembangunan daerah serta pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan target capaian pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD. Bab ini bertujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan kesinambungan proses pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan dengan masa yang akan datang.

Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

10.1 Pedoman Transisi

10.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB XI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).
2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Merupakan bagian dari RPJPD Tahun 2005-2025, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu Bupati/Wakil Bupati Lamongan periode 2016-2021.
3. Menyediakan standar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap PD.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun.

Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Lamongan termasuk Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan diarahkan pada penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Lamongan tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Lamongan



Sumber : RTRW Kabupaten Lamongan

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Tabel 2.1
Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Sukorame	41,5	9	38
2	Bluluk	54,2	9	41
3	Ngimbang	114,3	19	77
4	Sambeng	195,4	22	86
5	Mantup	93,1	15	72
6	Kembangbahu	63,8	18	77
7	Sugio	91,3	21	86
8	Kedungpring	84,4	23	74
9	Modo	77,8	17	76
10	Babat	63,0	23	47
11	Pucuk	44,8	17	34
12	Sukodadi	52,3	20	77
13	Lamongan	40,4	20	30
14	Tikung	53,0	13	68
15	Sarirejo	47,4	9	32
16	Deket	50,1	17	55
17	Glagah	40,5	29	87
18	Karangbinangun	52,9	21	71
19	Turi	58,7	19	53
20	Kalitengah	43,4	20	44
21	Karanggeneng	51,3	18	35
22	Sekaran	49,7	21	29
23	Maduran	30,2	17	31
24	Laren	96,0	20	38
25	Solokuro	101,0	10	20
26	Paciran	47,9	17	30
27	Brondong	74,6	10	23

Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017

Berdasarkan data tersebut Kecamatan Sambeng merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 195,44Km², memiliki 22 desa dan 86 dusun. Sedangkan Kecamatan Maduran merupakan kecamatan dengan wilayah yang terkecil dengan luas 30,15 Km², memiliki 17 Desa dan 31 dusun

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

2.1.2.1 Posisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Lamongan memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada jalur Pantai Utara yang menghubungkan kabupaten/kota di wilayah Utara Jawa Timur. Kabupaten Lamongan berada dalam perlintasan jalur arteri primer Surabaya-Lamongan-Tuban hingga Jawa Tengah dan jalan provinsi Mojokerto-Lamongan. Ibukota Kabupaten Lamongan berjarak 44,8 km dari Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa

Timur. Kabupaten Lamongan terletak pada 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 41" sampai 112° 33' 12" bujur timur.

2.1.2.2 Kondisi Kawasan Kabupaten Lamongan

Wilayah Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi tiga karakteristik yaitu :

1. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Sarirejo dan Kembangbahu
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Maduran, Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah.

2.1.2.3 Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0-25 m dengan luas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, dataran ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan dataran dengan ketinggian di atas 100 m.

Tabel 2.2
Luas Daerah Per Kecamatan Menurut Klasifikasi Kemiringan
Kabupaten Lamongan

No.	Kecamatan	0-2%	2-15%	15-40%	> 40%	Luas (Ha)
1	Sukorame	2.923	1.224	-	-	4.147
2	Bluluk	3.503	1.850	62	-	5.415
3	Ngimbang	5.069	1.452	4.912	-	11.433
4	Sambeng	5.116	11.806	2.390	232	19.544
5	Mantup	8.217	1.060	30	-	9.307
6	Kembangbahu	6.352	32	-	-	6.384
7	Sugio	7.020	2.027	82	-	9.129
8	Kedungpring	6.041	1.930	472	-	8.443
9	Modo	5.953	1.407	420	-	7.780
10	Babat	5.361	772	162	-	6.295
11	Pucuk	4.386	98	-	-	4.484
12	Sukodadi	5.232	-	-	-	5.232
13	Lamongan	4.038	-	-	-	4.038
14	Tikung	5.299	-	-	-	5.299
15	Sarirejo	4.739	-	-	-	4.739
16	Deket	5.005	-	-	-	5.005
17	Glagah	4.052	-	-	-	4.052
18	Karangbinangun	5.288	-	-	-	5.288
19	Turi	5.869	-	-	-	5.869
20	Kalitengah	4.335	-	-	-	4.335
21	Karanggeneng	5.132	-	-	-	5.132
22	Sekaran	4.965	-	-	-	4.965
23	Maduran	3.015	-	-	-	3.015
24	Laren	7.285	2.315	-	-	9.600
25	Solokuro	2.110	7.850	142	-	10.102
26	Paciran	-	4.314	425	50	4.789
27	Brondong	5.047	2.337	75	-	7.459
Jumlah		131.352	40.474	9.172	282	181.280

Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017

2.1.2.4 Geologi

Secara fisiografis wilayah Kabupaten Lamongan bagian utara dan selatan termasuk dalam Zone Rembang (van Bemmelen, 1949) yang disusun oleh endapan paparan yang kaya akan unsur karbonatan, sedangkan wilayah bagian tengah termasuk zone Randu blatung yang kenampakan permukaannya merupakan dataran rendah, namun sebetulnya merupakan suatu depresi (cekungan) yang tertutup oleh endapan hasil pelapukan dan erosi dari batuan yang lebih tua pada Zone Kendeng dan Rembang.

Sejarah geologi Kabupaten Lamongan diperkirakan dimulai kurang lebih 37 juta tahun yang lalu (Kala Oligosen). Saat itu wilayah Kabupaten Lamongan masih berupa lautan (bagian dari Cekungan Jawa Timur). Selanjutnya terjadi proses sedimentasi secara

berurutan ke atas berupa penghamparan batuan sedimentasi laut yang kaya unsur karbonatan. Proses ini berlangsung hingga kurang lebih 19 juta tahun (hingga Kala Polisen). Pada kurang lebih 1,8 juta tahun yang lalu terjadi aktifitas tektonik (*Orogenesa Plio-Pleistosen*) yang menyebabkan terangkatnya Kabupaten Lamongan muncul ke permukaan laut.

Adapun jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Satuan Batu Lanau dengan sisipan batu gamping pasiran dan batu lempung
2. Satuan Napal dengan sisipan batu pasir gampingan, batu pasir dan tuff
3. Satuan Batu Lempung dengan sisipan batu pasir gampingan dan batu gamping
4. Satuan Batu Pasir Tufan dengan sisipan konglomerat, breksi dan batu lempung
5. Satuan Batu Gamping Koral dan Klastik dengan sisipan napal dan batu lempung
6. Aluvial

2.1.2.5 Hidrologi

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir, namun sebaliknya pada saat musim kemarau disebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang.

Ketersediaan air permukaan ini sebagian tertampung di waduk-waduk, rawa, embung dan sebagian lagi mengalir melalui sungai-sungai. Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang \pm 68 Km dengan debit rata - rata 531,61 m³/bulan (debit maksimum 1.758,46 m³ dan debit minimum 19,58 m³) yang bermata air di Waduk Gajah Mungkur (Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah), Kali Blawi sepanjang \pm 27 Km dan Kali Lamong sepanjang \pm 65 Km yang bermata air di Kabupaten Lamongan. Selain dialiri oleh ketiga sungai besar tersebut, kondisi hidrologi ditentukan oleh adanya telaga dan mata air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih dan sarana rekreasi masyarakat.

2.1.2.6 Klimatologi

Aspek klimatologi ditinjau dari kondisi suhu dan curah hujan. Keadaan iklim di Kabupaten Lamongan merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan di Kabupaten Lamongan tahun 2016 terbilang cukup tinggi. Tercatat rata-rata curah hujan yang diperoleh dari 25 stasiun pengamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu sebanyak 2.127 mm dengan rata-rata curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Februari 2016 yaitu sebanyak 10.232 mm.

Tabel 2.3
Rata-rata Jumlah hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	297	5.690
2	Februari	410	10.232
3	Maret	217	4.667
4	April	231	4.374
5	Mei	178	4.234
6	Juni	217	5.518
7	Juli	102	1.200
8	Agustus	70	810
9	September	84	1.588
10	Oktober	252	3.904
11	Nopember	284	5.151
12	Desember	343	5.814
Rata-rata		224	4.432

Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air 2017

2.1.2.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lamongan hingga tahun 2016 yang terbesar adalah untuk areal persawahan, dengan rincian sawah irigasi 45.841 Ha atau 25,29 persen dan sawah tadah hujan seluas 33.479 Ha atau 18,23 persen. Pemanfaatan lahan terbesar berikutnya adalah hutan seluas 33.717,30 Ha atau setara dengan 18,45 persen dari total lahan. Selengkapnya berkaitan tata guna lahan disajikan Tabel 2.3.

Tabel 2.4
Kondisi Tata Guna Tanah Kabupaten Lamongan Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	Permukiman	13.151,46	7,25
2	Sawah Irigasi	45.841,00	25,29
3	Sawah Tadah Hujan	33.479,00	18,47
4	Perkebunan	9.919,14	5,47
5	Hutan	33.717,30	18,60
6	Hutan Rakyat	7.098,10	3,92
7	Tambak	1.380,05	0,76
8	Sungai	8.760,00	4,83
9	Waduk	8.719,50	4,81
10	Tegalan/Ladang	10.993,45	6,06
11	Pertambangan	1.200,00	0,66
12	Peruntukan Lainnya (rawa,tanah tandus dll)	5.997,00	3,31
Jumlah		181.280,00	99,44

Sumber : Lamongan Dalam Angka 201

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 27 kecamatan dibagi menjadi lima wilayah pengembangan (WP), atas dasar orientasi pergerakan terhadap pusat wilayah pengembangan (WP), tersedianya akses penunjang ke pusat wilayah pengembangan (WP), kesamaan terhadap potensi wilayah, mengurangi kesenjangan wilayah dan karakter penduduk. Masing-masing pusat Wilayah Pengembangan (WP) akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing.

Adapun sistem perwilayahan di Kabupaten Lamongan beserta fungsi, peran dan arahan kegiatannya adalah sebagai berikut.

2.1.3.1 Wilayah Pengembangan I (WP I) Lamongan

WP Lamongan meliputi Kecamatan Lamongan, Kecamatan Dekat, Kecamatan Glagah, Kecamatan Tikung, Kecamatan Sarirejo, Kecamatan Karangbinangun dan Kecamatan Kembangbahu, dengan pusat di Perkotaan Lamongan. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah:

1. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
3. Sebagai pusat kesehatan skala kabupaten;
4. Sebagai pusat pendidikan;
5. Sebagai pusat olahraga dan kesenian skala kabupaten;
6. Sebagai pusat peribadatan kabupaten;
7. Sebagai pusat perlindungan sumber daya air (Sungai Bengawan Solo).

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan kegiatan pelayanan umum;
2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
3. Pengembangan kegiatan kesehatan (Rumah Sakit, praktek dokter, apotek, puskesmas);
4. Pengembangan pendidikan;
5. Pengembangan transportasi darat;
6. Pengembangan kegiatan olahraga dan kesenian skala kabupaten;
7. Pengembangan kegiatan peribadatan.

Sedangkan kegiatan utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan pertambangan;
2. Pengembangan pertanian;
3. Pengembangan peternakan;
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat),
5. Pengembangan kegiatan perikanan; serta

6. Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya.

2.1.3.2 Wilayah Pengembangan II (WP II) Paciran-Brondong

WP Paciran-Brondong ini meliputi Kecamatan Paciran, Kecamatan Brondong, Kecamatan Laren dan Kecamatan Solokuro, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Paciran dan Brondong. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
3. Sebagai pusat industri besar dan strategis nasional;
4. Sebagai pusat transportasi nasional;
5. Sebagai pengembangan kawasan minapolitan;
6. Sebagai pusat pelabuhan dan industri perikanan skala regional dan nasional;
7. Sebagai pusat kegiatan pariwisata skala regional;
8. Sebagai pusat Pelayanan pelabuhan barang skala regional;
9. Sebagai pusat pengembangan pendidikan.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan;
2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
3. Pengembangan industri besar;
4. Pengembangan transportasi darat;
5. Pengembangan kegiatan pelabuhan dan perikanan laut;
6. Pengembangan kegiatan wisata skala Regional; serta
7. Pengembangan kegiatan pendidikan.

Serta Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah:

1. Pengembangan kegiatan industri (Kerajinan Rakyat);
2. Pengembangan pertanian;
3. Pengembangan peternakan;
4. Pengembangan pertambangan;
5. Pengembangan kehutanan;
6. Perlindungan kawasan lindung (mangrove).

2.1.3.3 Wilayah Pengembangan III (WP III) Babat

WP Babat meliputi Kecamatan Babat, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Maduran, Kecamatan Pucuk dan Kecamatan Kedungpring, dengan pusat di Perkotaan Babat. Fungsi dan peranan perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Regional;

3. Sebagai pusat pengembangan Industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian);
4. Sebagai pusat perlindungan sumberdaya air (aliran sungai Bengawan Solo);
5. Pengembangan jaringan transportasi darat regional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan pelayanan umum tingkat Kecamatan;
2. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala Kabupaten dan Regional;
3. Pengembangan transportasi darat;
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian);
5. Perlindungan kawasan konservasi sumberdaya air (aliran sungai Bengawan Solo);
6. Pengembangan transportasi darat (jalan dan kereta api).

Kegiatan Utama sebagai pendukung WP ini adalah:

1. Pengembangan pertanian;
2. Pengembangan peternakan; serta
3. Pengembangan pariwisata.

2.1.3.4 Wilayah Pengembangan IV (WP IV) Sukodadi

WP Sukodadi ini meliputi Kecamatan Sukodadi, Kecamatan Turi, Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Kalitengah dan Kecamatan Sugio, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sukodadi. Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah :

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
3. Sebagai pusat pelayanan umum;
4. Sebagai pusat pengembangan kegiatan industri;
5. Sebagai pusat kegiatan pariwisata;
6. Sebagai pusat kegiatan pertanian; serta
7. Pengembangan jaringan transportasi skala regional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan;
2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. Pengembangan transportasi darat;
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat; industri pengolahan hasil ternak dan pertanian);
5. Pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya;
6. Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan); serta
7. Pengembangan transportasi darat.

Kegiatan utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan pertanian;
2. Pengembangan peternakan;
3. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat),
4. Pengembangan transportasi;
5. Pengembangan kegiatan pariwisata.

2.1.3.5 Wilayah Pengembangan V (WP V) Ngimbang

WP Ngimbang ini terdiri dari Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, Kecamatan Bluluk, Kecamatan Sukorame, Kecamatan Mantup dan Kecamatan Modo, dengan pusat pelayanan berada di Kecamatan Ngimbang. Fungsi dan peranan Perkotaan sebagai pusat WP ini adalah:

1. Sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan/lokal;
2. Sebagai pusat kegiatan pertanian;
3. Sebagai pusat pengembangan Agropolitan; serta
4. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil pertanian).

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di WP ini adalah :

1. Pengembangan pelayanan umum skala kecamatan dan kabupaten;
2. Pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal;
3. Pengembangan transportasi darat;
4. Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
5. Pengembangan kegiatan agribisnis; serta
6. Pengembangan kehutanan.

Kegiatan utama sebagai pendukung WP ini adalah :

1. Pengembangan pertanian (tanaman pangan dan perkebunan);
2. Pengembangan peternakan;
3. Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat);
4. Pengembangan pariwisata;
5. Pengembangan kehutanan; serta
6. Pengembangan transportasi.

2.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamongan, rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Lamongan adalah bencana banjir dan bencana gelombang pasang.

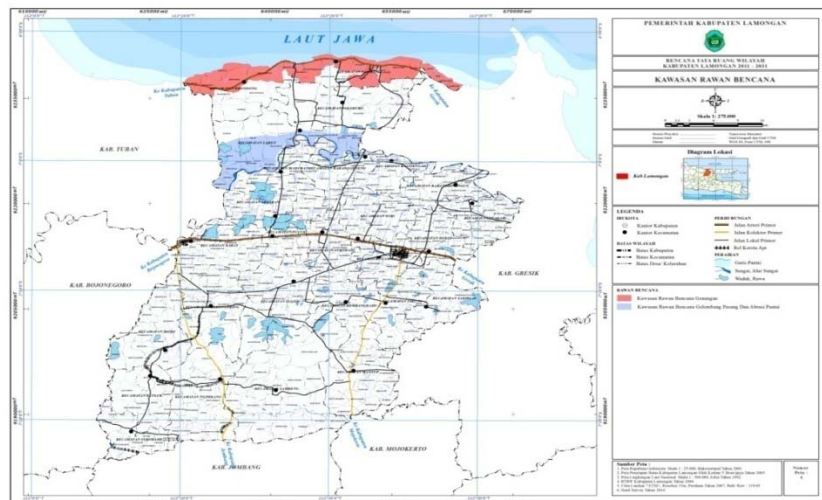
2.1.4.1 Bencana Banjir

Beberapa kawasan di Kabupaten Lamongan merupakan kawasan rawan banjir terutama pada kawasan yang dilalui oleh aliran Sungai Bengawan Solo yaitu di Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah dan Karangbinangun. Selain kawasan tersebut kawasan lainnya yang termasuk dalam rawan bencana banjir antara lain Kecamatan Deket dan Turi. Luas seluruh kawasan rawan bencana di Kabupaten Lamongan mencapai +29.273 Ha atau sekitar 16,15 % dari luas wilayah Kabupaten Lamongan. Beberapa penyebab terjadinya banjir antara lain disebabkan oleh semakin berkurangnya kawasan hijau di sekitar daerah sungai, dan banyak terdapat kawasan budidaya di sekitar kawasan konservasi.

2.1.4.2 Bencana Gelombang Pasang

Rawan bencana berupa rawan gelombang pasang perlu diantisipasi pada kawasan pantura yaitu di pesisir Brondong dan Paciran. Kawasan ini merupakan kawasan dengan intensitas pengembangan yang tinggi terutama untuk kegiatan-kegiatan budidaya. Untuk menyeimbangkan kelestarian lingkungan sekitar pantai dan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana terutama bencana gelombang pasang, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan sejak dini.

Gambar 2.2
Peta Kawasan Bencana Lamongan



Sumber : RTRW Kabupaten Lamongan

2.1.5 Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Lamongan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang tercatat sepanjang tahun 2011-2016 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 1,65% tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 4,97%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak

0,70% dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 0,88%. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2011-2016 rata-rata berada pada kisaran 0,61%. Perkembangan jumlah penduduk secara detail disajikan dalam tabel 2.5 dan 2.6

Di sisi tingkat pendidikan, berdasarkan data Lamongan Dalam Angka tahun 2017 penduduk Kabupaten Lamongan didominasi lulusan SD sederajat sebanyak 38.43 persen diikuti oleh penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebanyak 21.45 persen; SMP sederajat 18.71 persen; SMA sederajat 17.20 persen; S1 sebanyak 3.33 persen; Diploma 0.69 persen; S2 sebanyak 2.720 orang atau 0.20 persen dan S3 hanya sebanyak 39 orang. Sedangkan mata pencaharian utama penduduk Lamongan adalah bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak 282.272 orang. Di posisi kedua lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 107.550 orang diikuti lapangan usaha berturut-turut yaitu industri pengolahan 75.992 orang; jasa kemasyarakatan, social dan perorangan 62.997 orang; bangunan 41.372 orang; angkutan, pergudangan dan komunikasi 19.264 orang; keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan 9.130 orang.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Peduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



No.	KECAMATAN	TAHUN						(laju pertumbuhan penduduk)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	SUKORAME	21.854	21.736	21.222	20.944	20.401	20.957	-0,70%
2	BLULUK	22.695	21.337	22.211	22.426	21.393	22.665	-0,02%
3	MODO	48.107	47.485	49.962	49.676	48.990	49.844	0,59%
4	NGIMBANG	42.872	45.942	47.192	46.855	46.386	47.417	1,69%
5	BABAT	85.185	85.066	88.547	88.332	88.958	88.406	0,62%
6	KEDUNGPRING	65.831	56.370	60.855	59.900	60.167	60.186	-1,48%
7	BRONDONG	57.205	67.821	73.295	71.400	73.790	71.180	3,71%
8	LAREN	37.268	46.588	50.910	47.873	52.054	49.397	4,81%
9	SEKARAN	60.253	40.852	47.448	43.926	49.099	47.041	-4,04%
10	MADURAN	41.927	31.196	36.054	34.645	37.329	35.527	-2,72%
11	SAMBENG	54.718	50.055	51.348	51.579	50.384	52.170	-0,79%
12	SUGIO	60.765	57.929	61.875	61.392	60.567	62.052	0,35%
13	PUCUK	51.267	47.085	48.816	48.514	49.529	49.132	-0,71%
14	PACIRAN	78.698	90.604	94.499	93.248	96.017	94.230	3,05%
15	SOLOKURO	44.369	38.437	46.029	45.857	47.086	47.342	1,09%
16	MANTUP	43.687	44.187	44.881	45.245	43.898	46.128	0,91%
17	SUKODADI	58.146	54.312	56.145	56.391	55.538	57.405	-0,21%
18	KARANGGENENG	47.660	41.603	44.154	43.843	44.735	44.442	-1,16%
19	KEMBANGBAHU	44.759	49.465	48.823	48.953	47.101	49.788	1,79%
20	KALITENGAH	35.333	33.417	35.756	36.007	35.429	36.009	0,32%
21	TURI	53.144	52.995	53.755	54.592	53.198	55.034	0,58%
22	LAMONGAN	65.847	67.289	67.167	68.105	66.549	68.729	0,72%
23	TIKUNG	41.342	43.852	43.822	44.126	42.840	44.968	1,41%
24	KARANGBINANGUN	45.728	39.068	41.248	41.851	40.381	41.310	-1,68%
25	DEKET	44.454	43.932	44.553	45.149	43.608	44.867	0,15%
26	GLAGAH	27.251	41.097	42.879	43.064	42.525	42.695	7,77%
27	SARIREJO	25.533	24.659	24.813	24.907	24.314	25.198	-0,22%
Jumlah		1.305.898	1.284.379	1.348.259	1.338.800	1.342.266	1.354.119	0,61%

Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017



Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

Jumlah Penduduk menurut Agama
Population by Religion
2016

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghucu	Kepercayaan	Jumlah
1.	Sukorame	20.919	37		1				20.957
2.	Bluluk	22.394	271						22.665
3.	Ngimbang	49.573	258	12		1			49.844
4.	Sambeng	47.311	98	5		3			47.417
5.	Mantup	88.351	40	15					88.406
6.	Kembangbahu	60.093	93						60.186
7.	Sugio	71.143	6	31					71.180
8.	Kedungpring	49.364	29		4				49.397
9.	Modo	46.974	63	4					47.041
10.	Babat	34.903	515	109					35.527
11.	Pucuk	52.148	12	10					52.170
12.	Sukodadi	62.004	24	20	4				62.052
13.	Lamongan	48.286	397	314	74	61			49.132
14.	Tikung	94.207	11	12					94.230
15.	Sarirejo	47.337	5						47.342
16.	Deket	46.115		13					46.128
17.	Glagah	57.401	4						57.405
18.	Karangbinangun	44.379	63						44.442
19.	Turi	48.662	847		279				49.788
20.	Kalitengah	35.992	17						36.009
21.	Karanggeneng	55.028	6						55.034
22.	Sekaran	68.711	12	6					68.729
23.	Maduran	44.968							44.968
24.	Laren	41.310							41.310
25.	Solokuro	44.867							44.867
26.	Paciran	42.660	4	28		3			42.695
27.	Brondong	25.167	13	14	4				25.198
	Jumlah	1.350.267	2.825	593	366	68	0	0	1.354.119

Sumber : Lamongan Dalam Angka 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi modern yang ditujukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah/wilayah dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB dapat ditunjukkan berdasarkan struktur lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2016 sebesar 5,86 persen, meningkat dibanding tahun 2015 yang mencapai 5,77 persen. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lamongan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari sisi eksternal diantaranya kondisi ekonomi global yang belum membaik serta harga komoditas internasional yang masih stagnan di level yang rendah. Beberapa indikator yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Lamongan diantaranya keberhasilan pemerintah mempertahankan laju inflasi pada level yang rendah (Inflasi nasional Tahun 2016 pada level 2,74 persen; lebih rendah dibanding tahun 2015 yang sebesar 3,08 persen).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,84 persen, diikuti Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,95 persen, dan transportasi dan Pergudangan sebesar 8,66 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB tumbuh 4,32 persen pada tahun 2016, melambat dibanding tahun 2015 yang sebesar 4,60 persen. Hal yang sama juga terjadi pada Lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh melambat dari 7,22 persen pada tahun 2015 menjadi 6,99 persen pada tahun 2016.

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dari 7,14 persen pada tahun 2015 menjadi 6,82 persen pada tahun 2016. Meskipun kondisi ekonomi masih belum mengalami perbaikan di tahun 2016, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun 2015, yaitu Konstruksi yang tumbuh 1,66 persen atau meningkat 4,68 persen poin; Industri Pengolahan tumbuh 8,65 persen atau meningkat 0,94 persen poin, serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang tumbuh 4,49 persen atau meningkat 0,06 persen poin. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha secara detail pada tabel di bawah.

Tabel 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011- 2016

KATEGORI		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,29	7,16	5,8	5,76	4,57	4,32
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,73	2,79	1,65	6,08	9,64	3,42
C.	Industri Pengolahan	8,31	6,44	6,94	8,47	8,14	8,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,33	10,16	3,78	2,83	0,45	8,95
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,85	4,33	7,91	3,46	5,43	5,49
F.	Konstruksi	4,67	4,01	5,89	5,08	1,66	6,34
G.	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,25	9,4	9,85	7,84	7,2	6,99
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,07	6,28	8,09	8,87	7,61	8,66
I.	Penyediaan akomodasi & makan minum	10,38	5,69	6,04	9,66	12,8	9,84
J.	Informasi dan Komunikasi	7,81	7,84	7,81	6,8	6,93	7,04
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,34	10,33	13,05	7,05	7,14	6,82
L.	Real Estate	11,75	10,84	9,09	8,07	8,03	5,95
M. N.	Jasa Perusahaan	4,44	3,97	5,85	6,36	6,84	5,77
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,18	1,44	1,69	0,88	6,05	4,17
P.	Jasa Pendidikan	7,29	8,4	8,74	7,99	7,96	6,4
Q.	Sosial	19,08	11,96	9,1	9,69	9,14	8,26
R. S. T. U.	Jasa lainnya	6,19	1,63	4,27	7,34	7,06	3,35
	Produk Domestik Regional Bruto	6,67	6,92	6,86	6,41	5,77	5,86

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Lamongan masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan daripada lapangan usaha ekonomi lainnya. Sumbangan terbesar pada tahun 2016 seperti tahun-tahun sebelumnya dihasilkan oleh lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 38,87 persen; kemudian lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 18,98 persen; lapangan usaha kategori Konstruksi sebesar 10,77 persen; lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 8,08 persen; dan lapangan usaha kategori informasi dan Komunikasi sebesar 5,97 persen. Sementara peranan lapangan usaha kategori yang lain kontribusinya dibawah 5 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai seberapa besar peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Apabila dilihat perkembangan kontribusi masing-masing kategori dari tahun ke tahun terhadap total PDRB pada lapangan usaha/kategori pertanian, kehutanan, dan

perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan peran dan selalu menjadi penyumbang utama dalam pembentukan PDRB, demikian pula untuk kategori industri pengolahan dan perdagangan. Hal ini akan dicermati pada pokok pembahasan selanjutnya pada masing-masing kategori lapangan usaha.

Tabel 2.8
Peranan Lapangan Usaha terhadap Total PDRB Tahun 2011 - 2016 (persen)

KATEGORI		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutanan, dan	38,08	39,08	39,56	40,13	39,96	38,87
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,35	1,26	1,19	1,28	1,36	1,36
C.	Industri Pengolahan	7,23	7,12	7,02	7,13	7,24	8,08
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,11
F.	Konstruksi	11,28	11,02	10,68	10,66	10,5	10,77
G.	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	18,56	18,49	18,96	18,73	18,75	18,98
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,71	0,69	0,71	0,74	0,76	0,78
I.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,28	1,26	1,25	1,31	1,41	1,48
J.	Informasi dan Komunikasi	7,15	6,87	6,62	6,3	6,23	5,97
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,83	1,94	2,03	2,06	2,07	2,07
L.	Real Estate	1,96	1,97	1,99	1,95	2,04	2,09
M. N.	Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,86	4,72	4,44	4,1	4,02	3,89
P.	Jasa Pendidikan	2,47	2,53	2,55	2,58	2,58	2,57
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0,74	0,75	0,77	0,8	0,81	0,84
R. S. T. U.	Jasa lainnya	2,03	1,84	1,76	1,8	1,86	1,79
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

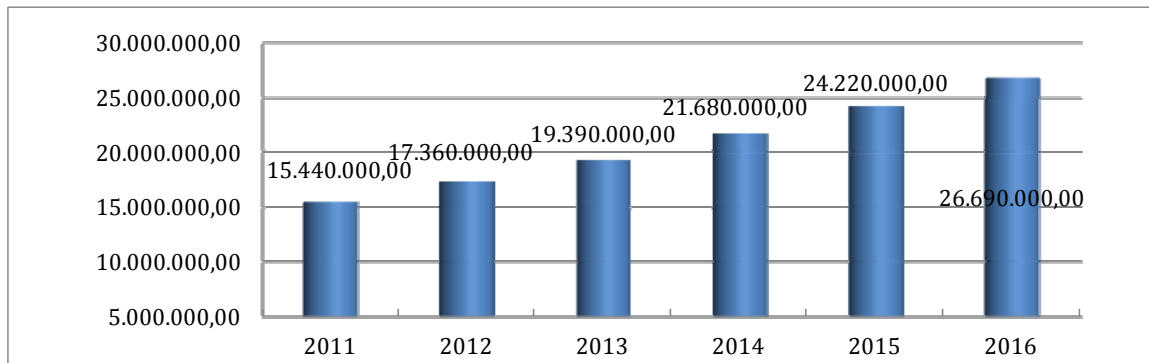
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

2.2.1.2 PDRB Perkapita

Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Perkapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB Perkapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar, sehingga pengaruh inflasi menjadi cukup dominan. Trend

perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pertumbuhannya relatif stabil. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan tersaji dalam grafik berikut.

Grafik 2.1
Nilai dan Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2016



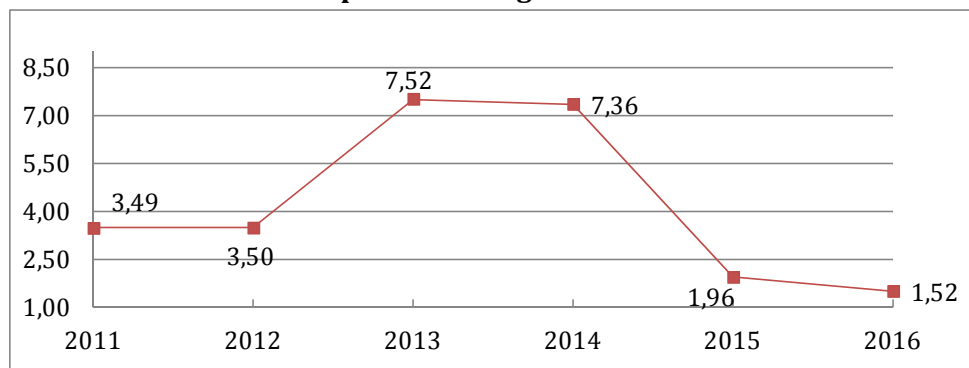
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Inflasi di Kabupaten Lamongan relative belum stabil. Pada tahun 2011 dan 2012 berada pada kisaran 3%, namun pada tahun 2013 dan 2014 naik pada kisaran 7% dan turun tajam pada tahun 2015 menjadi 1,96%. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali turun di kisaran 1.52% masih dibawah Propinsi Jawa Timur (2.74%) maupun Nasional (3.02%). Penurunan angka inflasi tersebut sangat dipengaruhi rendahnya inflasi di komoditas bahan makanan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perumahan, air, listrik dan bbm, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Grafik Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Grafik 2.2
Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

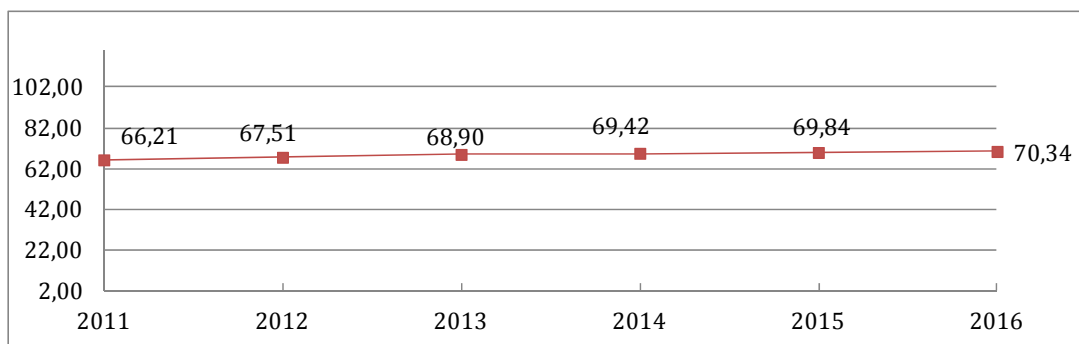


Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

IPM merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai outcome pembangunan multi dimensi dan jangka panjang. IPM juga merupakan Indeks komposit atas Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Capaian IPM Kabupaten Lamongan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 senantiasa menunjukkan progress yang cukup signifikan dan sebagaimana tabel dibawah ini :

Grafik 2.3
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

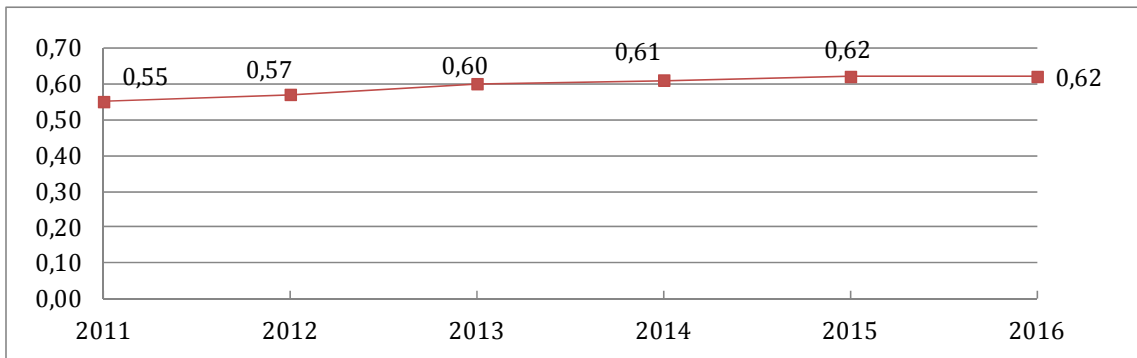


Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

Salah satu komponen pembentukan IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*) dan Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Scholing/EYS*). Pada proses pembentukan IPM, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai Indeks Pendidikan. *MYS* pada tahun 2016 sebesar 7.29 tahun, dan

EYS sebesar 13.44 tahun. Sedangkan data Indeks Pendidikan selama periode 2011-2016 sebagaimana tabel di bawah ini.

Grafik 2.4
Indeks Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



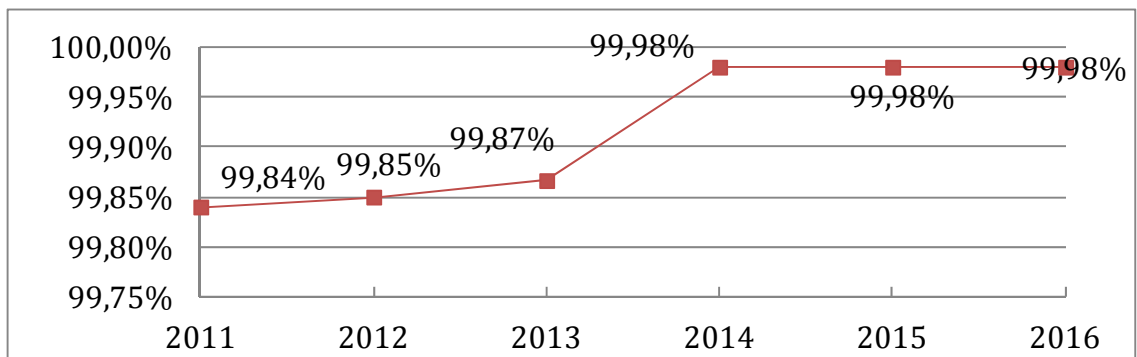
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

2.2.2.1 Urusan Pendidikan

➤ Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. AMH Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari 99,84 pada tahun 2011 menjadi 99,98 pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 0,14. Perkembangan AMH Kabupaten Lamongan tahun 2011 sampai tahun 2016 tersaji dalam grafik berikut.

Grafik 2.5
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2011-2016



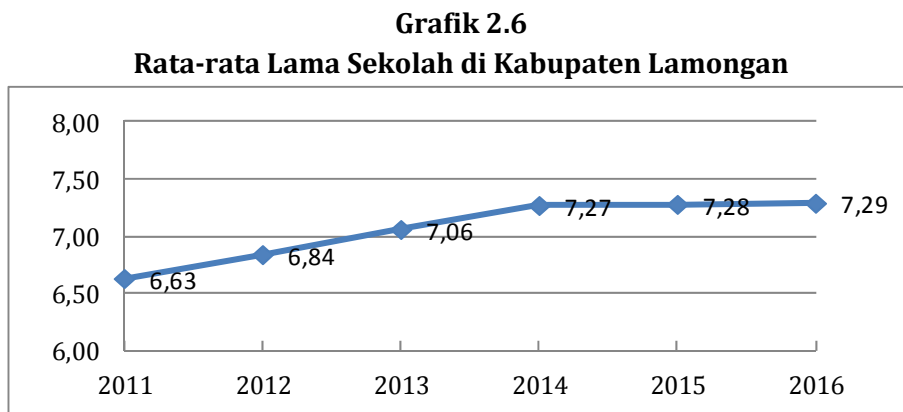
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017

Pertumbuhan AMH pada periode tahun 2011-2016 menunjukkan peningkatan linier dan mengalami lonjakan pada tahun 2014 dan relatif stabil sampai dengan tahun 2016. Perkembangan yang signifikan pada tahun 2014 merupakan suatu indikasi bahwa program dalam upaya peningkatan angka melek huruf yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, berjalan cukup efektif.

➤ **Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah atau *mean years of schooling (MYS)*. Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).

Angka rata-rata lama sekolah (MYS) di Kabupaten Lamongan dalam lima tahun terakhir ada peningkatan. Pada tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah adalah sebesar 6.63 tahun, sedangkan pada tahun 2012 meningkat sebesar 6.84 tahun. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 7.06 hingga tahun 2016 mencapai angka 7.29.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun demikian peningkatan ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, baik sarana prasarana maupun mutu pendidikan di Kabupaten Lamongan.

➤ **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga sangat mendukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011-2016

Tahun	SD	SMP	SMA
2011	113,98	125,81	87,35
2012	114,26	130,05	87,37
2013	114,24	130,08	89,82
2014	113,99	129,67	94,1
2015	114,00	127,97	93,79
2016	113,46	128,47	90,94

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Angka Pendidikan yang Ditamatkan**

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan sampai dengan akhir tahun 2016, menunjukkan bahwa untuk penduduk yang belum pernah atau tidak pernah sekolah sampai dengan tidak atau belum tamat tingkat pendidikan SD/MI sebesar 21,45 persen atau sebesar 290.464 orang, tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 18,71 persen atau 253.298 orang, tingkat pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 17,20 persen atau 232.854 orang, tingkat pendidikan Diploma dan Perguruan Tinggi sebesar 3,53 persen atau sebanyak 47.784 orang.

Tabel 2.10
Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2016

No.	Variabel	Jumlah	%
1	Belum pernah sekolah	290.464	21,45
2	SD Sederajat	520.410	38,43
3	SMP Sederajat	253.298	18,71
4	SMA Sederajat	232.854	17,20
5	Diploma	9.309	0,69
6	S1	45.025	3,33
7	S2	2.720	0,20
8	S3	39	0,00
	Jumlah	1.354.119	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lamongan 2017

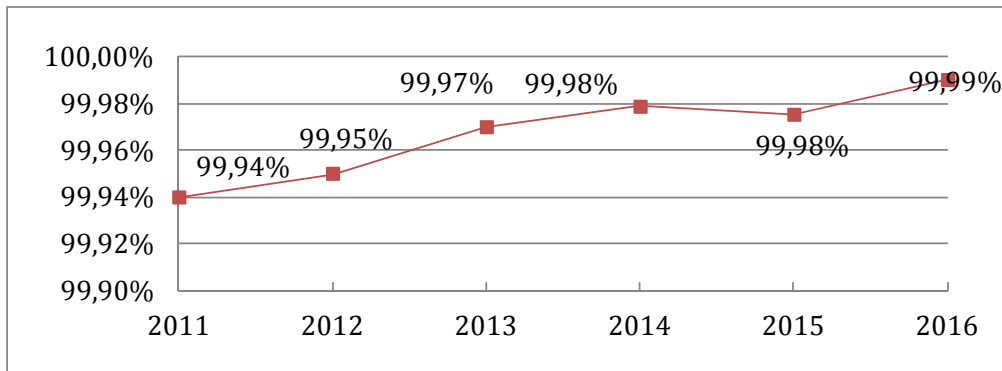
➤ **Angka Partisipasi Murni**

Indikator pendidikan lainnya yang sangat mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

APM Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, di tingkat SD (usia 7-12 tahun) pada 2011 sebesar 99,94 %, baru kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 99,95 % dan pada tahun 2013 mengalami

kenaikan menjadi 99,97%, tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 99,98 % dan kembali mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2016 menjadi 99,99%.

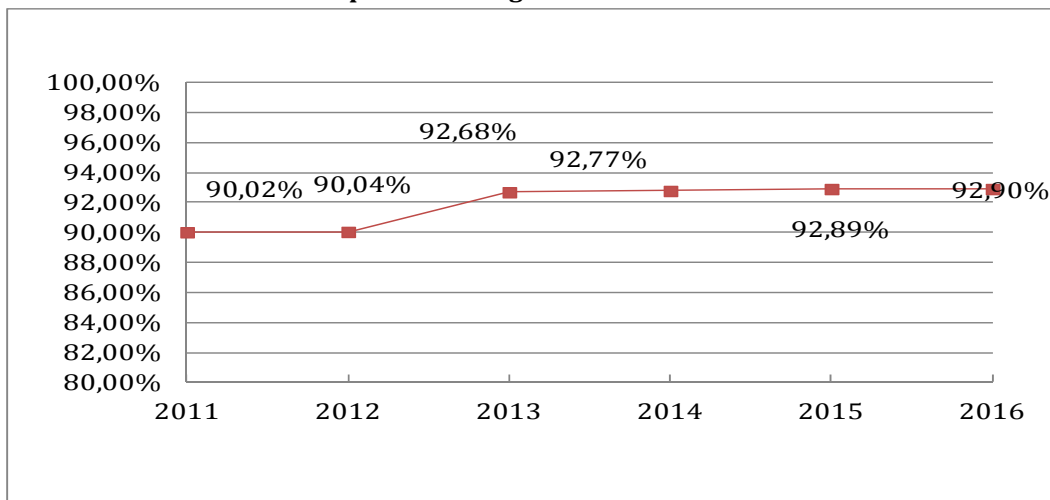
Grafik 2.7
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017

Sedangkan untuk tingkat SMP (usia 13-15 tahun) pada tahun 2011 sebesar 90,02% dan mengalami kenaikan tipis sebesar 90,04 % pada tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan drastis sebesar 92,68 %, dan terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 92,77 % hingga mencapai angka 92,89 % di tahun 2015. Terjadi peningkatan cukup drastis di tahun 2016 hingga mencapai 99,99%

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

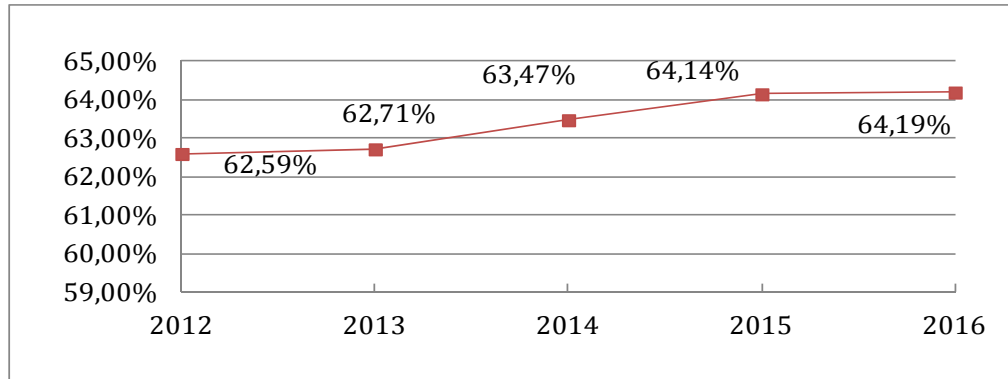


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017

Untuk tingkat SMA (usia 16-18 tahun) menunjukkan tren yang menggembirakan karena secara terus menerus mengalami peningkatan. Tahun 2012 sebesar 62,59 % sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 62,71 %, dan meningkat menjadi 63,47 % pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi 64,14 % serta di tahun 2016 mencapai 64,19 %. Peningkatan APM pada tingkat SMA ini mencerminkan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya arti pendidikan disamping juga peran aktif

pemerintah dalam menyediakan fasilitas sekolah yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan APM tahun 2012 sampai dengan 2016 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Grafik 2.9
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2017

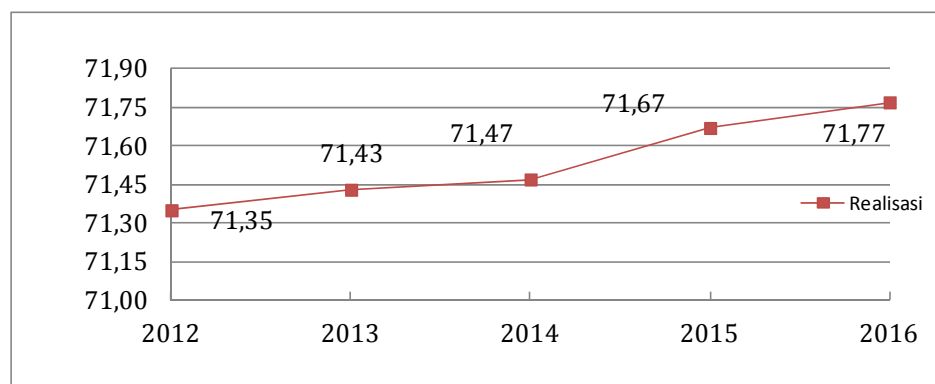
2.2.2.2 Urusan Kesehatan

➤ Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah rata-rata yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan *resultant* (hasil) seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lamongan selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 sebesar 71,35, meningkat sebesar 71,43 di tahun 2013, di tahun 2014 meningkat lagi menjadi 71,47 hingga tahun 2015 mencapai angka 71,67. Kembali mengalami kenaikan di tahun 2016 mencapai angka 71,77 seperti digambarkan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017

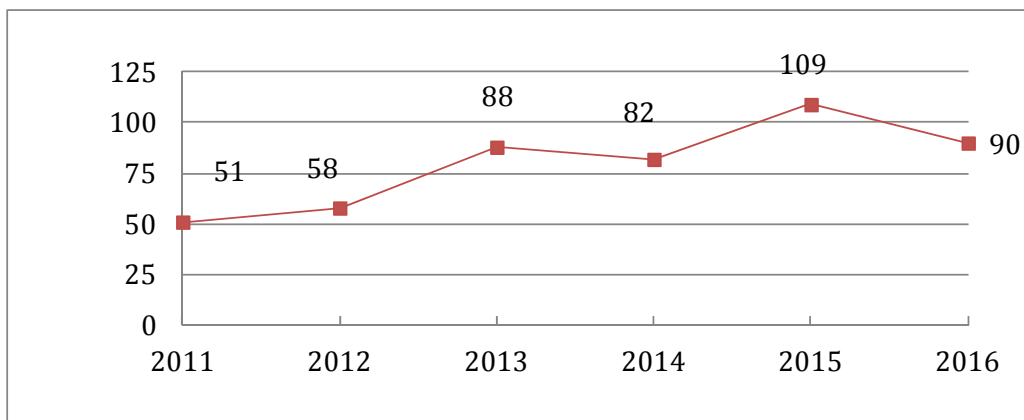
➤ **Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup**

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.

Perkembangan kasus Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lamongan menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sebesar 51 kasus mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 58 kasus dan 88 Kasus di Tahun 2013, akan tetapi di tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 82 kasus dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 109 kasus kemudian kembali menurun di tahun 2016 menjadi 90 kasus.

Upaya menekan kasus kematian bayi ditempuh melalui peningkatan pelayanan terhadap kesehatan bayi. Upaya tersebut dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan berat badan secara rutin, serta pemberian makanan tambahan di Posyandu. Keberhasilan dalam penurunan kasus kematian bayi akan dipertahankan agar kasus kematian bayi dapat terus ditekan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut grafik kasus kematian bayi Kabupaten Lamongan.

Grafik 2.11
Perkembangan Kasus Kematian Bayi Kab. Lamongan Tahun 2011-2016



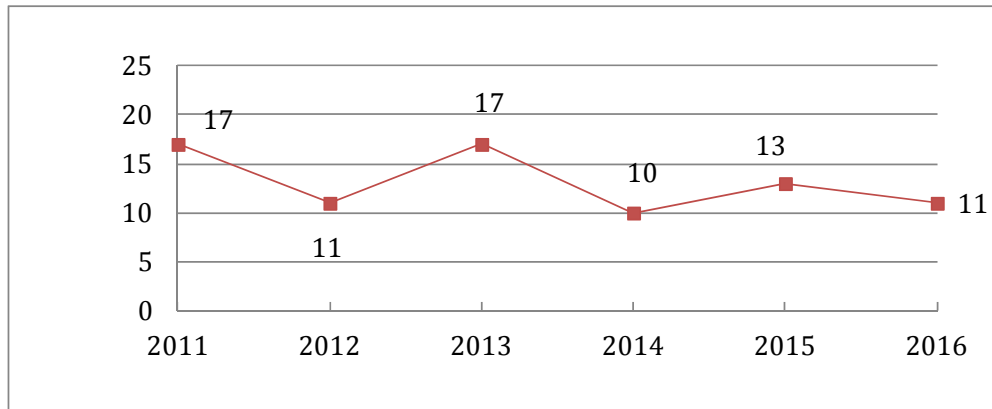
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2011 sebesar 17 Kasus, mengalami penurunan 11 kasus di tahun 2012, sedangkan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 17 kasus, pada tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan yaitu 10 kasus dan meningkat di tahun 2015 menjadi 13 kasus kemudian menurun sebanyak 11 kasus di tahun 2016. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lamongan masih berada di bawah Angka Kematian Ibu Propinsi Jawa Timur.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan AKI, diantaranya melalui peningkatan monitoring selama kehamilan (ANC) yang lebih optimal dan melakukan konsultasi sedini mungkin setiap kelainan yang ditemukan di luar kasus Obgyn kepada dokter spesialis terkait, serta minimal satu kali konsultasi ke dokter umum selama kehamilan. Lebih lengkapnya berikut data angka kematian ibu Kabupaten Lamongan.

Grafik 2.12
Perkembangan Angka Kematian Ibu Kab. Lamongan Tahun 2011-2015

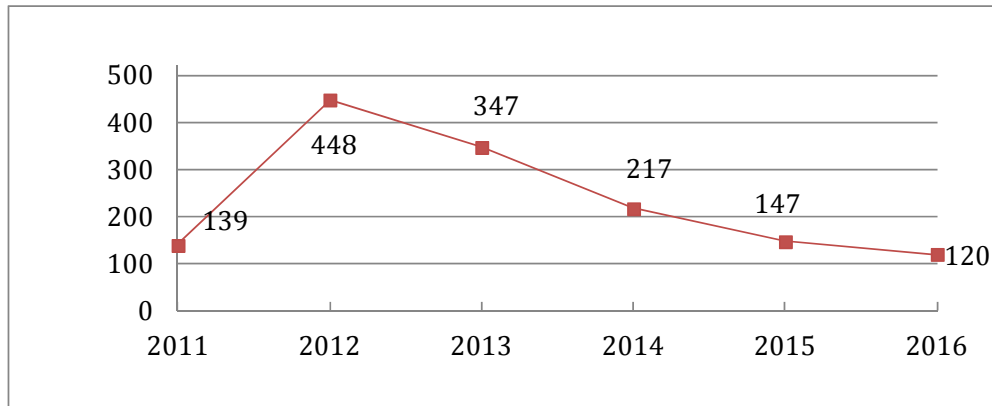


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Status Gizi Masyarakat**

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Perkembangan prosentase balita gizi buruk di Kabupaten Lamongan selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang turun. Perkembangan persentase balita gizi buruk tahun 2011-2016 sebagaimana tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.13
Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2017

Sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana berusaha mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dalam urusan kesehatan, pemerintah daerah berupaya mempermudah dan meningkatkan akses pelayanan dan pemeliharaan

kesehatan bagi masyarakat, tidak terkecuali warga miskin. Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi berupaya memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, begitu juga halnya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Urusan Kebudayaan

➤ Jumlah Grup Kesenian

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah diperlukan adanya upaya untuk menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni dan budaya yang berperan sebagai penyelenggara kesenian memberikan dukungan dalam pelestarian seni dan budaya.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian pada kurun 5 tahun tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2011 hingga tahun 2016 jumlah grup kesenian ada di Kabupaten Lamongan sebanyak 188 grup.

➤ Jumlah Gedung Kesenian

Gedung kesenian saat ini di Kabupaten Lamongan masih belum tersedia, sehingga perlu adanya pengadaan gedung kesenian untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah. Keberadaan gedung kesenian diharapkan dapat menjadi media segenap lapisan masyarakat dalam mengaktualisasi kebudayaan daerah dan sekaligus menjadi sarana dalam pengenalan maupun pelestarian seni dan budaya daerah.

Berdasarkan data peningkatan jumlah grup kesenian di Kabupaten Lamongan, seharusnya kedepan mampu mendukung peningkatan dan eksistensi grup kesenian dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung, salah satunya adalah penyediaan gedung kesenian. Dengan tersedianya gedung kesenian diharapkan pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal dapat berkembang dengan baik.

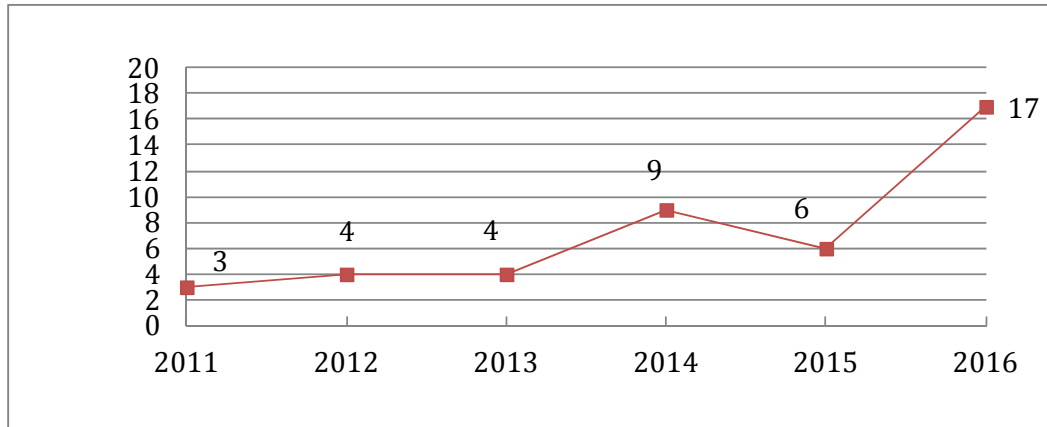
➤ Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu stadion, alun-alun, dan pendopo kabupaten. Dengan dukungan tempat penyelenggaraan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kegiatan seni dan budaya yang dilaksanakan. Untuk menopang pelestarian seni dan budaya perlu upaya menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat.

Berdasarkan sumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2017 ditunjukkan bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2015 diselenggarakan sebanyak 6 festival yaitu Festival karya tari; Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU); Pawai Budaya dalam rangka FKPU; Festival Patrol Sahur Atraktif; Festival Majapahit Travel Fair; dan Festival Tayub. Selanjutnya di tahun berikutnya 2016, semakin banyak festival yang diselenggarakan salah satunya Festival Kupatan berlokasi di

depan Wisata Bahari Lamongan memanfaatkan momen pelestarian tradisi seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri (Hari Raya Ketupat).

Grafik 2.14
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2011-2016

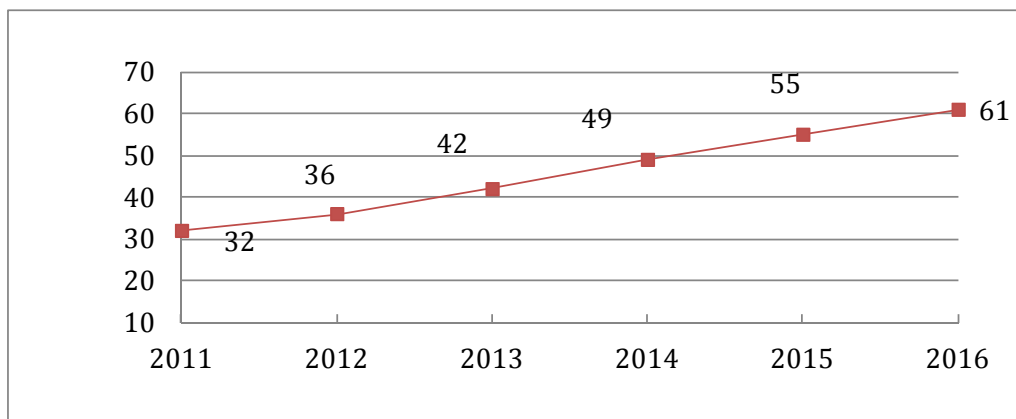


Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Benda Budaya Daerah di Kabupaten Lamongan**

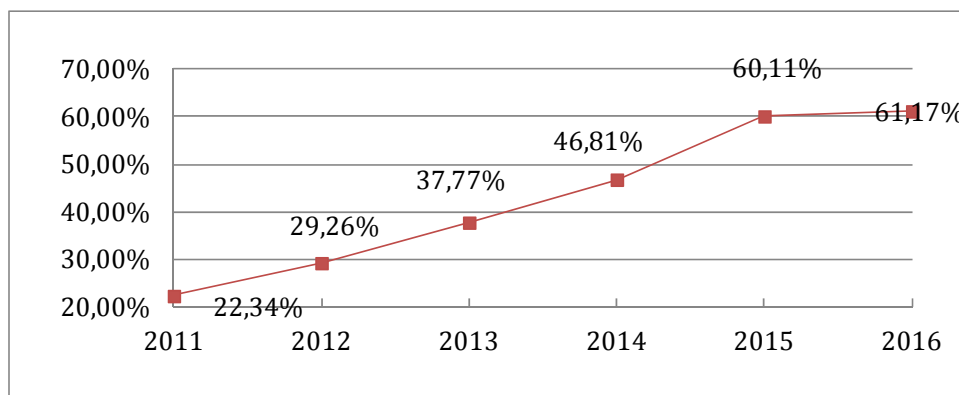
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak peninggalan arkeologi (purbakala). Oleh karenanya Lamongan telah mengesahkan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian Benda Cagar Budaya. Di Lamongan terdapat 55 cagar budaya yang dilindungi dari 95 cagar budaya yang ada. Budaya tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai upaya untuk menyatukan dan memperkuat budaya bangsa.

Grafik 2.15
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2017

Grafik 2.16
Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Menerima Pembinaan
Tahun 2011-2016



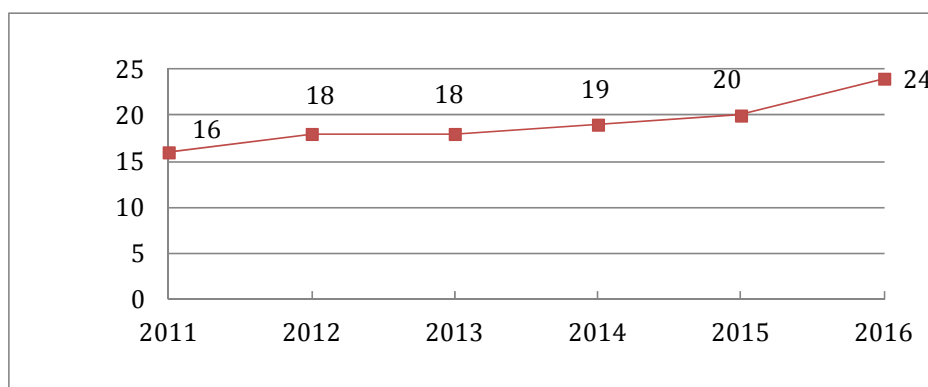
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2017

2.2.3.2 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

➤ ***Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang kecuali Olahraga di Tingkat Nasional***

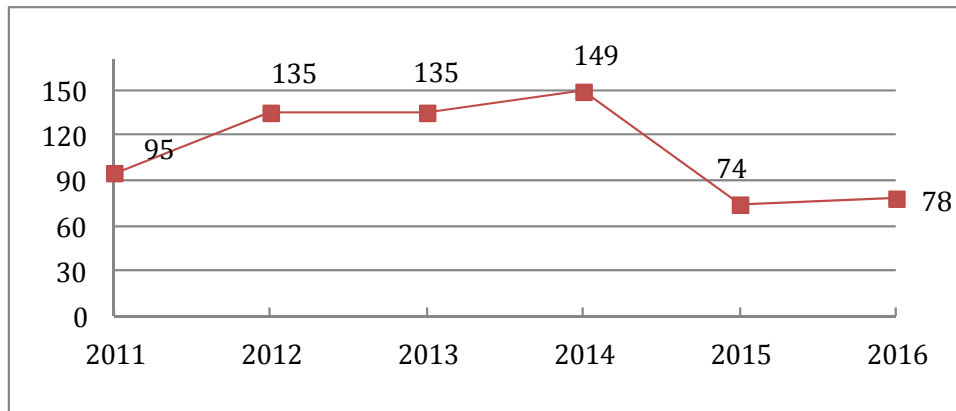
Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional dari Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2011-2016 mengalami peningkatan dari 16 pemuda pada tahun 2011 menjadi 24 pemuda pada tahun 2016. Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional selama periode 2011 sampai dengan tahun 2016 tersaji dalam grafik berikut.

Grafik 2.17
Jumlah Pemuda Berprestasi Pada Berbagai Bidang di Tingkat Nasional
Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017

Grafik 2.18
Jumlah Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Daftar atlet berprestasi**

Daftar atlet berprestasi ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan olahraga di Kabupaten Lamongan dengan menghitung jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi/nasional. Perkembangan prestasi cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Lamongan
Tahun 2011-2016

Prestasi	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Atletik	1	16	15	29	21	
Pencak silat	2	4	6	6	1	1
Gulat	20	7	-	20	27	8
Panahan	15	2	17	25	18	9
Tenis meja	1	4	-	2	1	1
Tarung drajat	-	-	17	7	4	11
Catur	4	3	4	6	7	2
Panjat tebing	55	-	51	16	97	15
Taekwondo	-	-	6	3	-	
Aeromodeling			3	10		
Karate			8	4		
Wushu			3	2		
Tenis lapangan			3	16		
Sepak takraw		1	-	2		10
Bulu tangkis		1		2		4
Tolak peluru		8				
Lontar martil		6				
Lompat tinggi		6				
Lempat lembing		5				
Lempat cakram		1				
Lompat jauh		-				
Balap sepeda no road race		2				
Bina raga			2	2		1
Basket		1				
Jalan cepat		3				
Drum band				4		
Bola Voli						14
Jumlah	98	70	135	156	176	76

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017

Perkembangan jumlah pemuda berprestasi pada bidang olahraga menunjukkan peningkatan yang fluktuatif dimana capaian prestasi bidang olahraga yang paling banyak di panjat tebing.

➤ **Lapangan Olah raga**

Sampai dengan tahun 2015, jumlah lapangan olah raga sebanyak 1.369 buah yang terdiri dari lapangan volley sebanyak 377 buah, lapangan sepak bola sebanyak 313 buah, lapangan basket sebanyak 26 buah, lapangan bulutangkis sebanyak 193 buah, kolam renang sebanyak 17 buah dan lapangan tenis meja sebanyak 298 buah.

Dengan ketersediaan jumlah lapangan olahraga yang ada tersebut, maka yang perlu untuk ditingkatkan adalah peningkatan kualitas lapangan olah raga sesuai standar nasional, serta pemanfaatan dan pemeliharannya. Dengan tersedianya lapangan olahraga yang memenuhi standar, maka diharapkan mampu mendukung peningkatan potensi dan prestasi olahraga di Kabupaten Lamongan. Lebih lengkapnya berikut data jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Lapangan Olahraga Kab. Lamongan
Tahun 2014,2015 dan 2016

No	Nama	Tahun		
		2014	2015	2016
1	STADION	1	1	1
2	LAP. SEPAKBOLA	313	313	320
3	HALL SERBAGUNA	9	8	8
4	HALL CABOR	-	1	-
5	KOLAM RENANG	11	17	21
6	PADEPOKAN	7	11	15
7	TENIS MEJA	251	298	306
8	LAP BASKET	44	26	31
9	LAP VOLLY	407	377	421
10	SANGGAR SENAM	23	34	32
11	TENIS LAPANGAN	15	34	10
12	LAP BULU TANGKIS	142	193	188
13	PANJAT TEBING	4	7	7
14	LAP SEPAK TAKRAW	46	15	11
15	LAP FUTSAL	21	34	40

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2017

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

➤ *Angka Partisipasi Sekolah (APS)*

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan APS di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>1</i>	<i>SD/MI</i>						
1.1.	Jumlah siswa usia 7-12 thn bersekolah di SD/MI	106.114	101.643	99.265	97.878	96.298	94.353
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	106.224	101.754	99.361	97.981	96.704	94.359
1.3.	APS SD/MI	99,9	99,9	99,9	98,5	99,6	99,99
<i>2</i>	<i>SMP/MTs</i>						
2.1.	Jumlah siswa usia 13-15 thn bersekolah di SMP/MTS	42.688	41.381	43.780	43.985	44.476	42.989
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	47.445	45.978	47.265	47.449	47.917	46.272
2.3.	APS SMP/MTs	89,9	90	92,6	92,7	92,8	93
<i>3</i>	<i>SMA/MA/SMK</i>						
3.1	Jumlah siswa usia 16-18 thn bersekolah di SMA/SMK/MA	35.538	36.960	44.241	34.969	36.676	37.230
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	58.824	59.074	57.366	55.103	57.216	58.003
3.3	APS SMA/MA/SMK	60,4	62,6	77,1	63,5	64,1	64

Sumber: Dinas Pendidikan, Kabupaten Lamongan Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan Angka Partisipasi Sekolah pendidikan dasar untuk SD/MI cenderung konstan berada dikisaran 99%. Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan Sekolah Menengah pertama (SMP/MTs) mengalami kenaikan dari 89,9% tahun 2011 menjadi 92,8% tahun 2015. Sedangkan Perkembangan angka partisipasi sekolah pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) tahun 2011 sebesar 60,4% menjadi 64,10% tahun 2015. APS tertinggi untuk SMA/MA/SMK sebanyak 77,10% tahun 2013. Jumlah APS yang tertinggi berada di kelompok 7-12 tahun (SD/MI) sebanyak 99,9%. Sedangkan APS yang rendah berada di usia 16-18 tahun (SMA/MA/SMK)

sebanyak 60,4%. Di tahun 2016, jumlah siswa baik tingkat SD/SMP maupun SMA cenderung menurun.

➤ **Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA/SMK per jumlah penduduk usia pendidikan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA/SMK. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Rasio yang paling tinggi berada di jenjang pendidikan SD/MI. Untuk mengetahui rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah gedung	1.167	1.165	1.165	1.165	1.162	1.164
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	106.224	101.754	99.361	97.981	96.427	94.359
1.3.	Rasio	1 : 91	1 : 87	1 : 85	1 : 84	1 : 83	1 : 81
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah gedung	314	317	324	328	333	338
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	47.445	45.978	47.265	47.449	47.917	42.989
2.3.	Rasio	1 : 151	1 : 145	1 : 146	1 : 144	1 : 144	1 : 127
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jumlah gedung	197	202	202	214	218	221
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	58.824	59.074	57.366	55.103	57.216	58.003
3.3	Rasio	1 : 299	1 : 292	1 : 284	1 : 257	1 : 262	1 : 262

Sumber: Dinas Pendidikan, Kabupaten Lamongan Tahun 2017

➤ **Rasio Guru/Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK per jumlah murid pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, disamping juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Rasio Guru dan Murid Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah guru	14.087	13.651	13.655	13.498	13.297	12.835
1.2.	Jumlah murid	120.989	116.122	113.397	111.538	110.180	107.062
1.3.	Rasio	1 : 8,5	1 : 8,5	1 : 8,3	1 : 8,2	1 : 8,2	1 : 8,3
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah guru	5.925	7.661	7.791	7.764	7.858	7.765
2.2.	Jumlah murid	59.664	59.766	61.436	61.462	61.253	59.445
2.3.	Rasio	1 : 10,1	1 : 7,8	1 : 7,8	1 : 7,9	1 : 7,8	1 : 7,6
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jumlah guru	8.008	6.332	6.279	6.617	6.681	5.318
3.2	Jumlah murid	61.076	51.588	51.502	51.828	53.631	52.862
3.3	Rasio	1 : 7,6	1 : 8,1	1 : 8,2	1 : 7,8	1 : 8,0	1 : 9,9

Sumber: Dinas Pendidikan, Kabupaten Lamongan Tahun 2017

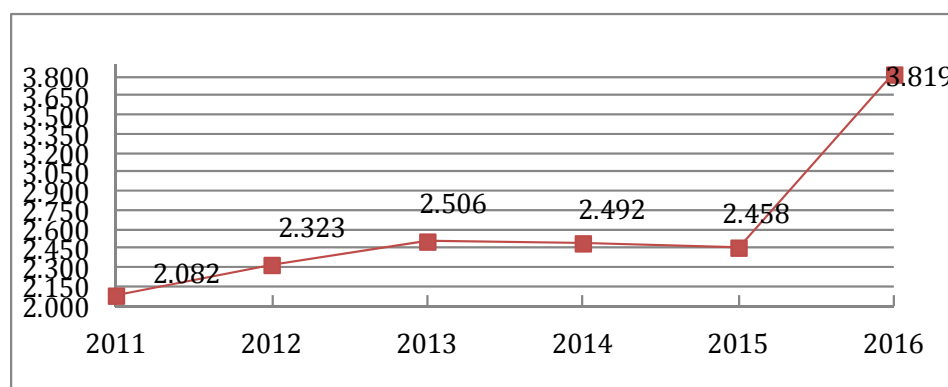
Dari tabel diatas dapat dilihat kecenderungan rasio jumlah guru dan murid menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, baik itu SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK. Rata-rata rasio jumlah guru dan murid berkisar 8. Jadi 8 murid dipegang oleh 1 guru.

➤ **Fasilitas Pendidikan**

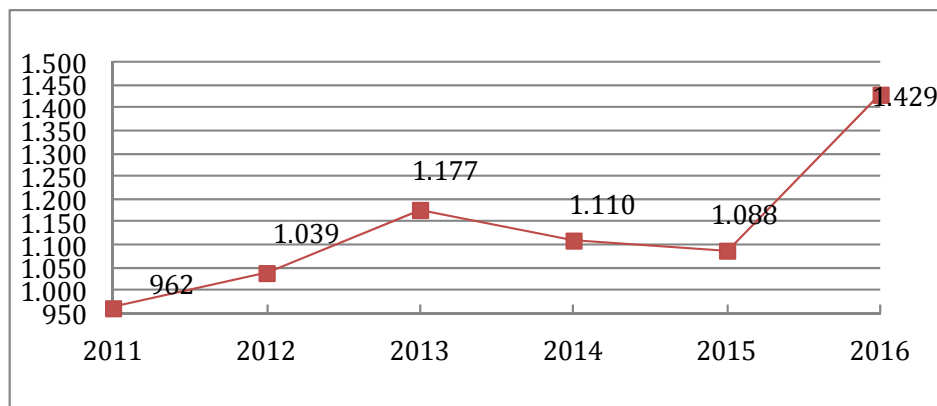
Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama seluruh *stakeholder* yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. Perkembangan jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik selama satu tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut.

Grafik 2.19
Perkembangan Bangunan Sekolah Kondisi Baik Tahun 2011-2016

➤ **Ruang Kelas SD Kondisi Baik**



➤ **Ruang Kelas SMP Kondisi Baik**



Sumber: Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan 2017

Dari grafik tersebut terlihat bahwa bangunan sekolah kondisi baik menunjukkan fluktuasi baik SD/MI maupun SMP/MTS. Dari total jumlah ruang kelas yang ada, jumlah ruang kelas dalam kondisi yang baik di SD sebanyak 3.819 sedangkan gedung, SMP/MTS sebanyak 1.429 gedung.

2.3.1.2 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Salah satu aspek yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan adalah dengan menjaga kondisi sanitasi masyarakat. Kondisi sanitasi Kabupaten Lamongan baik air limbah, persampahan, drainase secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Air Limbah Domestik

Kondisi cakupan air limbah domestik di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi dua yaitu pada wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada wilayah pedesaan BABS 10,45%, pengelolaan air limbah setempat (onsite) 88,86%, sistem komunal 0,69% dan sistem pengolahan air limbah terpusat (off site) 0%. Sedangkan pada wilayah perkotaan BABS 6,91%, pengelolaan air limbah setempat (on site) 91,26%, sistem komunal 1,82%.

b. Persampahan

Kondisi cakupan layanan persampahan di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi dua yaitu pada wilayah pedesaan dan perkotaan. Pada wilayah pedesaan sampah yang terangkut 0%, dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum teralayani 100%, dan 3R 0%. Sedangkan pada wilayah perkotaan sampah yang terangkut 43%, dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum teralayani 55%, dan 3R 2%.

c. Drainase Perkotaan

Terkait dengan penanganan sanitasi lingkungan, khususnya drainase lingkungan untuk wilayah perkotaan kabupaten Lamongan, bahwa untuk tahapan pengembangan drainase sebesar 379.000 meter yang tersebar di 27 IKK dengan luas genangan 533,64 ha.

d. Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat di Kabupaten Lamongan memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola masyarakat. Sistem air minum non perpipaan menggunakan sumur gali, penangkap air hujan serta dari mobil tangki. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih terutama dilakukan oleh masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air minum, dimana alternatif sumber air lainnya baik sistem perpipaan maupun sistem lain tidak memungkinkan. Di Kabupaten Lamongan penduduk dengan akses air bersih perpipaan sebesar 34,81 % penduduk. Prosentase penggunaan sumber air bersih tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.16
Prosentase Penduduk Dengan Akses Air Bersih
di Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No.	Sumber Air	Jumlah SR	Prosentase
1	Perpipaan		34,81
	PDAM	17.250 SR	
	PJT	3.587 SR	
	Lainnya	95.659 SR	
2	Non Perpipaan		44,19
	Total		79

Sumber : Bappeda (Data diolah) Kabupaten Lamongan 2017

Di Kabupaten Lamongan secara garis besar, terdapat 2 jenis kebutuhan air, yaitu untuk memenuhi kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (memenuhi kebutuhan non rumah tangga), kebutuhan air bersih untuk kebutuhan domestik (rumah tangga) merupakan kebutuhan penduduk untuk masak, mandi, cuci dan kakus. Besarnya pemakaian untuk keperluan ini bervariasi untuk setiap wilayah.

Kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan non rumah tangga, yaitu untuk kegiatan ekonomi dan perkotaan misalnya untuk industri, perkantoran, pertokoan, hotel, penginapan, rumah makan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, rumah ibadah, dan lain-lain. Disamping itu untuk pembangunan dan penyediaan air bersih diarahkan pada daerah-daerah yang masuk kategori rawan air bersih, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan air bersih yang cukup sesuai baku mutu air dan memenuhi syarat kesehatan, karena dengan semakin banyak masyarakat yang memperoleh air bersih maka akan semakin baik kondisi kesehatannya, memperhatikan hal tersebut ukuran air bersih dikatakan sehat apabila memenuhi kelayakan secara fisik, kimia dan bakteriologis.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;
3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;
5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan
6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;
7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri;
8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.

2.3.1.3 Urusan Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Lamongan sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur bahwasannya berdasarkan rencana struktur ruang, khususnya dalam rencana sistem perkotaan, adalah sebagai Pengembangan Kegiatan Lokal, atau masuk dalam bagian Wilayah Pengembangan dari Gerbangkertasusila Plus yang diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Disamping hal itu Kabupaten Lamongan juga dilewati jalur jalan tol trans jawa yang memungkinkan Kabupaten Lamongan akan menjadi daerah tujuan investasi di Jawa Timur.

Memperhatikan hal tersebut Kabupaten Lamongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu mempersiapkan prasarana, sarana serta utilitas yang salah satunya adalah perumahan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh pengembang. Jika ditinjau dari data yang ada saat ini, jumlah rumah sebanyak 353.840.

Dalam rencana penataan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Lamongan, disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka yang dipandang perlu untuk menjadi perhatian adalah berkenaan dengan keberadaan kawasan permukiman yang tertata maupun yang tidak tertata. Makna dari kawasan permukiman yang tertata disini adalah kawasan permukiman yang tertib, baik konfigurasi tapaknya, yaitu kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan dan lahan yang tidak melanggar aturan dan kaidah tata ruang dan ketentuan zonasi serta memiliki legalitas. Dari data tahun 2016 yang ada saat ini kawasan permukiman di Kabupaten Lamongan seluas 13.151,46 Ha.

2.3.1.4 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu aspek penting suksesnya pembangunan tidak terlepas dari ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya membina ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui langkah-langkah antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban diantaranya Peningkatan Kerja Sama Dengan Aparat Keamanan Dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Operasi Pengamanan Wilayah Terpadu, Operasi Penertiban dan Penegakan Perda, Operasi Wilayah dan Operasi Yustisi.

Pada tahun 2016, terjadi peningkatan penanganan pelanggaran perda utamanya Perda Pajak Daerah dimana jumlah pelanggaran Perda selama tahun 2016 sebanyak 797 pelanggaran dan semuanya telah tertangani 100 persen.

2.3.1.5 Urusan Penanaman Modal

Perkembangan investasi di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 nilai investasi PMDN sebesar Rp. 1.374.956.717.143 dan untuk total nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp.22.242.684.773.608. Realisasi investasi ini didukung oleh investor sebanyak 1.543 investor.

Untuk lebih meningkatkan investasi di daerah, maka perlu dilakukan peningkatan upaya promosi potensi daerah secara efektif serta memberikan kepastian perizinan kepada investor, baik dalam maupun luar negeri, yang akan menginvestasikan dananya di Kabupaten Lamongan. Peningkatan investasi dan usaha di Kabupaten

Lamongan akan menambah perluasan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Lamongan.

Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah PMDN, Domestik, dan PMA Tahun 2011-2016

Tahun	PMDN		PMA		Total	
	Jumlah	RP(M)	Jumlah	Rp (M)	Jumlah	Rp (M)
2011	1.036	1.185,28	2	2.680,00	1.038	3.865,28
2012	892	966,229	3	2.649,54	895	3.615,77
2013	910	913,4	2	60	912	973,40
2014	1235	1.441,60	4	2.502,50	1.239	3.944,10
2015	1381	1.374,96	4	1.938,89	1.385	3.313,84
2016	7012	6.859,67	15	15.383,02	7.027	22.242,69

Sumber: Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Lamongan 2017

2.3.1.6 Urusan Koperasi dan Usaha Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan guna mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya koperasi merupakan organisasi yang mengisyaratkan kemandirian yaitu koperasi akan berkembang dalam suasana kemandirian. Artinya, berkembang atau tidaknya koperasi sangat tergantung seberapa kuat fundamen internal mendukung ketercapaian tujuan berkoperasi. Adanya kesamaan kepentingan ekonomi dari para anggota-anggotanya, adanya pengurus yang memiliki motivasi kuat dan sanggup amanah serta tersedianya manajemen yang profesional merupakan kunci keberhasilan pembangunan koperasi.

Di dalam koperasi-koperasi tersebut terdapat juga koperasi wanita. Koperasi wanita diharapkan bukan saja memotong jalur kemiskinan di lingkungan wanita saja, namun juga untuk menanamkan jiwa wirausaha dan nilai-nilai berkoperasi di lingkungan generasi yang akan datang melalui media keluarga. Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat, yaitu sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Pembinaan koperasi dengan berpedoman pada Tiga Sehat tersebut diharapkan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Lamongan meningkatkan dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan Koperasi tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18
Persentase Koperasi Aktif 2011-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Koperasi Aktif	788	839	870	882	1.000	950
Jumlah Koperasi	1.006	1.047	988	956	1.064	1188
Persentase koperasi aktif (%)	78,33	80,13	88,06	92,26	93,98	79,97

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Lamongan 2017

Selanjutnya data prosentase Koperasi berkualitas berdasarkan database di Dinas Koperasi dan UM di tahun 2016 sebesar 52.63% dimana pada tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan perhitungan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tahan banting pada waktu krisis ekonomi. UMKM banyak dilakukan oleh masyarakat dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. UMKM di Kabupaten Lamongan terus berkembang hal ini tidak lepas dari ide-ide kreatif pelaku usaha serta adanya fasilitasi dari pemerintah daerah dan perbankan. Adapun Perkembangan UMKM di Kabupaten Lamongan tahun 2011-2016 yang tercatat di Dinas Koperasi dan UM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2011 - 2016

Komponen	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Mikro	31.536	83,12	34.914	72,30	29.568	59,00	35.798	69,11	29.939	55,20	244.309	96,67
Kecil	5.339	14,07	12.027	24,91	19.176	38,27	14.536	28,06	19.950	36,78	8.077	3,20
Menengah	1.066	2,81	1.348	2,79	1.368	2,73	1.468	2,83	4.350	8,02	348	0,14
Jumlah	37.941	100	48.289	100	50.112	100	51.802	100	54.239	100	252.734	100,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Lamongan 2017

2.3.1.7 Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

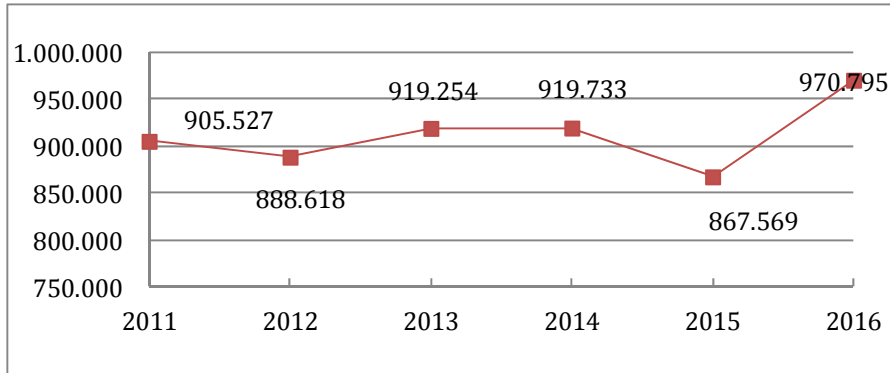
➤ *Cakupan Penerbitan e-KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir*

Pelayanan kependudukan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2011-2016 meliputi pelayanan KTP, KK, dan Akta kelahiran. Trend untuk pelayanan pembuatan KTP mulai tahun 2011-2015 mengalami penurunan. Untuk pelayanan pembuatan KK trendnya relatif stabil sampai dengan tahun 2016. Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan penerbitan KTP sebanyak 970.795 e-KTP dan pelayanan pembuatan KK sebanyak 108.244.

Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat Lainnya. Untuk pelayanan pembuatan Akta Kelahiran sampai dengan tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 10.285

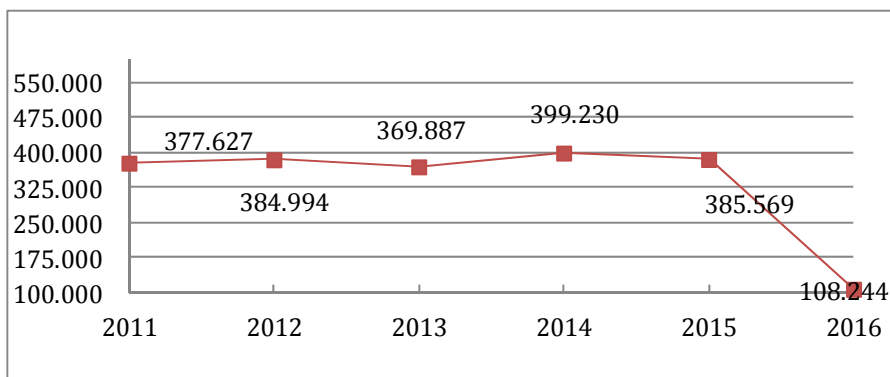
Grafik 2.20
Perkembangan Pembuatan KTP, KK & penerbitan Akta Kelahiran
Tahun 2011-2016

➤ **Pelayanan Pembuatan KTP**



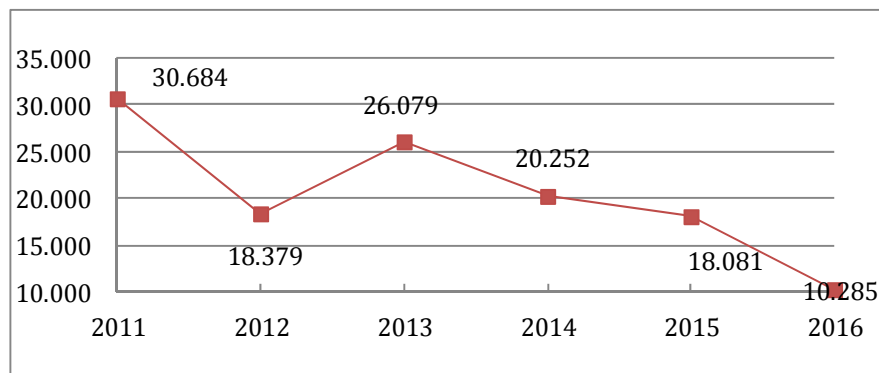
Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Pelayanan Pembuatan KK**



Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Penerbitan Akta Kelahiran**



Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan 2017

2.3.1.8 Urusan Ketenagakerjaan

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja

sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Pada tabel di bawah ini diketahui bahwa pertumbuhan angkatan kerja mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dari 603.182 jiwa tahun 2011 menjadi 633.048 jiwa tahun 2015. Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Lamongan pada 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada tabel berikut.

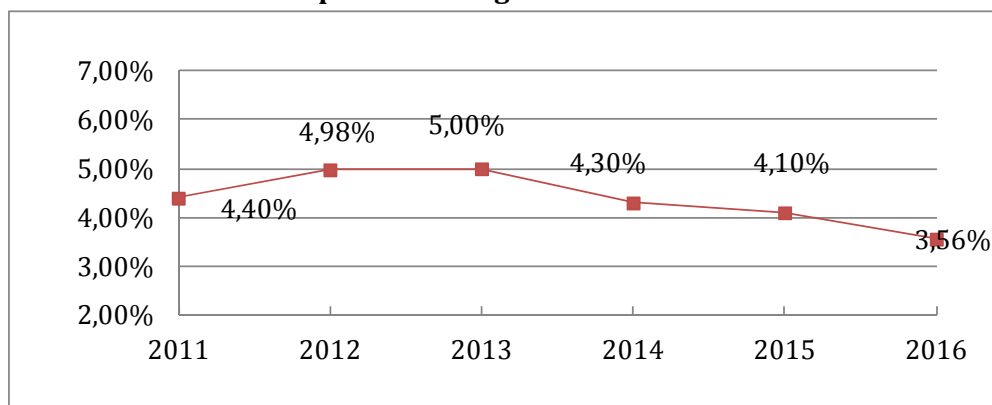
Tabel 2.20
Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

Tahun	Angkatan kerja	Pertumbuhan
2011	603.182	-
2012	618.831	2,60
2013	634.002	2,45
2014	611.621	3,53
2015	633.048	3,50
2016	621.200	1,87

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 2017

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode tahun 2011-2016 mengalami penurunan dari 4,40% tahun 2011 menjadi 3,56%. Perkembangan TPT secara detail tersaji dalam grafik berikut.

Grafik 2.21
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 2017

2.3.1.9 Ketahanan Pangan

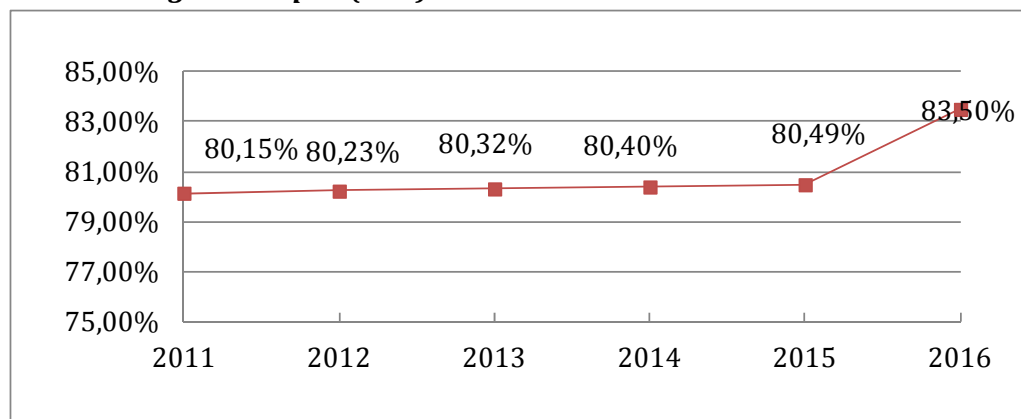
➤ *Kecukupan Protein Per Kapita*

Protein adalah suatu senyawa organik yang digunakan oleh tubuh sebagai zat pembangun atau pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh seperti pengatur serta mempertahankan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, kecukupan protein cukup berpengaruh terhadap tingkat kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, protein juga sebagai cadangan energi jika karbohidrat dan lemak sudah habis. Karena adanya fungsi inilah maka penentuan kecukupan protein dilakukan pada saat kecukupan energi terpenuhi.

Perkembangan Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein (AKP) terlihat bahwa ketersediaan pangan sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Sedangkan penguatan cadangan dan pola pangan grafiknya hampir berhimpitan. Grafik perkembangan ketersediaan dan angka kecukupan protein (AKP) sebagai berikut.

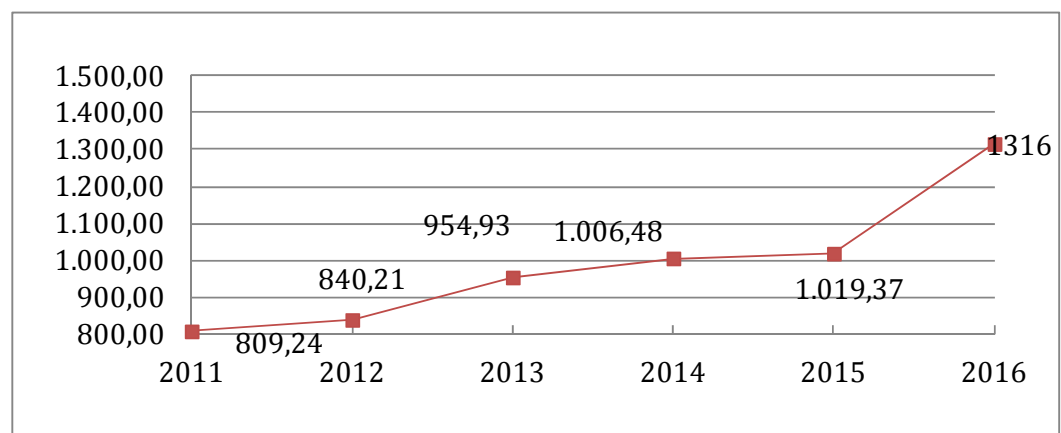
Grafik 2.22
Perkembangan Ketersediaan Pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH)
Tahun 2011-2016

➤ *Pola Pangan Harapan (PPH)*



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 2017

➤ *Ketersediaan Pangan Utama*



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 2017

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Dalam Undang-Undang Pangan ini ditekankan pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

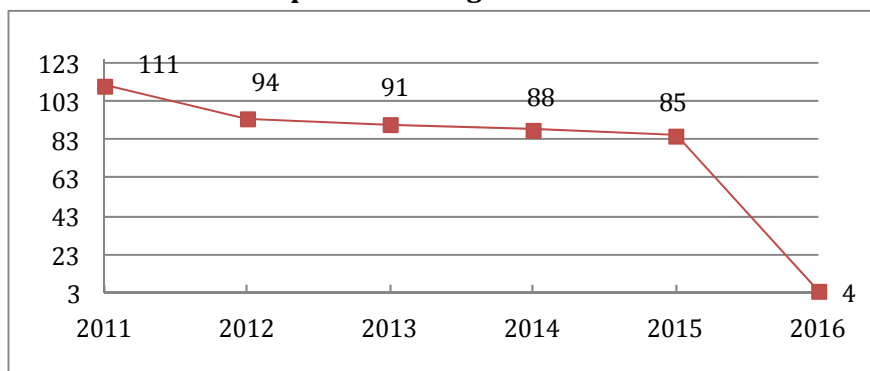
Diversifikasi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan. Diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada beras, tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam percaturan globalisasi.

➤ **Menurunnya Jumlah Daerah Rawan Pangan**

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya, rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Di Kabupaten Lamongan terdapat daerah rawan pangan tetapi jumlah desanya mengalami penurunan. Pada tahun 2012 desa rawan pangan sebanyak 111 desa menjadi 82 desa pada tahun 2015 kemudian merosot tajam menjadi tinggal 5 desa di tahun 2016.

Diversifikasi pangan saat ini adalah kunci keberhasilan dalam mempertahankan ketahanan pangan. Program Diversifikasi Pangan ini merupakan langkah jitu untuk meredam gejolak pangan dunia dan nasional ditengah ancaman perubahan iklim. Selain itu, diversifikasi pangan menjadi cara mengembangkan kearifan lokal melalui pengoptimalan sumber daya yang ada. Implementasi diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal memerlukan strategi dan komitmen yang kuat dari pemerintah, petani, pengusaha, dan masyarakat. Keberhasilan program ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang dikuat dari berbagai pemangku kepentingan. Dimana pemerintah memegang peranan penting dalam membuat kebijakan yang pro pertanian lokal.

Grafik 2.23
Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan
Kabupaten Lamongan 2012-2016

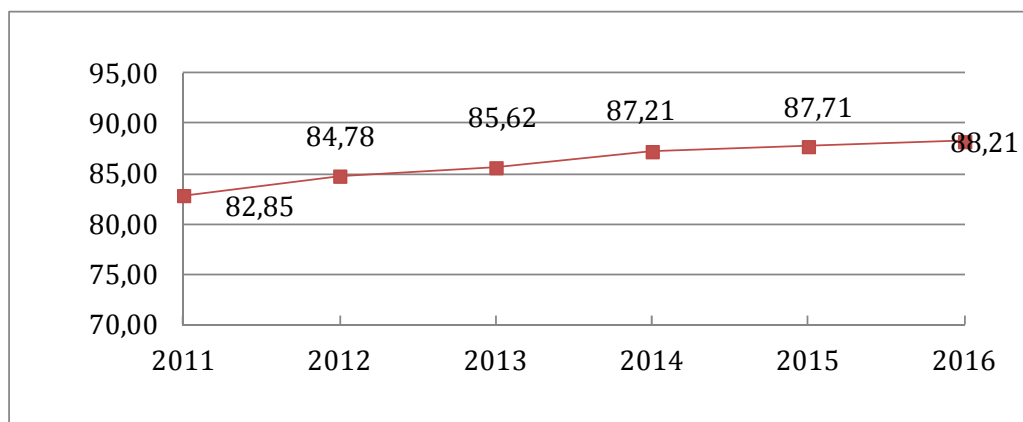


Sumber Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamongan Tahun 2017

2.3.1.10 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu gambaran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, mencakup komposit dari empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Lamongan menunjukkan peningkatan pada tahun 2011 sebesar 82,85, mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 84,78 dan sebesar 85,62 di tahun 2013 serta pada tahun 2014 sebesar 87,21 meningkat di tahun 2015 sebesar 87,71. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 88,21

Grafik 2.24
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

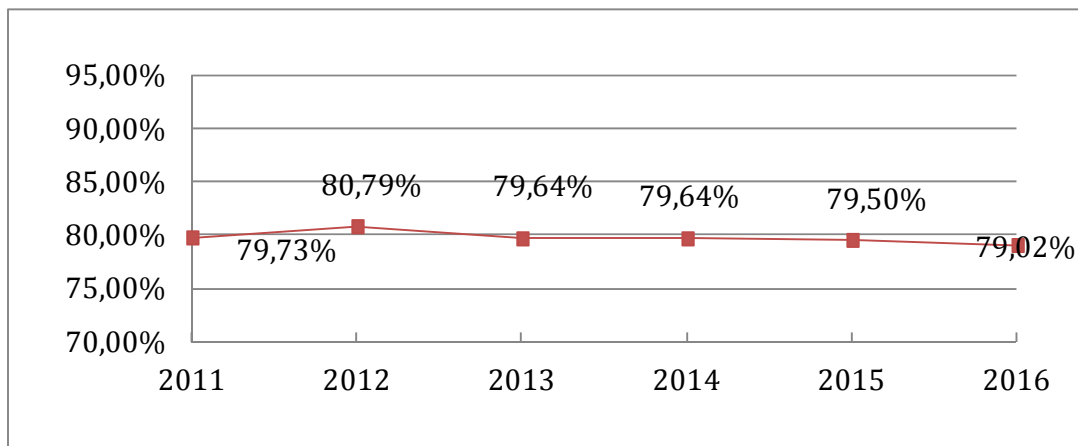


Sumber BPS Kabupaten Lamongan

2.3.1.11 Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana di Kabupaten Lamongan dari tahun 2011-2015 dipengaruhi antara lain Maksimalnya peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi. Maksimalnya Advokasi-advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Prevelensi Peserta KB Aktif pada tahun 2011 sebesar 79,73 dan pada tahun 2015 sebesar 79,50.

Grafik 2.25
Prevelensi Peserta KB Aktif di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas PPKB Kabupaten Lamongan Tahun 2017

2.3.1.12 Urusan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

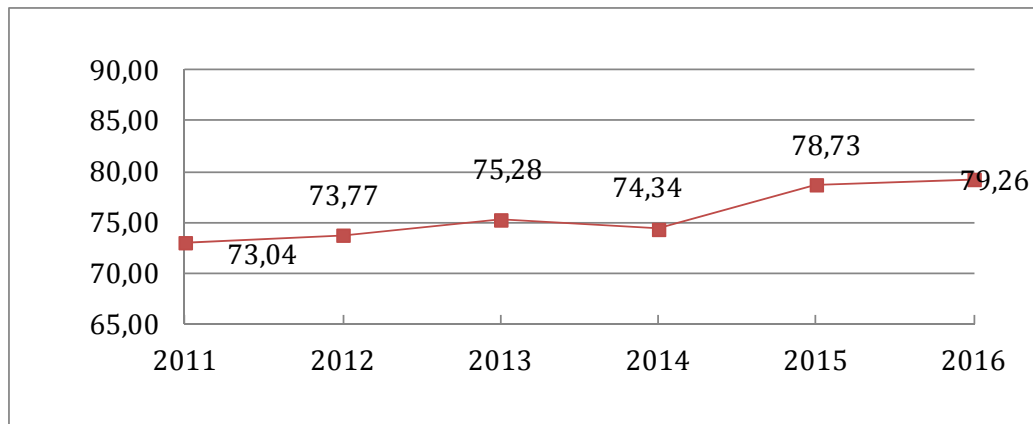
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Lamongan kepada masyarakat dinilai menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM diukur pada SKPD penyelenggara pelayanan masyarakat dan urusan pemerintahan yang penilaiannya berdasarkan 14 unsur pelayanan. Semakin tinggi IKM menunjukkan semakin baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Pada grafik di bawah ini ditunjukkan bahwa perkembangan IKM mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 IKM sebesar 73,04 mengalami peningkatan sebesar 79,26 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pencapaian sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan pemerintah daerah. Perkembangan IKM Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2011-2016 sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.26
Perkembangan IKM Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: Bagian organisasi Setda Lamongan Tahun 2017

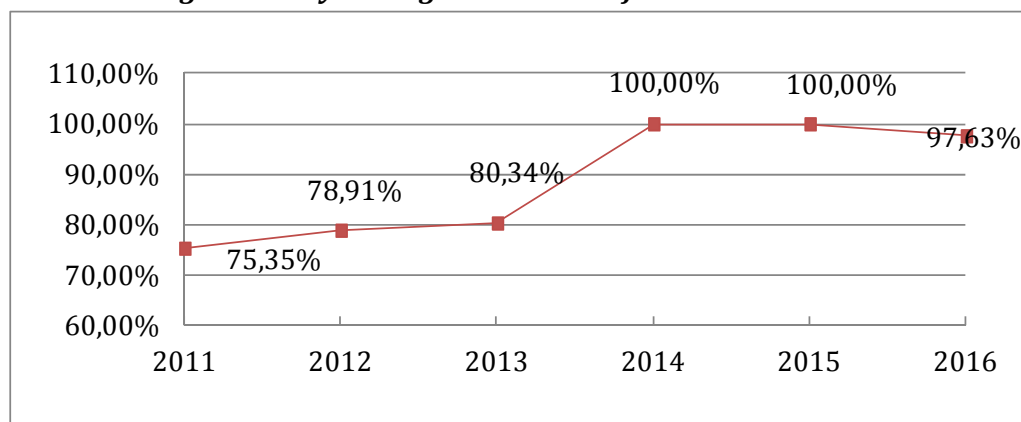
2.3.1.13 Urusan Sosial

Urusan sosial menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Lamongan antara kemiskinan, gelandangan, anak terlantar, tuna susila serta bencana alam. Untuk menanggulangi dampak sosial PMKS, pemerintah Kabupaten Lamongan memfasilitasi antara lain panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi.

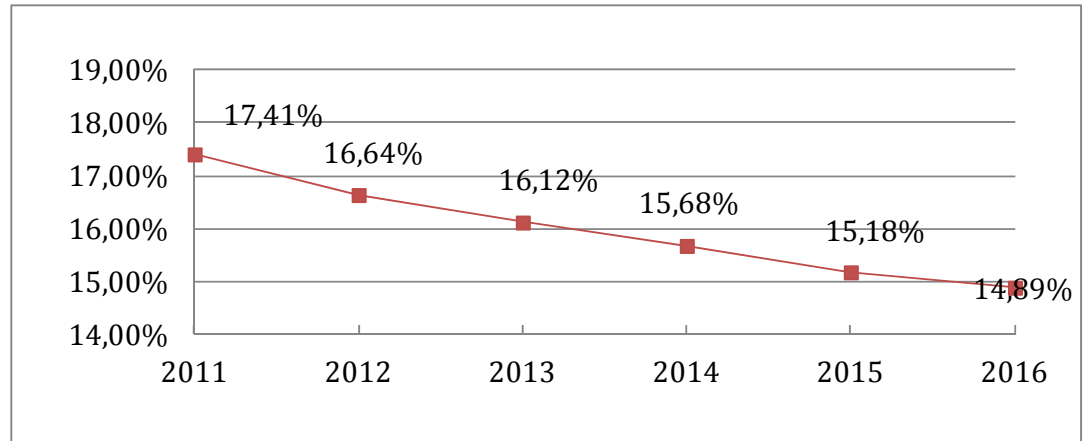
Pada tahun 2011 sarana sosial yang ada sebanyak 30 sarana dan mengalami peningkatan di tahun 2015 sebanyak 37 buah. Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial mengalami peningkatan dari 74,76% tahun 2011 menjadi 92,62% tahun 2015 begitu juga persentase penanganan penyandang PMKS mengalami peningkatan. Sedangkan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 17,41 % pada tahun 2011 menjadi 15,18 % di tahun 2015 dan menurun menjadi 14,89% pada tahun 2016.

Grafik 2.27
Perkembangan urusan sosial Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015

➤ % Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



➤ **% Tingkat Kemiskinan**

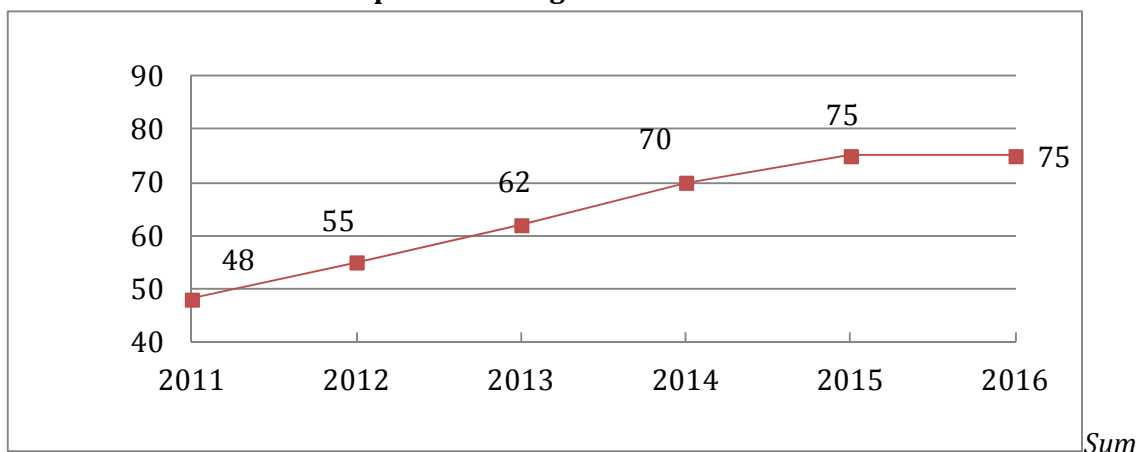


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lamongan 2017

2.3.1.14 Urusan Kearsipan

Untuk lebih meningkatkan informasi pembangunan yang berkualitas maka salah satu perangkat yang dibutuhkan adalah sistem kearsipan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip berupa boks arsip, mesin penghancur kertas, rak arsip, yang dibutuhkan oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Lamongan serta melakukan pembinaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi) kepada arsiparis (pengelola arsip) terutama di desa. Pada grafik di bawah ini ditunjukkan bahwa jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip baku mengalami peningkatan dari 48 SKPD tahun 2011 menjadi 75 SKPD tahun 2015 dan 2016.

Grafik 2.28
Perkembangan Jumlah SKPD menerapkan Pengelolaan Arsip Baku Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan 2017

2.3.1.15 Urusan Perpustakaan

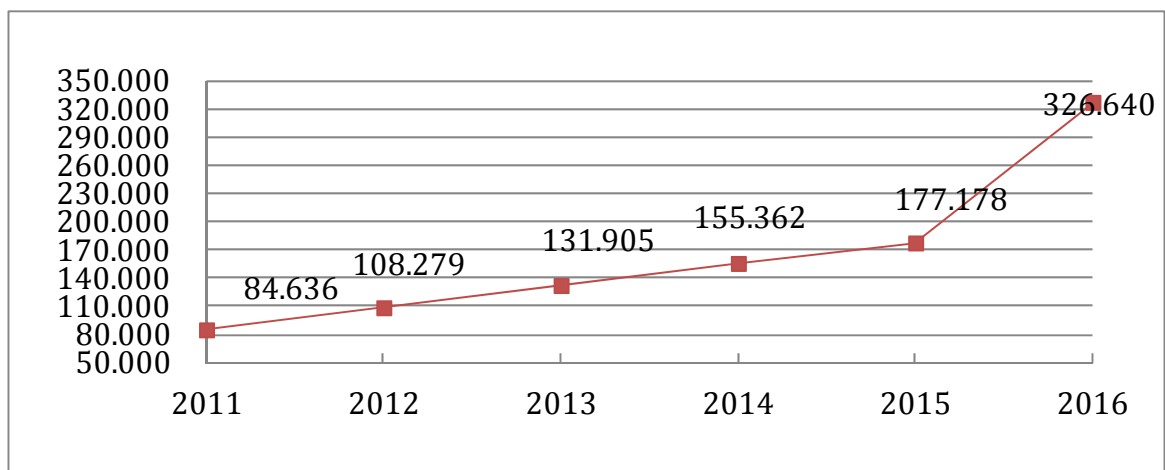
Pendidikan merupakan sesuatu hal yang penting karena pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok

yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang bisa ditempuh. diantaranya melalui perpustakaan.

Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer).

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Jumlah pengunjung pada tahun 2011 sebanyak 84.636 orang menjadi 177.176 orang pada tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata tiap tahun jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu tersebut sebesar 13,37%. Kemudian meningkat tajam hampir 2 kali lipat menjadi 326.640 pengunjung sebagaimana terlihat pada tabel dibawah.

Grafik 2.29
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Lamongan
Tahun 2011-2016



Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 2017

Indikator pengunjung perpustakaan tahun 2015 sebanyak 177.176 orang (tercapai 100%) dimana cakupan layanan perpustakaan hanya pada wilayah Kecamatan Kota saja. Sedangkan ditahun 2016 meningkat tajam dikarenakan pada saat ini jangkauan layanan perpustakaan sudah keseluruh wilayah Lamongan meliputi Perpustakaan Umum, Kecamatan, Desa, Lembaga Sekolah baik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta sebagai Gerakan Literasi Lamongan. Ditambah dengan promosi Gemar Membaca dalam setahun sebanyak 441 kali baik melalui iklan media cetak, media social, pameran dan seminar, banner, bedah buku maupun Literasi

Informasi (layanan penelusuran informasi bagi pengunjung). Peningkatan pengunjung juga didukung oleh penambahan perpustakaan baik perpustakaan sekolah (1.292) maupun perpustakaan khusus (1.289).

Tabel 2.21
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

Uraian	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perpustakaan	1	6	89	148	648	2581

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan 2017

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan atau disebut sebagai usaha agribisnis. Pada umumnya usaha perikanan dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia.

Tabel 2.22
Perkembangan Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2011-2016 (ton)

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi ikan tangkap	71.293,78	72.212,80	73.183,00	74.625,40	75.310,50	76.139,20
Produksi Ikan Budidaya	36.628,80	37.245,17	39.201,38	42.346,96	46.604,90	51.302,60
Total	107.922,58	109.457,97	112.384,38	116.972,36	121.915,40	127.441,80

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2016

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Lamongan terdiri dari produksi ikan tangkap dan produksi ikan budaya. Perkembangan jumlah produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Pada tahun 2011 produksi perikanan sebesar 107.922,58 ton menjadi 127.441,80 ton pada tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 3,39%.

2.3.2.2 Urusan Pertanian

➤ *Kesejahteraan petani*

Pekerjaan penduduk Lamongan didominasi di sector pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Secara umum kesejahteraan petani Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari data Nilai Tukar Petani (NTP). Kabupaten

Lamongan telah melakukan penghitungan NTP. Adapun perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2011- 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.23
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 - 2015

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Tukar Petani (NTP)	-	-	102,93	102,18	102
Indeks Harga yang diterima Petani (It)	-	-	109,54	116,97	118
Indeks Harga yang diterima Petani (It)	-	-	106,38	114,46	116

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2017

➤ ***Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan***

Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam ketahanan nasional, baik dikala kondisi ekonomi normal maupun saat menghadapi krisis. Tanaman pangan sangat relevan untuk di jadikan pilar ekonomi di daerah, mengingat sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap daerah yang siap didayagunakan untuk membangun ekonomi adalah sumber daya pertanian tanaman pangan. Begitu juga halnya di Kabupaten Lamongan, dengan produksi tanaman pangan dijadikan andalan daerah, sehingga peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan harus menjadi prioritas utama.

Pada tabel di bawah ini produksi dan produktivitas tanaman pangan masih didominasi oleh produksi padi. Produksi padi mengalami peningkatan dari 678.042,17 ton tahun 2011 menjadi 1.053.796 ton pada tahun 2016 dengan produktivitas padi sebesar 6,48. Urutan kedua berasal dari tanaman palawija sebanyak 378.885 ton tahun 2011 menjadi 439.118,27 ton tahun 2016. Sedangkan tanaman hortikultura (buah & sayur) sebanyak 49.190 ton tahun 2011 menjadi 50.564 ton dengan produktivitasnya yang mengalami peningkatan sebesar 8,98 di tahun 2016.

Tabel 2.24
Perkembangan Produksi & Produktivitas Pertanian Tahun 2011-2016

Komponen	Satuan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi padi		678.042,17	911.854,00	967.497,00	1.028.254,25	984.067,00	1.053.796
Produktivitas padi	Ton/Ha	5,31	6,38	6,45	6,57	6,48	6,6
Produksi tanaman palawija		378.885,00	401.185,00	420.372,00	417.175,00	496.787,00	439.118,27
Produktivitas tanaman palawija	Ton/ha	5,73	6,24	6,55	6,35	5,41	5,54
Produksi tanaman hortikultura (sayur)		49.190	50.290	51.894	53.524	65.369	50.564
Produktivitas tanaman hortikultura (sayur)	Ton/ha	6,07	6,19	6,22	6,26	7,38	8,98

Sumber: Dinas TPHP Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan**

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai meliputi mengolah, memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran melainkan tanaman yang umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama.

Secara umum perkembangan produksi tanaman perkebunan selama lima tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel di bawah ini produksi tanaman tebu yang paling dominan jika dibandingkan dengan tanaman tembakau. Produksi tanaman tebu sebesar 341.113 ton tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 62,02. Sedangkan produksi tanaman tembakau sebesar 7.615 ton tahun 2015 dengan produktivitas sebesar 1,08.

Tabel 2.25
Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tahun 2011-2016

Komponen	Sat	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi tanaman tembakau	Ton/Ha	16.499	13.704	8.487	7.157	7.615	3.304
Produksi tanaman tebu	Ton/Ha	152.403	217.713	304.749	384.533	341.113	308.145
Produktivitas ta-naman tembakau	Ton/Ha	1,89	1,41	1,17	1,00	1,08	0,95
Produktivitas ta-naman tebu	Ton/Ha	72,27	72,50	88,28	100,19	62,02	62,22

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan 2017

➤ **Populasi dan Produksi Hasil Peternakan**

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba dan ternak unggas, yaitu ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik.

Secara umum populasi ternak dan unggas di Kabupaten Lamongan selama tahun 2011-2016 mengalami peningkatan dengan kontribusi yang paling tinggi dari unggas. Jumlah populasi ternak sebanyak 33.488.887 pada tahun 2011 menjadi 50.267.550 atau meningkat 41,38%. Sedangkan produksi hasil peternakan yang berupa daging dan telur juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.26
Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ternak besar	111.098	117.368	97.099	99.436	102.187	105.198
Ternak kecil	135.547	161.279	162.278	162.194	180.284	185.781
Unggas	33.242.242	35.295.354	42.840.021	47.085.707	48.961.890	49.976.571
Jumlah	33.488.887	35.574.001	43.099.398	47.347.337	49.244.361	50.267.550

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan 2017

➤ **Produksi Hasil Peternakan (Daging & Telur)**

Perkembangan produksi daging dan telur di Kabupaten Lamongan selama tahun 2011-2015 secara umum mengalami peningkatan. Secara detail gambarannya ada di bawah.

Tabel 2.27
Perkembangan Produksi Daging dan Telur
di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

Komoditi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi daging (kg)	12.047.936,07	22.712.270,45	25.548.854,58	26.782.913,00	28.971.732,00	30.769.126,00
Produksi telur (kg)	2.045.371,38	2.160.796,12	2.621.081,29	2.713.398,00	2.928.471,20	3.117.731

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 2017

2.3.2.3 Urusan Kehutanan

Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Pengelolaan hutan sebaiknya diselenggarakan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya hutan dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan. Kehutanan bukan hanya berfungsi sebagai pelestari ekosistem, tetapi juga menghasilkan sesuatu hal yang produktif. Perkembangan kehutanan di Kabupaten Lamongan dibagi menjadi tiga wilayah hutan yaitu Mojokerto, Tuban, dan Jombang. Perkembangan jumlah hutan yang paling tinggi berasal dari Mojokerto sebesar 23.694,60 Ha. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Provinsi.

Tabel 2.28
Data Kehutanan Kabupaten Lamongan

Error! Not a valid link.

Sumber: Rencana Kehutanan Tingkat Kab. (RKTK) Kab. Lamongan 2015-2035

➤ **Luas Lahan Kritis**

Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif, bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah meskipun dikelola, produktivitasnya sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengelolaannya. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kekeringan, biasanya terjadi di daerah-daerah bayangan hujan;
- b. Genangan air yang terus-menerus;
- c. Erosi tanah dan *masswasting* yaitu gerakan masa tanah menuruni lereng yang biasanya terjadi di daerah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang miring;
- d. Pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan;
- e. Masuknya material yang tak dapat diuraikan oleh bakteri (misalnya plastik) dan dapat bertahan lama masuk ke lahan pertanian, sehingga sangat mengganggu kelestarian kesuburan tanah.

Lahan kritis memiliki kondisi lingkungan yang sangat beragam tergantung pada penyebab kerusakan lahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi lahan kritis menyebabkan tanaman tidak cukup mendapatkan air dan unsur hara, kondisi fisik tanah yang tidak memungkinkan akar berkembang dan proses infiltrasi air hujan, kandungan garam yang tinggi akibat akumulasi garam sekunder atau tanaman keracunan oleh unsur toksik yang tinggi. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

2.3.2.4 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

➤ Energi Listrik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu dan atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu serta membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau terpencil terhadap energi, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan mengembangkan jaringan listrik pedesaan, yang dilakukan untuk: (1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu; (2) Menurunkan pengeluaran keluarga miskin dalam penggunaan minyak tanah untuk lampu penerangan; (3) Memperkecil pembiayaan pembangunan dalam rangka pengembangan energi listrik bagi daerah-daerah terpencil. Berikut perkembangan pemasangan listrik bagi RTM

➤ Potensi Pertambangan

Berdasarkan hasil kajian, bahwa Kabupaten Lamongan memiliki cadangan sumber daya mineral, yang terdiri dari pertambangan mineral non logam/ batuan. Jenis mineral (non logam/ batuan) terdiri dari batu gamping, dolomit, pedel urug, lempung, fosfat dolomit. Jenis mineral tersebut tersebar di tujuh kecamatan yaitu kecamatan: Paciran, Brondong, Karanggeneng, Babat, Sambeng, Sugio, dan Mantup. Jumlah luas wilayah tambang sebanyak 1.251,596 Ha, luas keseluruhan yang sudah ditambang sebanyak 375.444. luas wilayah usaha tambang yang paling banyak berada di Kecamatan Mantup dan Kecamatan Sambeng.

2.3.2.5 Urusan Perindustrian

Sebagian besar kegiatan industri kecil berlokasi di daerah pedesaan dengan sifat dan metode pengusahaan yang tradisional, dan masih sangat tergantung pada pasaran lokal. Jenis industri kecil, menengah serta industri kerajinan rumah tangga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah sebagai salah satu alternative dalam mengupayakan penciptaan dan perluasan tenaga kerja, serta meningkatkan pendapatan seluruh rakyat, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Penciptaan dan perluasan tenaga kerja melalui peningkatan persentase volume usaha industri kecil dan menengah mulai digalakkan di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut tergambar jelas dari data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menggambarkan trend positif perkembangan usaha industri kecil dan menengah. Namun demikian jumlah IKM/IRT yang berlegalisasi usaha masih minim sehingga perlu dikembangkan. Adapun perkembangan jumlah industri di Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.29
Perkembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Menengah dan Industri Besar Tahun 2011-2016

Tahun	Industri Rumah Tangga	Indusri Kecil Menengah	Industri Besar
2011	12.802	430	20
2012	13.371	475	25
2013	13.889	495	30
2014	14.413	550	35
2015	14.980	575	40
2016	14.267	1621	43

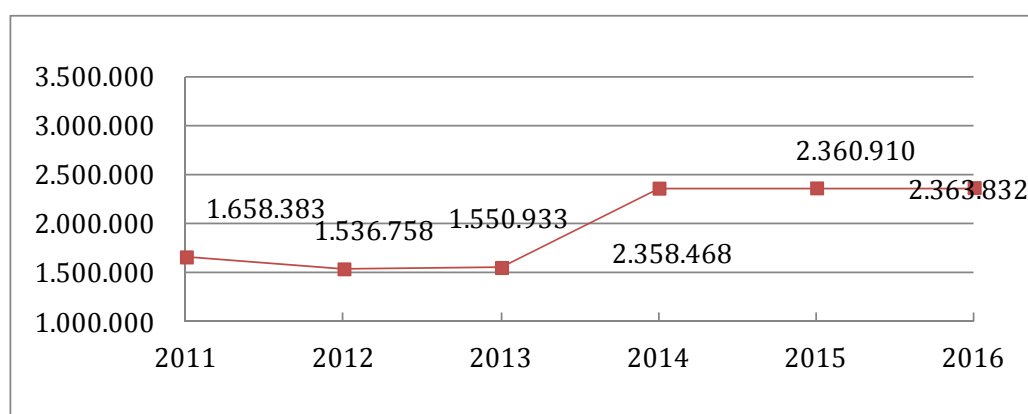
Sumber: Dinas Perindustrian & perdagangan Kabupaten Lamongan 2017

2.3.2.6 Urusan Pariwisata

Wisata religi, buatan dan alam merupakan salah satu jenis wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Lamongan. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lamongan selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 1.658.383 pengunjung tahun 2011 menjadi 2.363.832 pengunjung tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 42.54 persen. Di sisi lain, kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Lamongan per tahunnya mengalami perkembangan yang stagnan sebesar 11.98 persen dengan jumlah obyek wisata yang telah dikembangkan samapi dengan tahun 2016 sebanyak 7 obyek wisata yaitu Waduk Gondang, Situs Makam Sunan Drajat, Wisata Bahari Lamongan, Maharani Zoo dan Goa, Pemandian air hangat Brumbun, TPI dan Monumen Van Der Wijck dan Pusat Batik Sendang Duwur.

Grafik 2.30

Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 2017

Tabel 2.30
Kontribusi Pariwisata terhadap PAD Lamongan

Tahun	PAD	PAD PARIWISATA	KONTRIBUSI
2011	99.545.629.500	11.923.240.000	11,98
2012	129.284.733.136	13.323.721.000	10,31
2013	161.087.916.085	14.342.781.000	8,90
2014	272.409.285.216	14.343.159.000	5,27
2015	321.667.133.176	14.607.780.000	4,54
2016	403.474.462.147	14.622.948.000	3,62

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Lamongan lebih didominasi oleh transportasi darat termasuk sarana kereta api dan didukung keberadaan pelabuhan ASDP. Saat ini telah dikembangkan pelabuhan laut nasional-internasional oleh PT. Lamongan Shorebase dan Pelabuhan ASDP di wilayah utara Lamongan.

Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut.

1. Angkutan Penumpang Umum yang melayani dalam kota Kabupaten Lamongan dengan rute Terminal Lamongan- Dalam Kota Lamongan - Perumnas Made - Perumda Deket
2. Angkutan Penumpang Umum Pedesaan yang melayani trayek antar Kecamatan dalam Kabupaten Lamongan terdiri dari 13 (tiga belas) rute yaitu :
 - Lamongan - Tikung - Mantup - Babatan
 - Lamongan - Tikung - Kembangbahu - Gondang
 - Lamongan - Sugio - Gondang
 - Lamongan - Deket - Kr. Binangun - Glagah
 - Lamongan - Babat

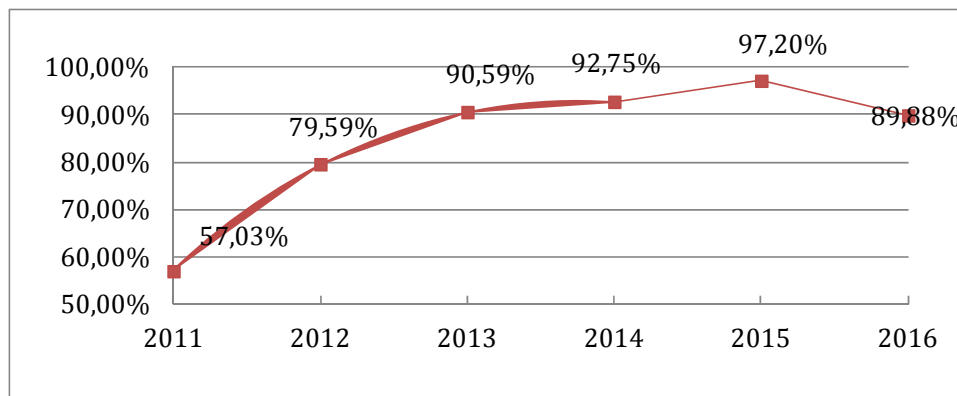
- Sukodadi – Kr. Geneng – Banjarwati
- Pucuk – Laren - Blimbing
- Laren – Blimbing
- Babat – Kalen – Kedungpring – Gondang
- Babat – Modo – Bluluk – Sukorame
- Sukorame – Kabuh - Ploso – Ngimbang
- Brondong – Paciran – Sd. Duwur – Solokuro - Nggodog
- Ngimbang – Sambeng – Mantup – Balonggpanggung.

2.4.2 Utilitas

➤ *Data Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2011-2015*

Dari total panjang Kabupaten 346.732 di tahun 2011-2015 yang dalam kondisi baik 97,20 % dalam kondisi baik. Selama periode 6 tahun total panjang jalan kabupaten mengalami pertambahan menjadi 446.116 (berdasarkan SK Bupati Nomor 188/170/Kep/413.013/2016) dan selalu melampaui target yang ditetapkan hingga tahun 2016 total jalan yang dalam kondisi baik 89,88%.

Grafik 2.31
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2011-2016

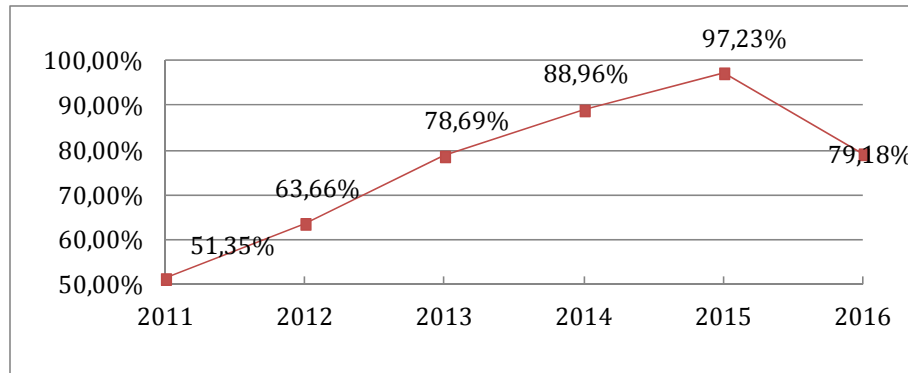


Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017

➤ *Data Jalan Poros Strategis Kondisi Baik Tahun 2011-2016*

Selain jalan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memberikan perhatian terhadap perkembangan jalan poros strategis dimana dari total panjang jalan poros strategis 168.800 meter yang dalam kondisi baik di tahun 2011 sebesar 51,35 % selama periode 5 tahun total panjang jalan poros strategis mengalami pertambahan dan selalu melampaui target yang ditetapkan hingga tahun 2016 total panjang jalan poros strategis dalam kondisi baik 79,18%. Grafik menurun di tahun 2016 karena terjadi perubahan total panjang jalan poros strategis yang semula 168.800 meter menjadi 279.500 meter berdasarkan SK Bupati Nomor 188/170/Kep/413.013/2016.

Grafik 2.32
Panjang Jalan Poros Desa Strategis Kondisi Baik Tahun 2011-2016

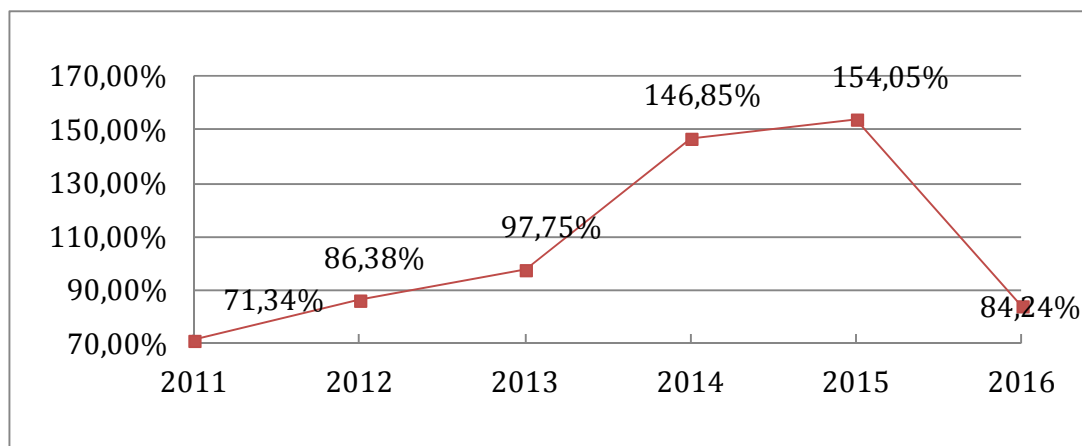


Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017

➤ **Data Jalan Lingkungan Kondisi Baik 2011-2016**

Dalam upaya mendukung dinamika pergerakan orang dilingkungan permukiman dibutuhkan keberadaan jalan lingkungan yang layak dan representatif, perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap jalan lingkungan selama periode lima tahun dari tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan capaian kinerja jalan. Sebagaimana diketahui dari total panjang jalan lingkungan 94.862 meter yang dalam kondisi baik tahun 2011 sebesar 71,34%, selanjutnya dalam tahun 2012 kinerja jalan meningkat menjadi 86,38% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76,17%. Sampai dengan tahun 2016 total panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik menjadi 159.643 meter atau 84,24 % melampaui dari target yang ditetapkan.

Grafik 2.33
Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik Tahun 2011-2016



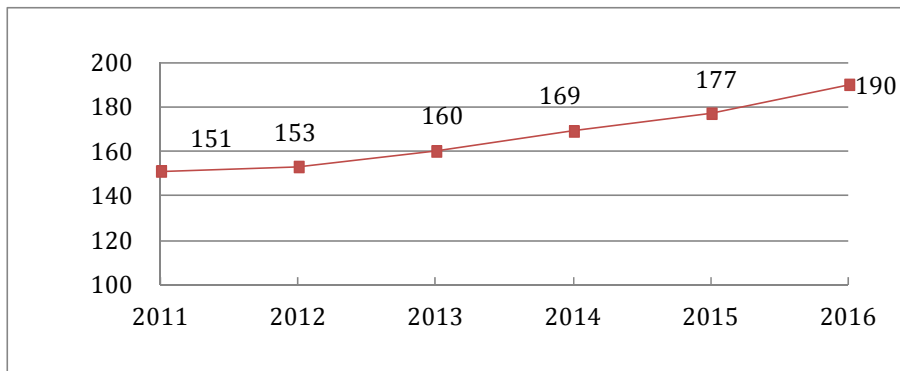
Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017

➤ **Data Jembatan Kondisi Baik Tahun 2011-2016**

Jumlah jembatan di jalan Kabupaten sebanyak 236 unit dimana pada tahun 2011 jembatan kondisi baik sebanyak 151 unit. Pencapaian kinerja jembatan meningkat

sebanyak 177 unit di tahun 2015 atau 75 % dalam kondisi baik dan meningkat menjadi 190 unit di tahun 2016 atau 74.51%.

Grafik 2.34
Jumlah Jembatan Kondisi Baik Tahun 2011-2016

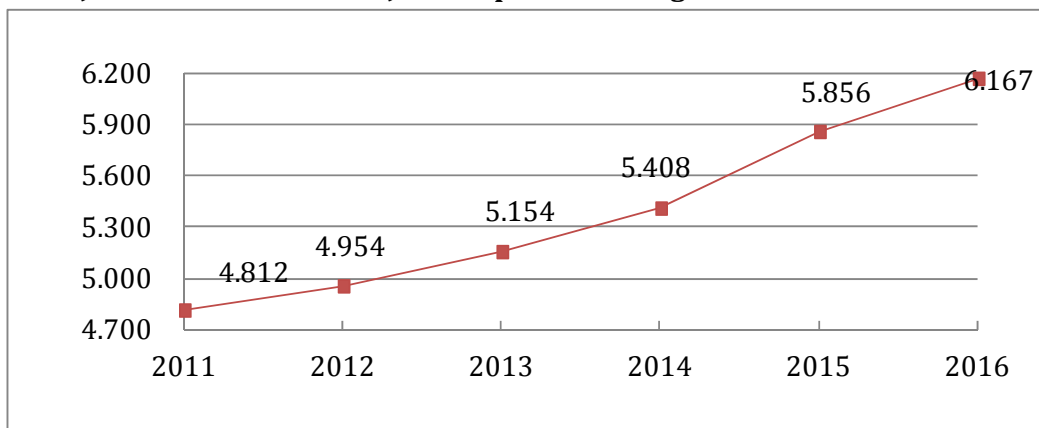


Sumber : Dinas PU Bina Marga 2017

➤ **LPJU**

Total ketersediaan PJU di Kabupaten Lamongan sebanyak 4812 unit di tahun 2011 meningkat menjadi 6.167 di tahun 2016 dimana ada penambahan sebanyak 1.355 unit selama kurun waktu 6 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 5.10% per tahunnya.

Grafik 2.35
Jumlah Ketersediaan PJU Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

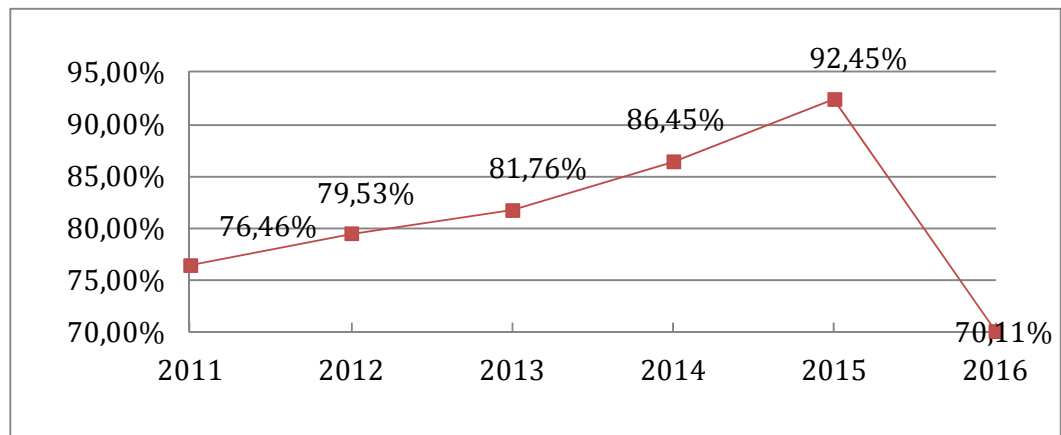


Sumber : Dinas Perkim 2017

➤ **Jaringan Irigasi**

Untuk mendukung kegiatan produktifitas kegiatan pertanian dibutuhkan keberadaan jaringan irigasi yang memadai, pada tahun 2011 total panjang jaringan irigasi kondisi baik 76,46 % dari total panjang jaringan 676.251 meter. Pertambahan panjang jaringan irigasi kondisi baik terus diupayakan dan hingga tahun 2015 telah mencapai 92,45 % atau 676.251 meter. Total panjang jaringan tahun 2016 menjadi 901.251 meter dengan kondisi baik sepanjang 631.888 meter.

Grafik 2.39
Jaringan Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

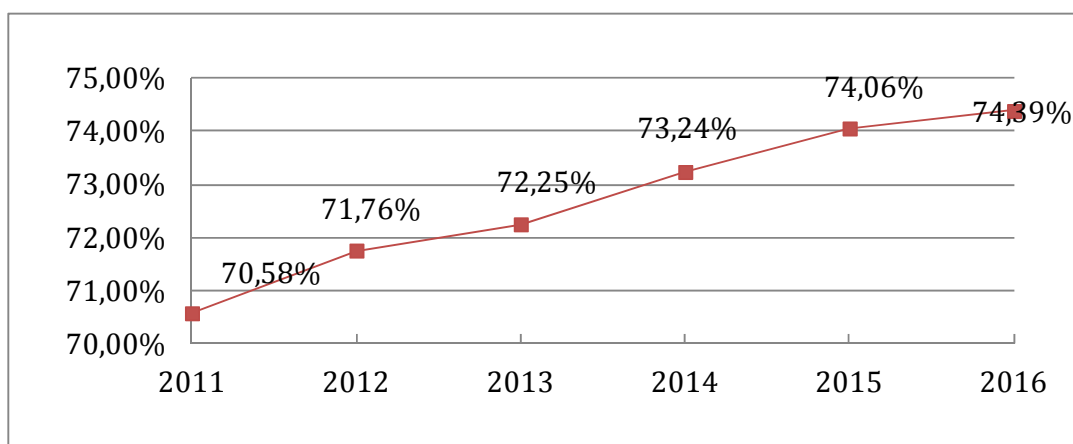


Sumber : Dinas PU SDA 2017

➤ **Ketersediaan Sumber Air Baku**

Potensi ketersediaan sumber air baku di Kabupaten Lamongan ada sebanyak 110.061.900 m³, pada tahun 2011 jumlah air baku yang dapat dimanfaatkan sebanyak 77.677.838 m³ atau 70,58%. Melalui upaya normalisasi waduk dan Badan penangkap air lainnya pada tahun 2015 jumlah air baku yang dapat dimanfaatkan menjadi 81.511.572.m³ atau 74,06% kemudian meningkat sedikit menjadi 74,39% di tahun 2016.

Grafik 2.40
Ketersediaan Air Baku Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



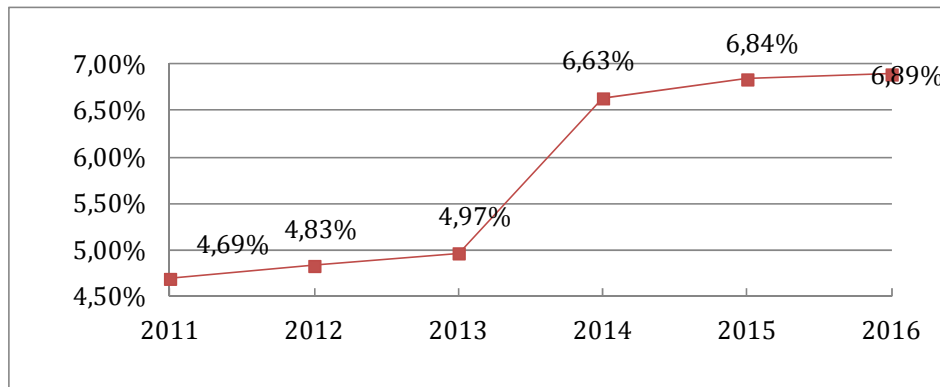
Sumber : Dinas PU SDA 2017

➤ **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap wilayah harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari total luas wilayah. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk membentuk lingkungan nyaman dan asri dan berkelanjutan. Pada tahun 2011 di Kabupaten Lamongan ruang terbuka hijau seluas 16,04 Ha atau 4,69%. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menambah ruang

terbuka hijau hingga pada tahun 2015 luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Lamongan seluas 23,40 Ha atau 6,84% dan meningkat tipis menjadi 6.89% di tahun 2016.

Grafik 2.42
Luas RTH Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

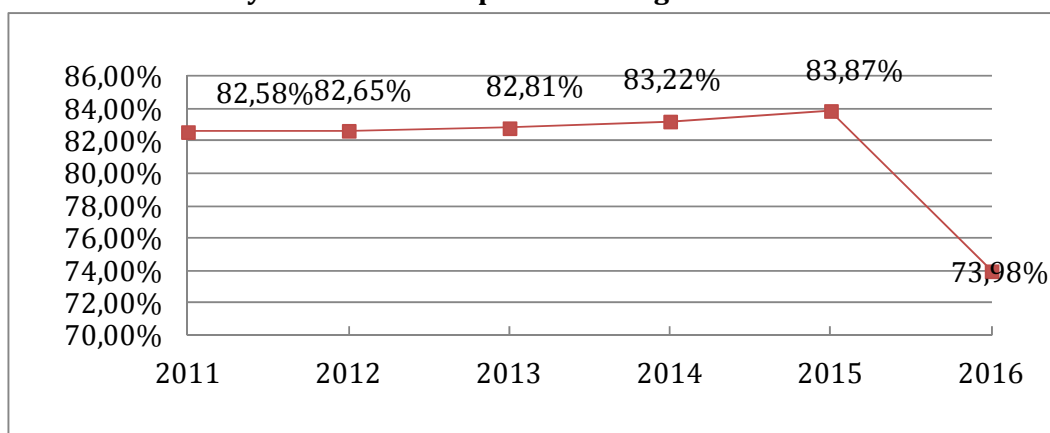


Sumber : Dinas Perkim 2017

➤ **Rumah Layak Huni**

Untuk membangun tatanan keluarga yang baik tentunya berangkat dari hunian rumah tangga yang sehat. Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat serius mengupayakan keberhadaan hunian yang sehat melalui berbagai program dan kegiatan. Capaian Pada tahun 2011 jumlah rumah layak huni sebanyak 251.252 unit atau 82,58 % dan meningkat di tahun 2015 rumah layak huni yang ada di Kabupaten Lamongan sebanyak 255.207 unit atau 83,87% dari total keseluruhan 304.271 unit. Selanjutnya di tahun 2016 jumlah total rumah keseluruhan sebanyak 353.840 unit dan 73,98% (261.842 unit) diantaranya merupakan rumah layak huni.

Grafik 2.44
Rumah Layak Huni di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Perkim 2017

➤ **Penanganan Kawasan Kumuh**

kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 teridentifikasi seluas 149,99 Ha atau 5,1 % dari total luas wilayah Kabupaten Lamongan. Dalam upaya penurunan kawasan kumuh Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui program perbaikan kawasan lingkungan. Pada tahun 2015 luas kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan menjadi 130,20 Ha atau 4,40%. Berikutnya di tahun 2016 luas total kawasan kumuh sebesar 125,67 Ha dan telah tertangani seluas 40,02 Ha.

➤ **Air Bersih**

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi suatu wilayah perkotaan merupakan salah satu pokok yang harus dipersiapkan, karena dapat mempengaruhi pengembangan perekonomian wilayah tersebut. Dengan kesiapan sarana dan prasarana air bersih, maka keinginan masyarakat untuk tinggal di wilayah tersebut semakin tinggi. Dengan semakin pesatnya masyarakat tinggal di wilayah tersebut, tentunya kegiatan masyarakat juga semakin meningkat, baik dalam kegiatan perdagangan, perkantoran, industri dan lain-lain. Dengan semakin tinggi aktifitas yang ada, maka kebutuhan air bersih juga semakin meningkat.

Begitu pula dengan Kabupaten Lamongan, dengan pertumbuhan pemukiman penduduk yang semakin meningkat maka diperlukan pula peningkatan pelayanan kebutuhan air di wilayah tersebut. Pemenuhan kebutuhan air hingga saat ini diambilkan dari Sungai Bengawan Solo, dan pengelolaan air bersih yang dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok HIPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum). Pelayanan PDAM Kabupaten Lamongan baru melayani 10 dari 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan melalui 12 area pelayanan yaitu di Kecamatan Lamongan, Sukodadi, Deket, Brondong, Kembangbahu, Sugio, Sekaran, Babat, Kedungpring dan Ngimbang.

➤ **Persampahan**

Penanganan persampahan di Kabupaten Lamongan terpusat di 3 lokasi, yakni Kota Lamongan, Babat dan Paciran-Brondong, dimana ketiganya telah dilengkapi sarana TPA dengan metode penanganan *control landfill*, masing-masing dengan luasan 6.3 Ha (terletak di Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung) untuk Kota Lamongan 0,063 Ha (Desa Gendongkulon Kecamatan Babat) untuk Kota Babat, dan seluas 0,09 Ha (di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro) untuk Kota Brondong-Paciran. Adapun penanganan persampahan di tingkat masyarakat dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Sampah dari masyarakat dikumpulkan di sebelas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) melalui manajemen yang dikelola oleh masyarakat sendiri, kemudian sampah yang telah terkumpul tersebut di bawah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dengan menggunakan 6 buah dum truck dengan produksi 80 M³/hari.

Adapun untuk Kota Babat dan Brondong-Paciran menggunakan container (sebagai TPS). Tersedia 4 kontainer di wilayah Kota Brondong-Paciran dan 3 kontainer di wilayah Kota Babat, masing-masing dilayani 1 amrol truck dengan produksi sampah perharinya 30 M³ – 36 M³. Untuk lokasi TPA Kota Lamongan telah dilengkapi dengan 3 buah bulldozer, 2 unit tanki air 6000 liter sedangkan pada 2 TPA lainnya untuk pekerjaan perataan dan pemadatan didatangkan bulldozer dari Kota Lamongan.

➤ **Telekomunikasi**

Telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dalam menghadapi kemajuan di bidang teknologi informasi. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat akan memperoleh kemudahan serta percepatan akses dalam penyebaran informasi.

Kondisi hingga saat ini, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lamongan telah terjangkau oleh sarana telekomunikasi baik melalui sarana telepon kabel FO maupun yang menggunakan sarana telekomunikasi seluler. Sementara di bidang pemerintahan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi juga menjadi suatu hal yang sangat penting, khususnya sebagai sarana interaksi antar perangkat daerah dalam hal penyediaan data atau informasi secara cepat, tepat dan akurat. Dalam hal ini Kabupaten Lamongan telah mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi melalui media *Wireless LAN* 27 titik di 27 kecamatan.

➤ **Listrik**

Dalam rangka pemerataan pembangunan, maka penerangan ke wilayah terisolasi atau wilayah yang belum terjangkau kebutuhan akan listrik harus dilakukan melalui peningkatan penyediaan listrik di perkotaan dan pedesaan.

Dengan meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik akan terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan memperoleh layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani.

➤ **Pengairan**

Manajemen pengelolaan sumberdaya air dalam kaitannya dengan penyediaan air bagi kegiatan pertanian dan perikanan di Kabupaten Lamongan terbagi dalam 7 wilayah Unit Pelayanan Teknis (UPT), yaitu UPT Lamongan, Kedungpring, Babat, Karanggeneng, Sukodadi, Kuro dan Laren yang meliputi 55 Daerah Irigasi (DI) dengan luasan area sawah 45.841 Ha, meliputi 14.730 Ha merupakan jaringan irigasi teknis, 10.551 Ha jaringan irigasi semi teknis dan 20.560 Ha jaringan irigasi sederhana.

➤ ***Sarana Pasar***

Perkembangan sarana pasar di Kabupaten Lamongan yaitu telah dibangun 2 Pasar Modern baru yaitu Lamongan Plaza dan Pasar Agrobis Semando Babat. Pasar Agrobis Babat diharapkan dapat mengembangkan eksistensi pedagang tradisional di tengah serbuan sarana perdagangan ritel modern. Keseluruhan terdapat 9 unit Pasar Daerah, yaitu Pasar Baru, Pasar Modern/Lamongan Plaza , Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, Pasar Babat, Pasar Agrobis, Pasar Blimbing/Brondong, Pasar Maduran, Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Babat. Sementara itu, Pasar Desa hingga saat ini berkembang menjadi 112 unit.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan Kabupaten Lamongan dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kabupaten Lamongan terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di daerahnya. Ciri utama suatu daerah yang melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah, berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan membandingkan kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD. Indikator ini bertujuan untuk melihat persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sehingga mengetahui kemampuan daerah dalam kemandirian keuangan.

Tabel 3.1
Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2011-2016 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah
2011	99.545.629.500,31	1.321.542.956.897,31	7,53
2012	129.284.733.136,02	1.472.425.927.493,02	8,78
2013	161.087.916.084,90	1.674.655.717.104,90	9,62
2014	272.409.285.215,81	1.969.782.922.682,81	13,83
2015	321.667.133.175,96	2.436.090.963.266,96	13,20
2016	403.474.462.147,33	2.719.031.205.756,84	14,84
Rata-Rata	1.387.469.159.260,33	11.593.529.693.201,80	11,30

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lamongan selama periode 2011-2016 sebesar 11,30 persen yang menunjukkan peran/kontribusi pendapatan asli daerah dalam pendanaan keuangan. Namun demikian, UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi harapan bagi pemerintah daerah khususnya Kab. Lamongan untuk meningkatkan peran pendapatan asli daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah. Struktur APBD Kabupaten Lamongan terdiri atas: (1) Pendapatan yang di dalamnya terdapat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah; (2) Belanja yang di dalamnya terdapat belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

➤ PENDAPATAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun komponen Pendapatan Daerah yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri dari;

1. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (berasal dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumberdaya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (berasal dari dana penyesuain), serta Transfer Pemerintah Provinsi (berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya serta Pendapatan Lainnya.

Selama enam tahun terakhir (2011-2016), realisasi Pendapatan Daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 25 % dengan kenaikan terbesar dari tahun 2015 menuju tahun 2016 yaitu sebesar Rp 2.436.090.963.266,96 pada tahun 2015 dan Rp 2.719.031.205.756,84 pada tahun 2016. Rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah sebesar 87,95% diikuti oleh lain - lain PAD yang Sah sebesar 33,42%, Pajak Daerah sebesar 41,24%, Dana bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar 22,28%, Retribusi Daerah sebesar 23,12%, dan diikuti oleh Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar -1,86%.

Adapun Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1.321.524.956.897,31	1.472.425.857.493,02	1.674.655.717.104,90	1.969.782.922.682,81	2.436.090.963.266,96	2.719.031.205.756,84	15,61%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	99.545.629.500,31	129.284.733.136,02	161.087.916.084,90	272.409.285.215,81	321.667.133.175,96	403.474.462.147,33	33,42%
1.1.1.	Pajak Daerah	21.555.913.874,82	27.916.743.413,58	34.882.026.900,50	62.762.113.776,50	77.548.886.579,00	114.982.290.275,30	41,24%
1.1.2.	Retribusi Daerah	12.621.817.231,00	14.415.005.881,00	29.725.601.395,00	32.608.916.648,20	24.724.667.995,00	27.118.546.726,20	23,12%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	16.758.855.894,11	19.399.749.694,65	19.416.139.658,63	20.206.034.556,15	21.361.254.241,90	22.454.128.197,68	6,15%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	48.609.042.500,38	67.553.234.146,79	77.064.148.130,77	156.832.220.234,96	198.032.324.360,06	238.919.496.948,15	40,70%
1.2.	Dana Perimbangan	859.140.092.542,00	1.006.686.719.310,00	1.139.467.107.964,00	1.209.760.803.838,00	1.313.958.388.093,00	1.708.680.363.941,00	15,04%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	91.074.742.542,00	84.900.637.030,00	89.743.822.844,00	67.973.268.586,00	71.226.733.459,00	79.223.583.047,00	-1,86%
1.2.1.	Dana bagi hasil bukan pajak /Sumber Daya Alam	-	18.937.916.280,00	15.712.417.120,00	21.818.021.252,00	24.185.889.634,00	19.044.065.094,00	22,28%
1.2.2.	Dana alokasi umum	679.813.150.000,00	832.015.926.000,00	958.344.988.000,00	1.042.124.514.000,00	1.064.300.915.000,00	1.166.655.654.000,00	11,61%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	88.252.200.000,00	70.832.240.000,00	75.665.880.000,00	77.845.000.000,00	154.244.850.000,00	443.757.061.800,00	55,16%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	362.839.234.855,00	336.454.405.047,00	374.100.693.056,00	487.612.833.629,00	800.465.441.998,00	606.876.379.668,51	14,85%
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-	-	33.798.834.668,51	0,00%
1.3.2.	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi	64.794.017.364,00	60.725.416.363,00	76.516.256.952,00	130.904.450.025,00	146.003.833.998,00	136.756.685.000,00	19,20%
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	241.439.570.320,00	219.647.068.000,00	276.114.495.000,00	285.154.726.000,00	454.713.285.000,00	320.856.510.000,00	10,00%
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	56.605.647.171,00	56.006.600.000,00	21.314.625.000,00	71.477.137.000,00	199.748.323.000,00	115.464.350.000,00	87,95%
1.3.5.	Dana Bagi Hasil Restribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	75.320.684,00	155.316.104,00	76.520.604,00	-	0,00	13,87%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah ini dapat dijelaskan antara lain:

1. Realisasi total pendapatan daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 16,61 persen yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan semua unsur-unsur pendapatan daerah, yaitu: PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.
2. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35,42 persen. Semua unsur PAD menunjukkan *trend* meningkat (pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah) kecuali tahun 2016 karena masih pagu anggaran. Kenaikan yang cukup besar dari unsur PAD menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan khususnya pajak daerah yang merupakan unsur dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa gerak perekonomian Kabupaten Lamongan terus tumbuh karena meningkatnya pajak daerah berarti telah terjadi peningkatan pendapatan dunia usaha di daerah.
3. Realisasi penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,90 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh unsur DAK dan DAU yang juga cenderung meningkat. Kenaikan dana bagi hasil pajak dan atau bukan pajak menggambarkan meningkatnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan meningkatnya pendapatan dari eksplorasi/eksploitasi SDA yang dibagi hasilkan kepada daerah. Kenaikan DAK dan DAU ini mengindikasikan bahwa Kab. Lamongan masih tergantung dengan pusat.
4. Secara total realisasi, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 24,61 persen.

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu yang sama, menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 35,42%. Selain itu, rata-rata realisasi pendapatan yang dicapai melampaui rata-rata target yang telah ditetapkan dengan rasio efektivitas PAD mencapai kisaran 93,71% sampai dengan 108,18%. Perkembangan PAD pada periode tahun 2011-2015 tersaji dalam tabel dan gambar berikut.

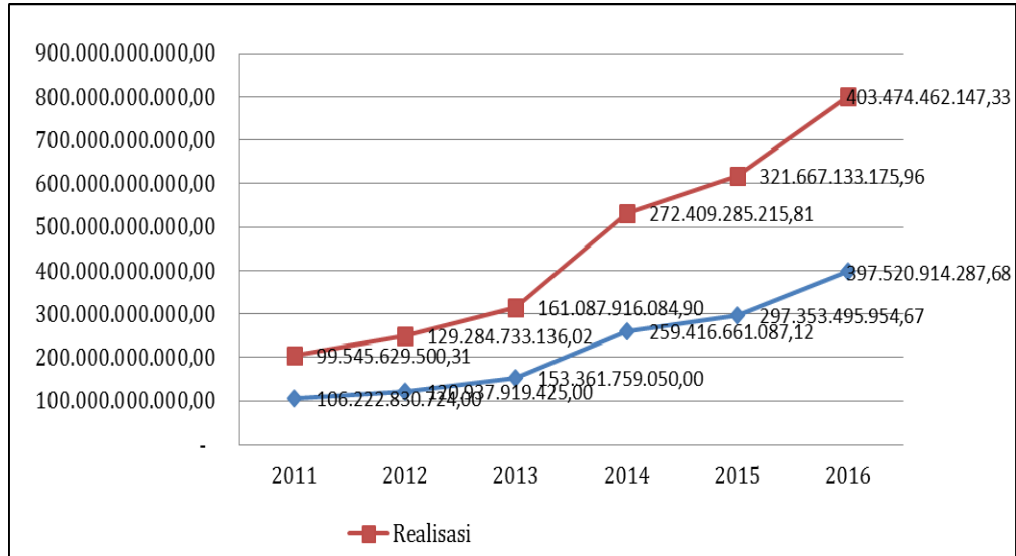
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2016

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektivitas
	PAD	Pertumbuhan (%)	PAD	Pertumbuhan (%)	
2011	106.222.830.724,00	5,64	99.545.629.500,31	4,51	93,71
2012	120.937.919.425,00	13,85	129.284.733.136,02	29,88	106,90
2013	153.361.759.050,00	26,81	161.087.916.084,90	24,6	105,04
2014	259.416.661.087,12	69,15	272.409.285.215,81	69,11	105,01
2015	297.353.495.954,67	14,62	321.667.133.175,96	44,25	108,18
2016	397.520.914.287,68		403.474.462.147,33		101,49
Rata-rata Per Tahun					103,83

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Sedangkan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2011-2015 tersaji dalam grafik berikut:

Grafik 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian PAD mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 berada di atas target. Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah efektif dalam melakukan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, sumber-sumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal yang perlu terus ditingkatkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah serta penyederhanaan prosedur pemungutan yang dipadukan dengan penerapan sanksi yang efektif serta pengendalian dan pengawasan.

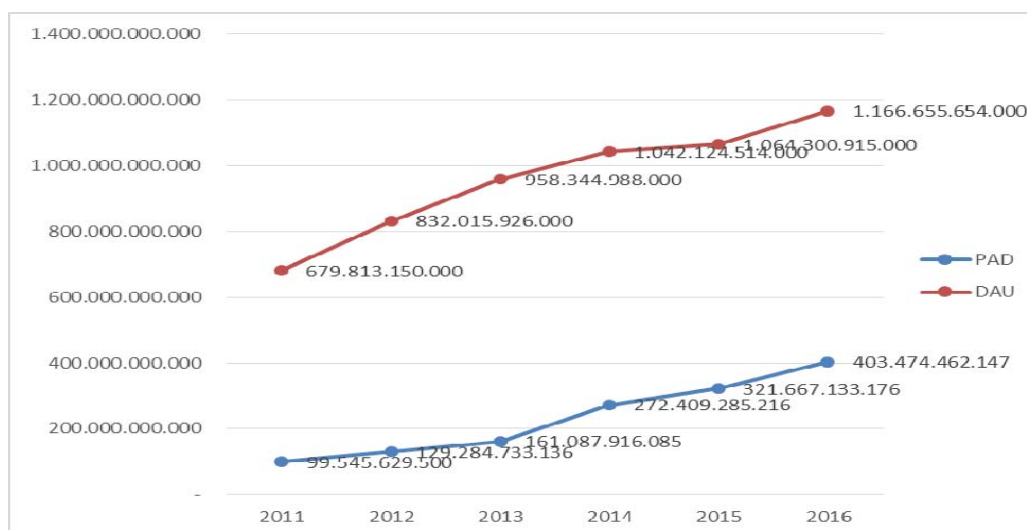
Perkembangan kinerja kapasitas fiskal daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat kinerjanya dengan pendekatan rasio PAD terhadap DAU dalam APBD. Perkembangan rasio PAD terhadap DAU pada APBD tahun 2011-2016 tersaji pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.4
Rasio PAD Terhadap DAU Dalam APBD TA. 2011-2016

Tahun Anggaran	Perbandingan DAU dan PAD		Rasio PAD terhadap DAU
	PAD	DAU	
2011	99.545.629.500	679.813.150.000	14,64
2012	129.284.733.136	832.015.926.000	15,54
2013	161.087.916.085	958.344.988.000	16,81
2014	272.409.285.216	1.042.124.514.000	26,14
2015	321.667.133.176	1.064.300.915.000	30,22
2016	403.474.462.147	1.166.655.654.000	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Grafik 3.2
Perbandingan DAU Terhadap PAD Pada APBD TA. 2011-2016



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Pada grafik diatas menjelaskan bahwa garis biru merupakan trend DAU dan garis merah menggambarkan trend PAD. Melihat data trend kenaikan DAU dan PAD dapat dilihat bahwa gapnya sangat lebar, artinya bahwa prosentase kenaikan PAD masih belum sebesar prosentase kenaikan DAU.

➤ **BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Lamongan ditargetkan terus meningkat peningkatan dari Rp 1.406.311.340.809,78 ditahun 2011 dan Rp 2.589.827.119.679,47 ditahun 2015. Realisasi fisik belanja daerah secara umum telah memenuhi target, sedangkan realisasi anggaran kurang dari alokasi belanja daerah karena adanya efisiensi. Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi dan realisasi belanja Kabupaten Lamongan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

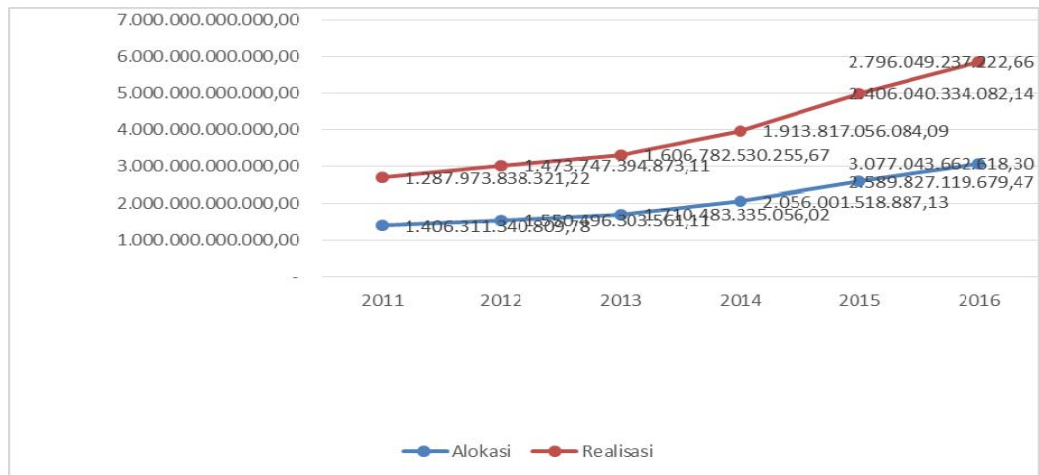
Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Belanja Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

No	Uraian Belanja Daerah	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
A	Belanja Tidak Langsung	908.376.973.192,78	877.170.647.340,54	1.029.900.149.977,11	974.111.861.288,95	1.144.474.148.785,02	1.064.722.172.263,67	1.270.084.966.098,13	1.177.445.084.189,69	1.605.863.914.111,47	1.467.528.810.875,34	1.873.363.741.148,74	1.650.015.258.239,00
1	Belanja Pegawai	739.860.974.388,00	725.583.500.948,00	863.057.764.846,00	830.163.409.982,00	947.374.426.785,02	878.528.685.985,00	1.028.552.212.520,00	951.584.354.576,00	1.112.263.074.115,35	989.650.519.920,00	1.253.765.075.405,07	1.041.327.725.076,00
2	Belanja Bunga	2.759.762.613,93	2.654.206.530,91	3.332.000.000,00	3.205.861.172,95	2.100.000.000,00	2.006.201.715,67	850.000.000,00	640.804.648,15	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	80.548.134.000,00	65.419.651.326,63	61.930.225.395,00	46.585.113.954,00	51.252.850.000,00	49.742.064.061,00	76.369.650.000,00	69.023.623.176,00	155.632.917.000,00	145.980.966.861,00	117.773.091.000,00	111.801.261.857,00
5	Belanja Bantuan Sosial	22.462.000.000,00	22.410.688.000,00	29.034.280.000,00	28.530.280.000,00	26.204.600.000,00	24.842.448.300,00	11.912.000.000,00	10.810.500.000,00	12.003.460.000,00	11.548.960.000,00	30.737.100.000,00	28.798.600.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	2.634.518.541,00	2.562.472.769,00	2.649.518.541,00	2.259.133.830,00	2.873.512.000,00	2.557.386.436,00	2.990.900.000,00	2.637.736.163,00	3.399.070.000,00	1.869.200.375,00	3.399.070.000,00	1.595.199.501,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	59.804.100.000,00	58.356.555.766,00	64.493.620.000,00	63.031.395.766,00	108.539.760.000,00	107.045.385.766,00	148.415.350.000,00	142.748.065.626,54	321.609.771.929,50	318.281.163.719,34	467.346.964.428,90	466.492.471.805,00
8	Belanja Tidak Terduga	307.483.649,85	183.572.000,00	402.741.195,11	336.666.584,00	1.129.000.000,00	-	994.853.578,13	-	955.621.066,62	198.000.000,00	342.440.314,77	0,00
B	Belanja Langsung	497.934.367.617,00	410.803.190.980,68	520.596.153.584,00	499.635.533.584,16	566.009.186.271,00	542.060.357.992,00	785.916.552.789,00	736.371.971.894,40	983.963.205.568,00	938.511.523.206,80	1.203.679.921.469,56	1.146.033.978.983,66
1	Belanja Pegawai	31.448.549.228,00	30.218.134.420,00	49.963.386.230,00	48.255.565.084,00	54.599.177.825,00	52.267.499.208,00	29.890.678.200,00	28.536.354.950,00	36.955.004.850,00	34.498.598.660,00	46.579.269.630,00	42.270.992.893,00
2	Belanja Barang dan Jasa	206.202.519.398,00	190.309.053.635,68	188.973.266.502,00	180.331.327.165,16	260.626.155.150,00	249.721.086.302,00	390.159.014.305,00	354.400.001.666,00	474.073.919.628,00	444.707.131.896,80	523.208.585.300,56	487.263.264.117,66
3	Belanja Modal	260.283.298.991,00	190.276.002.925,00	281.659.500.852,00	271.048.641.335,00	250.783.853.296,00	240.071.772.482,00	365.866.860.284,00	353.435.615.278,40	472.934.281.090,00	459.305.792.650,00	633.892.066.539,00	616.499.721.973,00
	Jumlah Belanja	1.406.311.340.809,78	1.287.973.838.321,22	1.550.496.303.561,11	1.473.747.394.873,11	1.710.483.335.056,02	1.606.782.530.255,67	2.056.001.518.887,13	1.913.817.056.084,09	2.589.827.119.679,47	2.406.040.334.082,14	3.077.043.662.618,30	2.796.049.237.222,66

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Rencana dan Pendapatan Belanja 2016

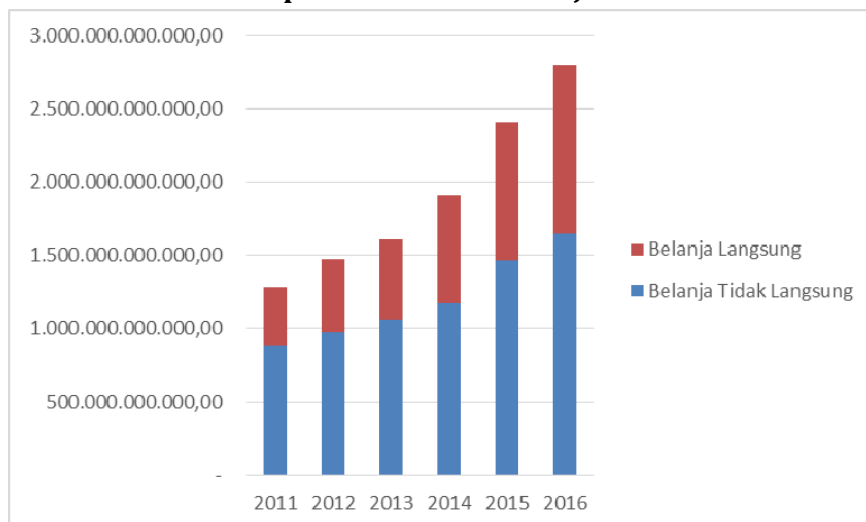
Secara garis besar alokasi dan realisasi belanja Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut :

Grafik 3.3
Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2016



Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan dan komposisi realisasi belanja daerah tahun 2011-2016 dapat dilihat seperti grafik 3.4 di bawah ini.

Grafik 3.4
Pertumbuhan dan Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2016



Dari tabel dan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Perkembangan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Lamongan selama kurung waktu 6 (enam) tahun terakhir periode 2011-2016 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 1.287.973.838.321,22, meningkat menjadi Rp 2.796.049.237.222,66 pada tahun 2016.

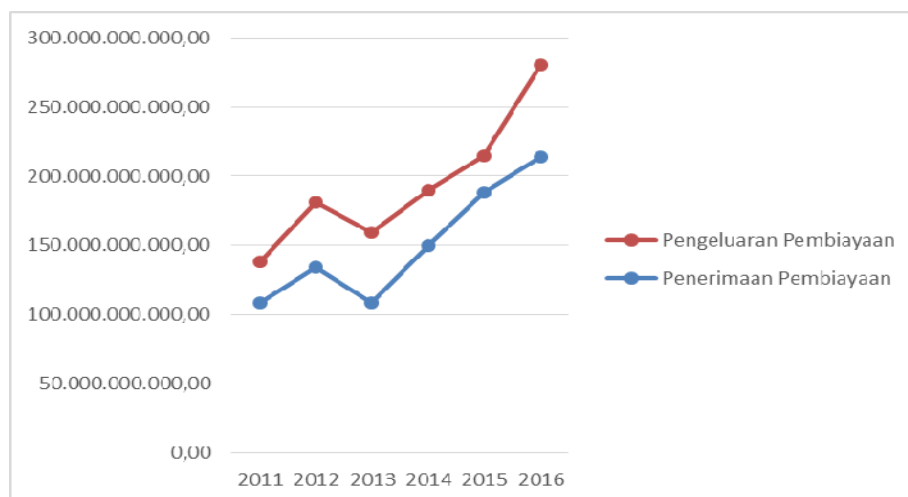
➤ **PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu untuk dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/ Dana Bergulir dan Pembayaran Pokok Utang.

Komponen pembiayaan adalah kelompok anggaran yang merupakan sarana kebijakan pemerintah dalam menyikapi fiskal yang terjadi. Dalam perjalanan anggaran maka pertumbuhan dan komposisi realisasi pembiayaan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.5 di bawah ini.

Grafik 3.5
Pertumbuhan dan Komposisi Realisasi Pembiayaan Tahun 2011-2016



Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
A	Penerimaan Pembiayaan												
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.843.861.701,85	38.843.861.701,85	111.681.362.736,11	111.681.362.736,11	86.063.877.506,02	86.063.877.506,02	125.199.484.089,01	125.199.484.089,01	165.213.664.218,80	165.213.664.218,80	189.685.381.614,62	189.685.381.614,62
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	46.500.000.000,00	46.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Piutang Daerah	23.442.526.750,00	22.947.334.950,00	21.900.000.000,00	22.666.356.950,00	21.900.000.000,00	22.291.364.000,00	24.400.000.000,00	24.400.000.000,00	22.400.000.000,00	22.670.000.000,00	24.670.000.000,00	24.400.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108.786.388.451,85	108.291.196.651,85	133.581.362.736,11	134.347.719.686,11	107.963.877.506,02	108.355.241.506,02	149.599.484.089,01	149.599.484.089,01	187.613.664.218,80	187.883.664.218,80	214.355.381.614,62	214.085.381.614,62
B	Pengeluaran Pembiayaan												
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.200.000.000,00	24.200.000.000,00	34.900.000.000,00	34.900.000.000,00	36.900.000.000,00	36.900.000.000,00	25.900.000.000,00	25.900.000.000,00	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	66.698.834.668,51	66.698.834.668,51
2	Pembayaran Pokok Utang	6.107.978.586,07	5.960.952.464,83	12.062.374.800,00	12.062.374.800,00	14.150.000.000,00	14.128.944.266,24	14.451.700.000,00	14.451.686.468,93	0,00	0,00	0,00	56160000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.307.978.586,07	30.160.952.464,83	46.962.374.800,00	46.962.374.800,00	51.050.000.000,00	51.028.944.266,24	40.351.700.000,00	40.351.686.468,93	26.900.000.000,00	26.900.000.000,00	66.698.834.668,51	66.698.834.668,51
	JUMLAH PEMBIAAYAAN NETTO	78.478.409.865,78	78.130.244.187,02	86.618.987.936,11	87.385.344.886,11	56.913.877.506,02	57.326.297.239,78	109.247.784.089,01	109.247.797.620,08	160.713.664.218,80	160.983.664.218,80	147.656.546.946,11	147.386.546.946,11

3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku sajatetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja neraca daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan bahwa aset lancar rata-rata pertumbuhannya 21,01%. Rata-rata pertumbuhan aset tetap mengalami penurunan 5,41%. Aset lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebanyak 77,93%. Rata-rata pertumbuhan aset yang tinggi tersebut juga diikuti dengan rata-rata pertumbuhan kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek menunjukkan kenaikan sebesar 55.67 persen. Sedangkan Ekuitas bersih Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2014, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2015 karena penerapan penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang.

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Asset Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
1.	ASET							
1.1.	ASET LANCAR	130.787.425.177,37	119.681.864.270,75	173.669.497.170,15	225.524.011.263,23	265.178.409.213,74	156.120.221.161,45	8,59%
1.1.1.	Kas	114.314.682.343,34	86.105.384.477,56	125.415.846.752,01	165.532.049.748,60	189.685.381.614,62	70.321.213.980,29	0,93%
1.1.2.	Piutang	6.292.544.324,73	24.024.274.308,24	39.631.020.981,69	42.653.649.507,18	59.292.938.209,55	70.537.967.543,55	82,47%
1.1.3.	Penyisihan Piutang	-	(99.928.834,05)	(5.084.584.193,55)	(98.407.543,55)	(1.779.723.348,43)	(6.018.880.693,39)	1387,37%
1.1.4.	Persediaan	10.180.198.509,30	9.652.134.319,00	13.707.213.630,00	17.436.719.551,00	17.979.812.738,00	21.279.920.331,00	17,10%
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	249.019.772.690,15	264.738.892.548,74	306.414.356.873,71	485.930.995.554,00	524.842.626.244,93	758.879.219.932,84	26,65%
	Investasi Jangka Panjang	249.019.772.690,15	264.738.892.548,74	306.414.356.873,71	485.930.995.554,00	524.842.626.244,93	758.879.219.932,84	26,65%
1.2.	ASET TETAP	3.370.171.618.865,00	2.903.625.532.706,00	3.146.360.985.975,80	3.490.157.962.494,40	2.535.501.130.197,23	2.913.060.499.904,34	-1,40%
1.2.1.	Tanah	1.472.874.682.851,00	755.013.941.255,00	763.610.724.751,00	753.210.228.451,00	754.284.768.700,00	775.052.848.900,00	-9,21%
1.2.2.	Peralatan dan mesin	269.948.639.229,00	325.001.483.641,00	367.572.893.274,00	425.086.776.386,00	508.437.489.216,00	622.365.499.322,33	18,23%
1.2.3.	Gedung dan bangunan	552.110.388.697,00	632.342.717.872,00	703.829.610.159,00	801.449.887.920,40	925.446.352.901,40	1.070.936.100.150,63	14,18%
1.2.4.	Jalan, jaringan dan instalasi	1.055.504.641.475,00	1.171.520.091.325,00	1.289.997.719.675,00	1.489.354.857.510,00	1.745.448.543.340,00	2.084.219.940.680,00	14,63%
1.2.5.	Aset tetap lainnya	19.733.266.613,00	19.747.298.613,00	19.928.428.363,00	20.668.116.777,00	25.662.595.144,00	33.179.720.047,00	11,63%
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	1.421.609.753,80	388.095.450,00	39.776.000,00	7.198.172.650,00	3586,86%
	Akumulasi Penyusutan					(1.423.818.395.104,17)	(1.679.891.781.845,62)	23,60%
1.3.	ASET LAINNYA	2.386.866.600,00	3.210.597.243,49	7.090.646.283,18	3.658.898.200,00	11.150.498.463,49	9.636.533.248,99	59,63%
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	75.716.043,49	60.300.043,49	-	99.250.043,49	95.250.043,49	15,12%
1.3.4.	Aset tak berwujud	1.489.585.300,00	2.336.581.200,00	2.839.809.200,00	3.234.458.200,00	3.518.704.200,00	1.442.534.652,50	8,42%
1.3.5.	Aset Lain-lain	897.281.300,00	798.300.000,00	4.190.537.039,69	424.440.000,00	7.532.544.220,00	8.098.748.553,00	401,25%
	JUMLAH ASET DAERAH	3.752.365.683.332,52	3.291.256.886.768,98	3.633.535.486.302,84	4.205.271.867.511,63	3.336.672.664.119,39	3.837.696.474.247,62	1,64%

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
2.	KEWAJIBAN							
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.507.722.835,49	18.024.256.772,72	18.286.620.529,20	2.341.335.768,00	8.530.452.428,00	13.894.932.295,55	44,54%
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	56.160.000,00	56.160.000,00		20,00%
2.1.3	Bagian Lancar Utang DN Pemerintah Pusat	41.583.200,00	-	-	-	-		-20,00%
2.1.4	Pendapatan diterima di muka	-	-	-	-	40.583.000,00	1.403.265.241,42	20,00%
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.466.139.635,49	18.024.256.772,72	18.286.620.529,20	2.285.175.768,00	-	8.858.500,00	-28,29%
2.1.6	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	8.433.709.428,00	12.482.808.554,13	20,00%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	28.132.282.699,68	14.451.686.468,93	-	-	-		-29,73%
	JUMLAH KEWAJIBAN	40.640.005.535,17	32.475.943.241,65	18.286.620.529,20	2.341.335.768,00	8.530.452.428,00	13.894.932.295,55	22,67%
3.	EKUITAS DANA							0,00%
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	118.279.702.341,88	101.757.536.332,08	160.467.460.534,70	223.182.675.495,23	-		-3,44%
3.1.1.	SILPA	111.683.339.934,11	86.063.877.506,02	125.199.484.089,01	165.213.664.218,80	-		-9,10%
3.1.2.	Cadangan piutang	6.292.544.324,73	24.024.274.308,24	39.631.020.981,69	42.555.241.963,63	-		50,83%
3.1.3.	Cadangan persediaan	10.180.198.509,30	9.652.134.319,00	13.707.213.630,00	17.436.719.551,00	-		-7,19%
3.1.4.	Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(12.507.722.835,49)	(18.024.256.772,72)	(18.286.620.529,00)	(2.341.335.768,00)	-		-28,33%
3.1.5	Pendapatan yang ditangguhkan	2.631.342.409,23	41.506.971,54	216.362.363,00	318.385.529,80	-		54,00%
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	3.621.578.258.155,15	3.173.550.022.498,23	3.456.965.879.888,40	3.979.747.856.248,47	3.328.142.211.691,39	3.819.996.757.448,07	-0,94%
3.2.1.	Diinvestasikan dalam asset tetap	3.370.171.618.865,00	2.903.625.532.706,00	3.146.360.985.975,00	3.490.157.962.494,40	3.328.142.211.691,39	3.819.996.757.448,07	-18,91%
3.2.2.	Diinvestasikan dalam asset lainnya	2.386.866.600,00	5.185.597.243,49	4.190.537.039,69	3.658.898.200,00	-		-2,92%
3.2.3.	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	249.019.772.690,15	264.738.892.548,74	306.414.356.873,71	485.930.995.554,07	-		-3,87%
	JUMLAH EKUITAS DANA	3.739.857.960.497,03	3.275.307.558.830,31	3.617.433.340.423,10	4.202.930.531.743,70	3.328.142.211.691,39	3.819.996.757.448,07	-1,32%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.780.497.966.032,20	3.307.783.502.071,96	3.635.719.960.952,30	4.205.271.867.511,70	3.336.672.664.119,39	3.833.891.689.743,62	-1,52%

Sumber: BPKAD Kab. Lamongan Tahun 2016

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2011-2015, rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami penurunan sebanyak 1,65% setiap tahunnya.

Aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 21,01 %. Pertumbuhan aset lancar ini berasal dari kas, piutang, dan persediaan. Kontribusi yang dominan berasal dari kas. Sedangkan untuk aset tetap, rata-rata pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 5,48%. Aset tetap tersebut berupa tanah, gedung, peralatan, jalan, bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kinerja peningkatan asset daerah tidak hanya dari penambahan atau mutasi asset hasil pembelian tiap tahun tetapi juga dari hasil identifikasi aset daerah yang belum memiliki legalitas, sehingga belum dapat dimasukkan dalam neraca daerah. Aset lainnya mengalami rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebanyak 77,93%. Aset lainnya ini berasal dari tagihan penjualan, tagihan ganti rugi daerah, kemitraan, aset tak berwujud, dan aset lainnya.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2015) berasal dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan tiap tahun kewajiban jangka pendek yang paling tinggi yaitu sebesar 55,68%. Sedangkan pertumbuhan kewajiban jangka panjang mengalami penurunan sebesar 37,16% dan mulai tahun 2013-2015 tidak terdapat kewajiban jangka panjang. Rata-rata kewajiban ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu tersebut belum optimal dalam melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi.

Total Ekuitas dana ini merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana lancar Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,30% begitu juga ekuitas dana investasi juga mengalami penurunan sebesar 22,08%.

3.1.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Dengan semakin bertambah jumlah pegawai di Kabupaten Lamongan, maka berakibat pada proporsi belanja tidak langsung yang semakin besar apabila dibandingkan

dengan belanja langsung. Proporsi belanja pemenuhan aparatur tersaji dalam tabel berikut.

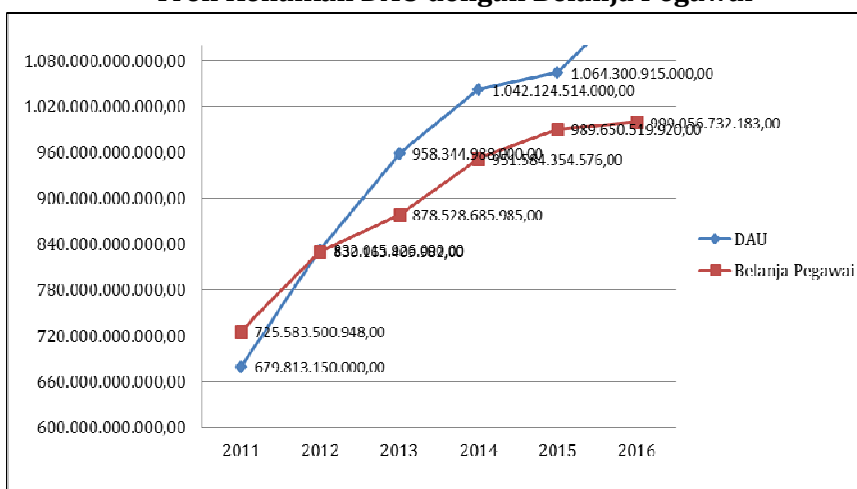
Tabel 3.8
Tren Realisasi DAU dengan Belanja Pegawai Tahun 2011-2016

No.	Tahun Anggaran	DAU	Belanja Pegawai
1	2011	679.813.150.000,00	725.583.500.948,00
2	2012	832.015.926.000,00	830.163.409.982,00
3	2013	958.344.988.000,00	878.528.685.985,00
4	2014	1.042.124.514.000,00	951.584.354.576,00
5	2015	1.064.300.915.000,00	989.650.519.920,00
6	2016	1.166.655.654.000,00	999.056.732.183,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Perbup Kab Lamongan 2016

Adapun untuk grafik tren kenaikan DAU dan Belanja Pegawai bisa kita lihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.6
Tren Kenaikan DAU dengan Belanja Pegawai

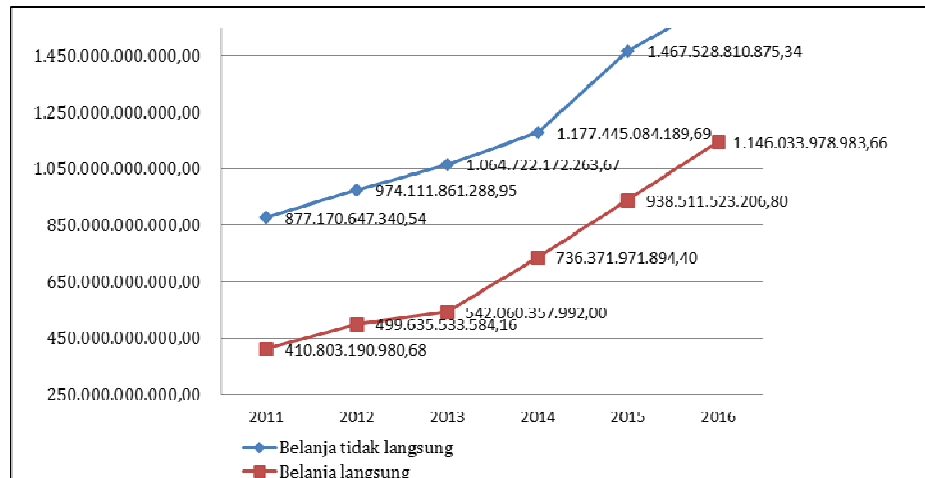


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa selisih DAU yang digunakan untuk membiayai belanja langsung mulai tahun 2011-2016 sudah mulai menyempit, hal itu bisa dilihat dari celah grafik garis di atas. Apabila tren kedua garis ternyata masih sejajar, artinya kenaikan belanja pegawai selalu diikuti kenaikan DAU minimal sama. Apabila tren kedua garis di atas mengarah pada satu titik, maka artinya suatu saat bertemu berarti semua DAU digunakan untuk belanja pegawai. Apabila diteruskan suatu saat dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah kabupaten akan kesulitan dalam pembiayaan pembangunan. Perkembangan proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak

langsung terhadap total belanja pada periode tahun 2011-2016 serta tersaji dalam grafik berikut.

Grafik 3.7
Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 2011-2016



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

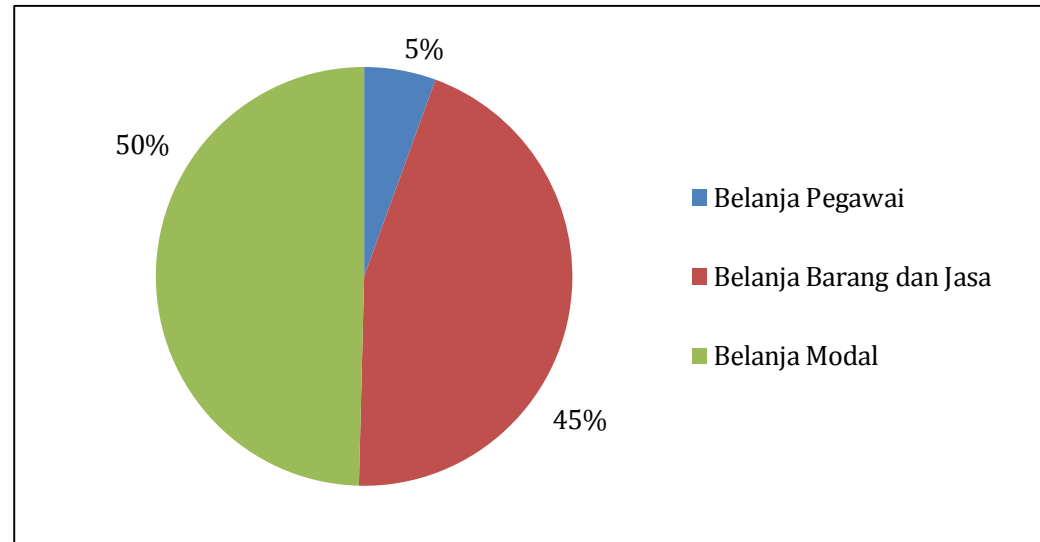
Pada komponen belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung didominasi oleh belanja modal dengan rata-rata sebesar 50%. Urutan selanjutnya belanja barang dan jasa sebesar 45% dan 5% belanja pegawai. Adapun proporsi masing-masing komponen belanja langsung terhadap total belanja langsung dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.9
Proporsi Komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

No	Uraian Belanja Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Belanja Tidak Langsung	<u>877.170.647.340,54</u>	<u>974.111.861.288,95</u>	<u>1.064.722.172.263,67</u>	<u>1.177.445.084.189,69</u>	<u>1.467.528.810.875,34</u>	<u>1.650.015.258.239,00</u>
1	Belanja Pegawai	725.583.500.948,00	830.163.409.982,00	878.528.685.985,00	951.584.354.576,00	989.650.519.920,00	1.041.327.725.076,00
2	Belanja Bunga	2.654.206.530,91	3.205.861.172,95	2.006.201.715,67	640.804.648,15	0,00	
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja Hibah	65.419.651.326,63	46.585.113.954,00	49.742.064.061,00	69.023.623.176,00	145.980.966.861,00	111.801.261.857,00
5	Belanja Bantuan Sosial	22.410.688.000,00	28.530.280.000,00	24.842.448.300,00	10.810.500.000,00	11.548.960.000,00	28.798.600.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	2.562.472.769,00	2.259.133.830,00	2.557.386.436,00	2.637.736.163,00	1.869.200.375,00	1.595.199.501,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	58.356.555.766,00	63.031.395.766,00	107.045.385.766,00	142.748.065.626,54	318.281.163.719,34	466.492.471.805,00
8	Belanja Tidak Terduga	183.572.000,00	336.666.584,00	0,00	0,00	198.000.000,00	0,00
B	Belanja Langsung	<u>410.803.190.980,68</u>	<u>499.635.533.584,16</u>	<u>542.060.357.992,00</u>	<u>736.371.971.894,40</u>	<u>938.511.523.206,80</u>	<u>1.146.033.978.983,66</u>
1	Belanja Pegawai	30.218.134.420,00	48.255.565.084,00	52.267.499.208,00	28.536.354.950,00	34.498.598.660,00	42.270.992.893,00
2	Belanja Barang dan Jasa	190.309.053.635,68	180.331.327.165,16	249.721.086.302,00	354.400.001.666,00	444.707.131.896,80	487.263.264.117,66
3	Belanja Modal	190.276.002.925,00	271.048.641.335,00	240.071.772.482,00	353.435.615.278,40	459.305.792.650,00	616.499.721.973,00
	Jumlah Belanja	<u>1.287.973.838.321,22</u>	<u>1.473.747.394.873,11</u>	<u>1.606.782.530.255,67</u>	<u>1.913.817.056.084,09</u>	<u>2.406.040.334.082,14</u>	<u>2.796.049.237.222,66</u>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

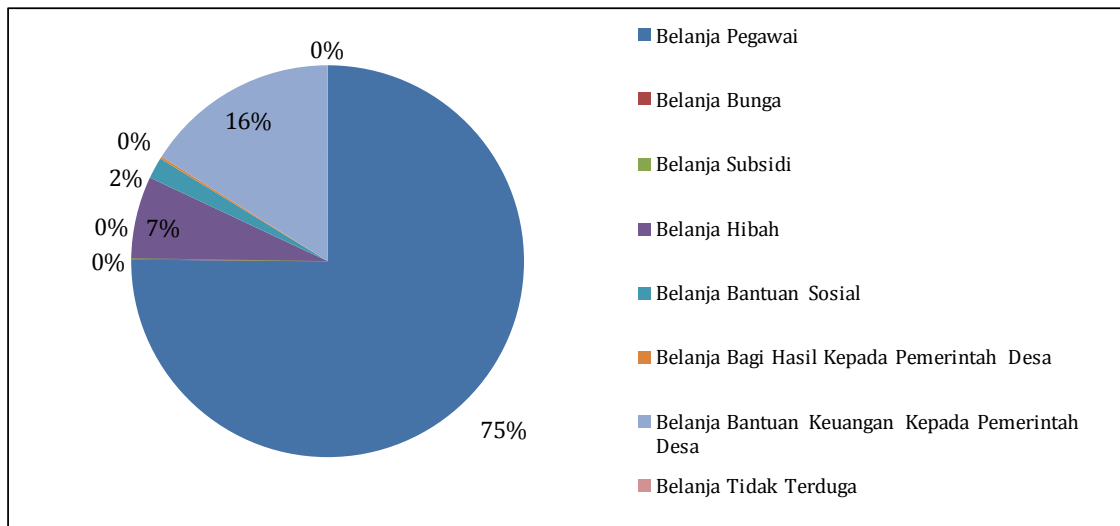
Grafik 3.8
Proporsi Komponen Belanja Langsung Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015



Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016*

Pada komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Dalam lima tahun terakhir (2011-2016), proporsi terbesar adalah pada belanja pegawai yaitu 75%. Kemudian belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar 16%, belanja hibah 7% serta belanja bantuan sosial sebesar 2%.

Grafik 3.9
Proporsi Komponen Tidak Langsung Tahun 2011-2016



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan

Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, melalui;
 - a. Koordinasi yang intensif dengan SKPD dan instansi terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan serta penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Beberapa upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pendapatan daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal, sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat;
 - c. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang, mulai dari tingkat bawah sampai atas, dalam pemungutan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, serta penerapan sanksi yang efektif bagi wajib pajak maupun wajib retribusi yang melanggar aturan;
 - e. Meningkatkan pengendalian terhadap data base potensi pajak dan retribusi dengan melakukan pembentukan tim intensifikasi PAD, melakukan pemeliharaan dan update data wajib pajak/retribusi daerah dan pendataan bagi wajib pajak/wajib retribusi baru, dan Memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah
 - f. Mengoptimalkan kinerja BUMD/Perusahaan Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 - g. Mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disesuaikan seiring dengan perkembangan peraturan dan pembangunan, agar dalam pelaksanaannya lebih efisien dan efektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip

- keadilan dan memperhatikan kemampuan masyarakat wajib pajak daerah maupun wajib retribusi daerah;
- h. Memberikan insentif kepada instansi pemungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Melakukan penertiban atau penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memberikan teguran secara lisan dan tertulis pada wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak kooperatif;
 - j. Melakukan secara intensif pendataan aset daerah dan legalisasi kepemilikan aset daerah, guna tertib administrasi aset daerah dan sebagai dasar pemanfaatan aset daerah;
 - k. Mengintensifkan pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal (*idle*) untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
2. Melakukan persiapan secara bertahap, baik dari sisi sarana dan prasarana, sumberdaya manusia maupun kelembagaan, terkait dengan pendaerahan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun 2014;
 3. Meningkatkan koordinasi, informasi dan pelaporan pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat, sehingga diperoleh dana perimbangan maupun dana lain sesuai kebutuhan daerah;
 4. Melakukan kerjasama dengan investor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka membuka lapangan kerja yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap penganggaran harus berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pemenuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja daerah diarahkan pada:

1. Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah;

2. Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
3. Menjamin ketersediaan pendanaan, khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
4. Meminimalkan resiko fiskal, sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
5. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan kemampuan pendanaan untuk memenuhi pengeluaran daerah, baik berupa belanja maupun pembiayaan. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2011-2015 dapat dijelaskan antara lain:

- a. Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 17,07 persen. Pertumbuhan yang tinggi disebabkan karena belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
- b. Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung pada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat sebesar 13,89 persen. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja tidak langsung dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni unsur belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang mencapai 58,54 persen meskipun nominal terbesar diantara semua unsur belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai.
- c. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung pada pengeluaran periodik dan pengeluaran yang wajib dan mengikat sebesar 23,35 persen. Peningkatan terjadi di semua unsur belanja langsung dengan pertumbuhan rata-rata paling tinggi yakni unsur belanja modal sebesar 27,05 persen diantara unsur-unsur yang lain. Selain itu belanja barang dan jasa rata-rata pertumbuhannya sebesar 25,16 persen.

Apabila dianalisis lebih lanjut dari sisi jenis belanja, kontribusi rata-rata terbesar belanja daerah selama tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2015 masih ada pada belanja tidak langsung. Dari total belanja tidak langsung dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dan penurunan. Belanja tidak langsung pada tahun 2011 mencapai Rp 877.170.647.340,54 atau sebesar 68,11 persen dari total belanja. Pada tahun 2012 total belanja tidak langsung sebesar 66,10 persen dari total belanja. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 66,26 persen dari total belanja. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 61,52 persen dan tahun 2015 sebesar 60,99 persen dari total belanja.

Hal ini menunjukkan komposisi yang kurang ideal, mengingat belanja tidak langsung masih menempati porsi yang cukup besar jika dibandingkan dengan belanja langsung. Kondisi ideal yang diharapkan adalah belanja langsung (terutama yang bermanfaat langsung bagi publik) yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Meskipun dalam komponen belanja tidak langsung, selain belanja pegawai terdapat belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang merupakan kerangka regulasi daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, namun persentasenya tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai. Pelaksanaan kegiatan dalam belanja hibah dan belanja bantuan sosial adalah oleh kelompok masyarakat, sehingga kemanfaatan atas hasil

kegiatan tentunya secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama dapat tersaji pada tabel berikut

Tabel 3.10
Perkembangan Pengeluaran Periodik Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
Belanja Tidak Langsung	877.170.647.340,54	974.111.861.288,95	1.064.722.172.263,67	1.177.445.084.189,69	1.467.528.810.875,34	1.650.015.258.239,00	12,16%
Belanja Pegawai	725.583.500.948,00	830.163.409.982,00	878.528.685.985,00	951.584.354.576,00	989.650.519.920,00	1.041.327.725.076,00	7,56%
Belanja Bunga	2.654.206.530,91	3.205.861.172,95	2.006.201.715,67	640.804.648,15	-	-	-36,94%
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	65.419.651.326,63	46.585.113.954,00	49.742.064.061,00	69.023.623.176,00	145.980.966.861,00	111.801.261.857,00	20,97%
Belanja Bantuan Sosial	22.410.688.000,00	28.530.280.000,00	24.842.448.300,00	10.810.500.000,00	11.548.960.000,00	28.798.600.000,00	22,82%
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	2.562.472.769,00 58.356.555.766,00	2.259.133.830,00 63.031.395.766,00	2.557.386.436,00 107.045.385.766,00	2.637.736.163,00 142.748.065.626,54	1.869.200.375,00 318.281.163.719,34	1.595.199.501,00 466.492.471.805,00	-7,86% 56,15%
Belanja Tidak Terduga	183.572.000,00	336.666.584,00	-	-	198.000.000,00	0,00	-3,32%
Belanja Langsung	410.803.190.980,68	499.635.533.584,16	542.060.357.992,00	736.371.971.894,40	938.511.523.206,80	1.146.033.978.983,66	23,10%
Belanja Pegawai	30.218.134.420,00	48.255.565.084,00	52.267.499.208,00	28.536.354.950,00	34.498.598.660,00	42.270.992.893,00	13,20%
Belanja Barang dan Jasa	190.309.053.635,68	180.331.327.165,16	249.721.086.302,00	354.400.001.666,00	444.707.131.896,80	487.263.264.117,66	22,04%
Belanja Modal	190.276.002.925,00	271.048.641.335,00	240.071.772.482,00	353.435.615.278,40	459.305.792.650,00	616.499.721.973,00	28,48%
Jumlah Belanja Daerah	1.287.973.838.321,22	1.473.747.394.873,11	1.606.782.530.255,67	1.913.817.056.084,09	2.406.040.334.082,14	2.796.049.237.222,66	16,90%
Surplus/(Defisit)	33.551.118.576,09	(1.321.537.380,09)	67.873.186.849,23	55.965.866.598,72	30.050.629.184,82	(77.018.031.465,82)	-1152,00%
PEMBIAYAAN PENGELUARAN	30.160.952.464,83	46.962.374.800,00	51.028.944.266,24	40.351.686.468,93	26.900.000.000,00	66.754.994.668,51	31,65%
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	24.200.000.000,00	34.900.000.000,00	36.900.000.000,00	25.900.000.000,00	26.900.000.000,00	66.698.834.668,51	34,39%
Pembayaran pokok utang	5.960.952.464,83	12.062.374.800,00	14.128.944.266,24	14.451.686.468,93	-	56.160.000,00	4,35%
Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	
Total pengeluaran (belanja+ pembiayaan pengeluaran)	1.318.134.790.786,05	1.520.709.769.673,11	1.657.811.474.521,91	1.954.168.742.553,02	2.432.940.334.082,14	2.862.804.231.891,17	16,89%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan pada umumnya diarahkan untuk memanfaatkan surplus APBD dan mengatasi apabila terjadi defisit anggaran. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Sedangkan untuk perkembangan defisit APBD setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 bisa kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Perkembangan Defisit APBD dan Realisasinya Tahun 2011-2016

Tahun	Surplus/(Defisit) APBD	Realisasi Surplus/(Defisit) APBD
2011	(78,478,409,865.78)	(33,551,118,576.09)
2012	(86,618,987,936.11)	(1,321,467,380.09)
2013	(56,913,877,506.02)	67,873,186,849.23
2014	(109,247,784,089.01)	55,965,866,598.72
2015	(160,713,664,218.80)	28,701,717,398.82
2016	(147.600.386.946,11)	(77.018.031.465,82)

Sumber: Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah akan difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Adapun beberapa langkah yang perlu diupayakan diantaranya adalah:

1. Mensinergikan alokasi belanja dari berbagai sumberdana pembiayaan program dan kegiatan, agar semaksimal mungkin dapat mendukung pencapaian target yang ditetapkan pemerintah pusat pada masing-masing urusan;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan belanja hibah agar kemampuan keuangan yang ada semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan;
3. Penyusunan anggaran belanja daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan harus didasarkan pada asas manfaat dan data capaian kinerja.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah

dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam rangka menjamin konsistensi tersebut, maka penyusunan RPJMD 2016 – 2021 harus menerapkan penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*), berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dan terpadu (*Unified Budgeting*).

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Secara garis besar arah kebijakan pendapatan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Pendapatan Asli Daerah

1. Intensifikasi Pajak/Retribusi

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b. Optimasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja; serta
- f. Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat.

2. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi

Ekstensifikasi Pajak/Retribusi terutama diarahkan untuk memperluas basis pajak/retribusi, yang dicapai melalui:

- a. Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
- b. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;
- c. Pengkajian mekanisme pajak/retribusi untuk target group baru; serta

- d. Peningkatan bagi hasil pajak.
3. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif melalui peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi.

➤ **Dana Perimbangan**

Sistem perhitungan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan mengandung diskresi yang besar terkait kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Oleh karenanya kendati formula dasarnya telah ada namun pemerintah daerah tetap sulit untuk melakukan simulasi perhitungan yang riil sebagai dasar dalam menyusun proyeksi penerimaannya.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK.

➤ **Lain - Lain Pendapatan Yang Sah**

Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.

➤ **Belanja Tidak Langsung**

Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan 2021 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dimana hal ini terkait dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berdampak kenaikan yang cukup signifikan terhadap pendanaan untuk Pemerintah Desa, baik yang bersumber dari APBD dan APBN.

Sedangkan untuk kebijakan belanja hibah akan selalu ditingkatkan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang didasarkan bahwa pemberian hibah disamping harus diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lamongan, guna tertib administrasi dan akuntabilitasnya, maka penerima hibah harus memiliki badan hukum Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat *block grant*, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja hibah dan belanja sosial di bidang pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan belanja tidak langsung dalam lima tahun kedepan.

➤ **Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Pemerintah Kabupaten Lamongan, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa.

Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing–masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

➤ **Penerimaan Pembiayaan**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain

bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 5 tahun ke depan, tetap akan menghindari penerimaan pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Daerah sehingga lebih ditekankan kepada pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu dan Penerimaan dari hasil pengelolaan dana bergulir.

➤ **Pengeluaran Pembiayaan**

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran untuk memberikan dukungan kepada pelaksanaan program ekonomi kerakyatan, dengan memberikan pembiayaan dana bergulir yakni kepada kelompok petani, peternak, petembak, nelayan, pengusaha kecil, menengah dan mikro, serta penguatan lumbung pangan yang bersifat penyertaan modal non permanen. Sedangkan untuk penyertaan modal permanen, Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan melalui pengeluaran pembiayaan akan tetap mendukung peranan BUMD dengan memberikan penyertaan modal yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai dengan komitmen sebagaimana yang ditentukan di dalam Peraturan Daerah.

Pada tabel 3.14 menunjukkan gambaran proyeksi pembiayaan sampai dengan tahun 2021, dimana pertumbuhannya stagnan baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SILPA) diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian di tahun-tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan.

Berikut ini gambaran proyeksi pendapatan daerah; belanja daerah dan pembiayaan untuk lima tahun ke depan:

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	2.777.891.879.236,30	2.753.627.477.047,55	2.912.411.796.575,13	3.082.324.217.542,85	3.264.260.664.448,29	4,16%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	436.519.037.265,60	369.565.656.000,00	393.812.573.000,00	419.829.972.000,00	447.760.880.000,00	1,12%
1.1.1.	Pajak Daerah	137.746.655.660,00	102.887.447.000,00	113.176.191.000,00	124.493.810.000,00	136.943.191.000,00	1,17%
1.1.2.	Retribusi Daerah	32.367.703.444,00	31.213.217.000,00	33.398.142.000,00	35.736.011.000,00	38.237.531.000,00	4,36%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	23.069.399.443,30	23.540.396.000,00	24.717.415.000,00	25.953.285.000,00	27.250.949.000,00	4,26%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	243.335.278.718,00	211.924.596.000,00	222.520.825.000,00	233.646.866.000,00	245.329.209.000,00	0,52%
1.2.	Dana Perimbangan	1.679.944.134.011,00	1.750.496.736.431,55	1.824.308.076.887,53	1.901.535.714.438,99	1.982.344.978.542,17	4,22%
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	85.629.392.011,00	89.910.861.611,55	94.406.404.692,13	99.126.724.926,73	104.083.061.173,07	5,00%
1.2.2.	Dana alokasi umum	1.146.161.266.000,00	1.203.469.329.300,00	1.263.642.795.765,00	1.326.824.935.553,25	1.393.166.182.330,91	5,00%
1.2.3.	Dana alokasi khusus	448.153.476.000,00	457.116.545.520,00	466.258.876.430,40	475.584.053.959,01	485.095.735.038,19	2,00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	661.428.707.960,00	633.565.084.616,00	694.291.146.687,60	760.958.531.103,86	834.154.805.906,12	6,15%
1.3.1.	Hibah	83.182.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi	135.687.000.560,00	149.255.700.616,00	164.181.270.677,60	180.599.397.745,36	198.659.337.519,90	10,00%
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	392.498.316.000,00	431.748.147.600,00	474.922.962.360,00	522.415.258.596,00	574.656.784.455,60	10,00%
1.3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	50.012.900.000,00	52.513.545.000,00	55.139.222.250,00	57.896.183.362,50	60.790.992.530,63	5,00%
1.3.5.	Dana Bagi Hasil Restribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.691.400,00	47.691.400,00	47.691.400,00	47.691.400,00	47.691.400,00	0,00%

Sumber: Bappeda, BPKAD (Data Diolah) 2017

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
Belanja Langsung	990.794.565.334,00	1.134.235.749.408,03	1.201.896.023.840,97	1.273.705.706.082,94	1.349.925.914.110,51	8,10%
Belanja Tidak Langsung	1.677.764.538.452,89	1.951.434.345.743,23	2.057.083.631.981,78	2.168.674.402.792,62	2.286.552.671.535,61	8,15%
Belanja Daerah	2.839.704.234.716,89	3.085.670.095.151,25	3.258.979.655.822,75	3.442.380.108.875,57	3.636.478.585.646,11	6,39%

Tabel 3.14
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021		Rata-rata Pertumbuhan
Penerimaan Pembiayaan	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	0,00%	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	26.400.000.000,00	0,00%	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	52.800.000.000,00	52.800.000.000,00	52.800.000.000,00	52.800.000.000,00	52.800.000.000,00	0,00%	0,00
SILPA	23.299.630.363,30	19.452.413.499,27	23.677.071.058,06	26.543.090.966,09	27.757.982.849,82	4,58%	4,34

Mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan pada tiap objek dalam komponen pendapatan, kondisi perekonomian global maupun lokal serta pelbagai kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat terkait dana perimbangan, pelbagai indikator teknis maupun fundamental perekonomian nasional yang berpengaruh dengan munculnya sentimen negatif maupun positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kondusifitas dan pelbagai faktor lainnya dalam diproyeksikan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lamongan selama lima tahun kedepan, pendapatan daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 5.79%. Dari tahun 2017 jumlah pendapatan sebesar Rp 2.777.891.879.236,60 dan diakhir proyeksi di tahun 2021 menjadi Rp 3.436.506.160.827,49

Estimasi belanja daerah diproyeksikan sesuai dengan kebutuhan pendanaan program-program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Proyeksi selama lima tahun kedepan, belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar 6.39%. Dari tahun 2017 jumlah belanja langsung sebesar Rp 990.794.565.334 dan diakhir proyeksi di tahun 2021 menjadi Rp 1.349.925.914.110,51 dan dari tahun 2017 jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp 1.677.764.538.452,89 dan diakhir proyeksi di tahun 2021 menjadi Rp. 2.286.552.671.535,61

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan Pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Dengan demikian, kapasitas riil keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.15

Tabel 3.15
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016 - 2021

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
Prioritas I	27,8	789.393.934.893,84	27,1	836.520.752.807,00	27,2	886.461.041.749,58	27,3	939.382.765.942,03	27,4	995.463.917.068,77
Prioritas II	15,0	425.058.272.635,15	14,6	450.434.251.511,46	14,6	477.325.176.326,70	14,7	505.821.489.353,40	14,7	536.019.032.267,80
Prioritas III	57,2	1.625.252.027.187,91	58,3	1.798.715.090.832,78	58,2	1.895.193.437.212,47	58,0	1.997.175.853.580,14	57,9	2.104.995.636.309,54
Total	100	2.839.704.234.716,89	100	3.085.670.095.151,25	100	3.258.979.655.288,75	100	3.442.380.108.875,57	100	3.636.478.585.646,11

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017-2021**

No	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	2.777.891.879.236,60	2.866.623.436.118,87	2.956.013.257.208,86	3.048.703.145.665,51	3.144.841.529.672,73
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Total penerimaan	2.787.891.879.236,60	2.876.623.436.118,87	2.966.013.257.208,86	3.058.703.145.665,51	3.154.841.529.672,73
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2.432.940.334.082,14	2.434.156.804.249,18	2.435.373.882.651,31	2.436.591.569.592,63	2.437.809.865.377,43
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	354.951.545.154,46	442.466.631.869,69	530.639.374.557,55	622.111.576.072,88	717.031.664.295,30



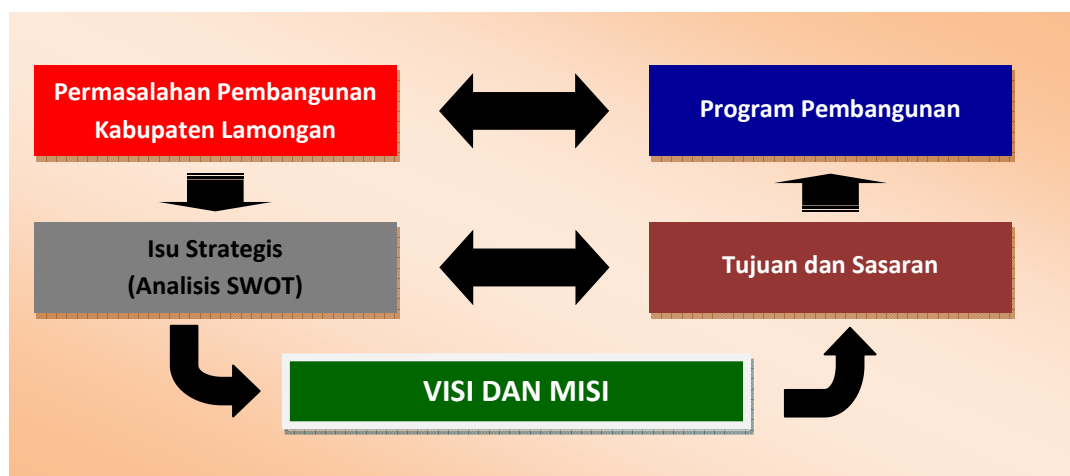
BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perubahan merupakan hal penting dalam rangka menentukan visi dan misi kedepannya. Penentuan isu strategis dilandasi oleh permasalahan-permasalahan yang berkembang di lapangan. Selanjutnya identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan. Ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program pembangunan daerah secara keseluruhan.

Oleh karena itu isu-isu strategis diawali dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Lamongan. Permasalahan pembangunan tersebut akan disandingkan dengan kajian terhadap lingkungan eksternal. Analisis yang baik terhadap dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, akan membantu pemerintah daerah mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Gambar 4.1
Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Visi Misi



4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Lamongan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa

permasalahan yang menjadi beban dan tantangan yang harus dituntaskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil survei dan pemetaan, secara umum permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan Pembangunan
1	<p data-bbox="407 478 824 518">Urusan Wajib Pelayanan Dasar</p> <p data-bbox="407 518 565 559">Pendidikan</p> <p data-bbox="407 559 1385 720">Pendidikan adalah salah satu pondasi dalam menopang kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan menjadi bagian penting dari sasaran pembangunan, sehingga pemerintah daerah menaruh perhatian yang serius terhadap permasalahan ini.</p> <p data-bbox="407 720 1385 787">Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :</p> <ol data-bbox="407 787 1385 1580" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="407 787 1385 908">1. Belum meratanya kualitas pendidikan, terutama disebabkan distribusi tenaga pendidik/guru yang tidak merata dan kurangnya tenaga administrasi di lembaga sekolah. <li data-bbox="407 908 1385 1069">2. Permasalahan terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas dan mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi dikarenakan beberapa hal, misalnya karena usia bangunan yang sudah tua, bencana alam dan sebagainya. <li data-bbox="407 1069 1385 1311">3. Permasalahan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di Kabupaten Lamongan, perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam upaya meningkatkan daya saing sumberdaya manusia. <li data-bbox="407 1311 1385 1580">4. Menurunnya jumlah penduduk usia sekolah dan semakin banyaknya sekolah-sekolah unggulan atau favorit yang diselenggarakan pemerintah maupun swadaya masyarakat, sementara itu disisi lain dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat membuka kesempatan kepada orang tua peserta didik menyekolahkan anaknya di sekolah yang dinilai lebih berkualitas tidak terbatas di lingkungan daerahnya sendiri, sehingga beberapa sekolah tertentu kekurangan murid.
	<p data-bbox="407 1580 565 1620">Kesehatan</p> <p data-bbox="407 1620 1385 1741">Bidang kesehatan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas SDM yang baik akan menunjang peningkatan daya saing daerah di masa yang akan datang.</p> <p data-bbox="407 1741 1385 1809">Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :</p> <ol data-bbox="407 1809 1385 2171" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="407 1809 1385 1903">1. Masih tingginya / meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) <li data-bbox="407 1903 1385 1943">2. Masih tingginya penderita yang datang ke layanan dalam kondisi AIDS. <li data-bbox="407 1943 1385 2104">3. Masih tingginya penderita DBD di masyarakat yang disebabkan masih rendah kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan dan belum optimalnya Gerakan Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat masih belum optimal. <li data-bbox="407 2104 1385 2145">4. Masih tingginya kasus Tuberkolusis (TB) <li data-bbox="407 2145 1385 2171">5. Ketersediaan tenaga medis terutama Dokter Spesialis masih terbatas,

	<p>sehingga pelayanan spesialis masih belum optimal.</p> <p>6 Kekurangan sarana prasarana (peralatan kedokteran sesuai standar Rumah Sakit kelas B dan perkembangan IPTEK)</p> <p>7 Belum meratanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan. Meski jumlah fasilitas kesehatan sudah terdistribusi diseluruh wilayah kecamatan, tetapi sebagian masyarakat masih mengeluhkan minimnya peralatan yang dimiliki.</p> <p>8 Percepatan pemulihan penderita gizi buruk belum optimal, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pengadaan makanan tambahan.</p>
No	Permasalahan Pembangunan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turunnya kapasitas fungsi infrastruktur penampung air. Hampir sebagian besar waduk di Kabupaten Lamongan memiliki sedimentasi yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap penyediaan air baku yang di butuhkan oleh masyarakat umum maupun petani. Tingginya sedimentasi yang terjadi daerah penangkap air menyebabkan menurunnya kapasitas air baku yang ada di Kabupaten Lamongan 2. Menurunnya tingkat layanan prasarana sumber daya air. Terbatasnya jumlah saluran irigasi yang masih belum permanen/pasangan sehingga mengakibatkan tidak optimalnya layanan kebutuhan air terhadap petani 3. Keterbatasan alokasi pembiayaan penanganan infrastruktur jalan dan irigasi. Meskipun tren peningkatan jalan di Kabupaten Lamongan sangat baik, tetapi struktur tanah yang sebagian besar berupa tanah lempung/clay dengan sifat fisik yang buruk dan elastis sehingga mengakibatkan tingkat usia jalan menjadi pendek selain itu masih rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi batas maximum tonase yang diijinkan sehingga butuh alokasi pendanaan yang besar di tiap tahunnya. <p>4 Jumlah waduk dan rawa di Kabupaten Lamongan hampir sebagian besar sudah mengalami pendangkalan karena sedimentasi dan di garap secara liar untuk lahan pertanian sehingga perlu adanya normalisasi waduk dan rawa agar mempunyai tangkapan air baku seperti fungsi semula. Namun tingginya biaya yang harus dialokasikan untuk kegiatan normalisasi tersebut menjadi kendala tersendiri.</p>

No	Permasalahan Pembangunan
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni dan bersanitasi kurang layak 2. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh di perkotaan. Kabupaten Lamongan mempunyai kawasan kumuh seluas 125,66 Ha. Yang tersebar di empat kecamatan dengan tipologi berbeda - beda, untuk kumuh perkotaan di kawasan nelayan berada di (Desa Paciran dan Kelurahan Blimbing) Kecamatan Paciran dan (Desa Sedayu Lawas dan Kelurahan Brondong) Kecamatan Brondong sedangkan untuk kumuh perkotaan dikawasan perdagangan dan jasa (Desa Plaosan dan Kelurahan Babat) Kecamatan babat serta Kumuh perkotaan di kawasan tepi kota (Desa Made dan Desa Sidomukti) Kecamatan lamongan. Untuk penangan kumuh perkotaan masih bersifat parsial sehingga penurunan luas kawasan kumuh membutuhkan waktu yang lama 3. Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST dan kawasan permukiman perdesaan
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air. Jumlah cakupan layanan air bersih di Kabupaten Lamongan masih sangat rendah dikarenakan kebutuhan air bersih di Kabupaten Lamongan masih bergantung dengan air permukaan selain itu masih terbatasnya kapasitas produksi Instalasi Pengelolaan Air/IPA dan infrastruktur jaringan perpipaan
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan. Cakupan Layanan air limbah masih rendah di karenakan di Kabupaten Lamongan baru membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT di tahun 2016 dengan dana APBN dan masih minimnya jumlah Instalasi Pengelolaan Air Limbah/IPAL yang ada di permukiman. Di sisi lain belum semua rumah tangga memiliki jamban
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Belum optimalnya ketersediaan drainase lingkungan permukiman. Salah satu faktor utama penyebab banjir di permukiman adalah belum tersedianya saluran drainase yang memadai, terjadinya pendangkalan pada saluran dan penyempitan saluran yang mengakibatkan ketidak lancarannya saluran drainase permukiman dalam mengalirkan air ke saluran pembuang
	<p>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</p> <p>Secara umum urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparaturnya lainnya. Namun demikian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah yang dianggap membatasi kegiatan Warga dalam beraktifitas 2. Kurang optimalnya pelaksanaan monitoring bidang ideology, politik, ekonomi, Sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat

No	Permasalahan Pembangunan
	<p>3. Kurang optimalnya peran anggota Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lamongan</p> <p>Sosial</p> <p>Keadaan Perekonomian khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Khususnya masyarakat menengah kebawah. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar.</p> <p>Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang Sosial antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Santunan kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana masih belum memadai Disamping itu ketersediaan Sarana dan Prasarana Loka Bina Karya, LIPOSOS dan pemberdayaan generasi muda untuk panti rehabilitasi anak dan remaja terlantar 2. Belum optimalnya Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat, LSM dan PMKS yang berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan
	3. Belum optimalnya Pemberian bantuan penanggulangan bencana.
2	<p>Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar</p> <p>Tenaga Kerja</p> <p>Permasalahan Tenaga Kerja yang nampak di Kabupaten Lamongan adalah masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kompetensi daya saing, baik di sektor formal maupun informal terlebih ketika dikaitkan dengan kebijakan integrasi ekonomi dan sosial dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi. Dalam situasi yang demikian, isu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing perlu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.</p> <p>Permasalahan Tenaga Kerja yang utama adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka pengangguran 2. Minimnya peluang lapangan kerja baru serta minimnya iklim usaha yang ramah terhadap pengembangan perekonomian (baik investasi maupun pengembangan UMKM) 3. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi 4. Belum optimalnya ketersediaan Informasi Pasar Kerja
	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</p> <p>Sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam kebijakan dan program pembangunan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksanaannya. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif dan akuntabel oleh seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Permasalahan yang</p>

dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

1. Masih adanya kesenjangan – kesenjangan gender
2. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak
3. Masih dijumpainya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut wanita dan anak-anak yang belum bisa didampingi, karena kurangnya tenaga khusus yang berkompetensi

Pangan

Kebijakan ketahanan pangan menekankan akses pangan bernutrisi yang mencukupi untuk semua, yang dapat disediakan melalui produksi dari dalam negeri maupun dari impor. Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan dan 474 desa/ kelurahan serta dihuni oleh 1.354.119 jiwa. Jumlah penduduk terus tumbuh, sehingga diperlukan makanan untuk penghidupannya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang ketahanan pangan antara lain :

1. Masih adanya desa yang rawan pangan
2. Konsumsi pangan belum B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan pola konsumsinya masih tergantung pada beras
3. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ketahanan dan keamanan pangan masih rendah. Sehingga beresiko terhadap terjadinya masyarakat yang rawan pangan

Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan
2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya kawasan permukiman, industri dan kegiatan usaha lainnya
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan
4. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berkurangnya daerah tangkapan air

No	Permasalahan Pembangunan
	<p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampai saat ini belum semua penduduk Kabupaten Lamongan yang memiliki e - KTP, hal ini banyak dipengaruhi oleh keberadaan penduduk Kab. Lamongan berdomisili diluar Kabupaten/perantauan sehingga belum mengikuti perekaman data e-KTP di Kabupaten Lamongan 2. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Lamongan, terutama untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sarana dan prasarana
	<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM pada aparat desa dalam pembuatan laporan keuangan desa 2. Keterbatasan pengetahuan dan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat desa sebagai subyek pembangunan kearah kemandirian 3. Belum maksimalnya peran BUMDes sebagai kekuatan penggerak ekonomi desa
	<p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Upaya pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui Keluarga Berencana (KB). Dengan melaksanakan KB, setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera, yaitu dengan membentuk keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu program KB juga dapat meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, sehingga derajat kesehatan ibu dan anak akan membaik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan operasional pelayanan KB melalui Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) disamping itu pelaksanaan operasional pelayanan KB melalui Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM)
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum optimalnya fungsi Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) 3. Masih Tingginya Usia Kawin Muda bagi wanita 4. Masih tingginya Angka Drop-Out Kesertaan ber KB
	<p>Perhubungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya cakupan layanan angkutan darat. Rendahnya cakupan layanan angkutan darat dikarenakan masih minimnya moda transportasi umum yang ada di kabupaten lamongan

No	Permasalahan Pembangunan
	<p data-bbox="402 303 1383 344">Komunikasi dan Informatika</p> <p data-bbox="402 344 1383 774">Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan pembangunan menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat proses pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus mengikuti perkembangan teknologi. Kebijakan penggunaan teknologi informasi atau e-government telah tertuang dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Namun demikian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dibidang komunikasi dan informatika antara lain :</p> <ol data-bbox="402 774 1383 975" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="402 774 1383 854">1. Belum optimalnya pengelolaan website SKPD sehingga website beberapa SKPD kurang terupdate <li data-bbox="402 854 1383 895">2. Keterbatasan alat untuk pemeliharaan jaringan internet <li data-bbox="402 895 1383 975">3. Sistem aplikasi yang diperuntukkan SKPD belum dimanfaatkan secara maksimal/optimal oleh SKPD yang bersangkutan <p data-bbox="402 975 1383 1016">Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p data-bbox="402 1016 1383 1257">Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan terus meningkat. Pada tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak 1.006 unit dan menjadi 1.064 unit pada tahun 2015. Demikian pula untuk UMKM pada tahun 2011 sebanyak 37.941 unit menjadi 54.239 unit pada tahun 2015. Namun demikian perkembangan jumlah koperasi dan UKM juga dihadapkan pada permasalahan yang antara lain :</p> <ol data-bbox="402 1257 1383 1653" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="402 1257 1383 1459">1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 dan melibatkan 10 negara ASEAN termasuk Indonesia, tetapi belum semua UMKM di Kabupaten Lamongan siap dan mampu bersaing dalam pusran MEA tersebut, terutama dari sisi legalisasi usaha, SDM dan kualitas produk serta pemasarannya <li data-bbox="402 1459 1383 1526">2. Belum berkembangnya sentra-sentra produk unggulan UMKM di Kabupaten Lamongan <li data-bbox="402 1526 1383 1653">3. Tingkat Kualitas SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola serta anggota Koperasi yang relatif masih rendah berdampak pada tingkat kompetitif baik kelembagaan maupun usaha yang masih sangat rendah
	<p data-bbox="402 1653 1383 1693">Penanaman Modal</p> <p data-bbox="402 1693 1383 1895">Investasi di Kabupaten Lamongan terus menggeliat. Lamongan telah menjadi incaran investor untuk melakukan investasi, mengingat daerah yang selama ini menjadi lokasi investasi telah overload dan timbul permasalahan dengan buruh. Dari tahun ke tahun realisasi investasi terus meningkat, namun demikian masih ada permasalahan yang harus dicarikan solusi, antara lain:</p> <ol data-bbox="402 1895 1383 2007" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="402 1895 1383 2007">1. Besarnya minat investasi belum diikuti oleh realisasi investasi, sehingga belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

No	Permasalahan Pembangunan
	2. Infrastruktur belum mendukung, mengingat banyak jalan dan jembatan yang kondisinya masih belum lebar 3. Meningkatnya persaingan antar daerah dan negara untuk menarik investor, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan kualitas perijinan serta diringi oleh promosi investasi
	<p>Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>Program kegiatan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME berakhlak mulia, sehat cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.</p> <p>Sedangkan Keolahragaan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga bisa mengikuti perlombaan di berbagai event untuk prestasi setinggi-tingginya.</p> <p>Adapun permasalahan pokok Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lamongan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pemuda 2. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan; hasil karya dan kreatifitasnya 3. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di Kabupaten Lamongan; 4. Masih rendahnya kualitas atlit
	<p>Kebudayaan</p> <p>Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang memiliki perwujudan kebudayaan yang bermacam-macam yang tak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan sektor yang sangat prospektif dan strategis untuk dikembangkan sebagai potensi daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah khususnya dalam pengembangan kebudayaan, kesenian serta kepariwisataan yang bernuansa global sesuai kondisi yang sedang berkembang.</p> <p>Pengelolaan kekayaan budaya maupun tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Lamongan juga perlu untuk terus dipelihara sebagai bukti upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjaga warisan budaya leluhur sehingga nantinya generasi penerus khususnya di Kabupaten Lamongan dapat mengetahui sejarah daerahnya yang diharapkan mampu menanamkan rasa memiliki daerahnya tersebut.</p> <p>Kekayaan dan keragaman budaya Kabupaten Lamongan secara historis terbagi menjadi 2 (dua) wilayah sesuai karakteristik budaya dan kesenian yakni :</p>

No	Permasalahan Pembangunan
	<p>a. Wilayah Selatan yang kental dengan budaya Jawa (Mojopahit)</p> <p>b. Wilayah Utara yang sangat dominan dan monumental dengan budaya Islam (Budaya Pesisir)</p> <p>Adapun permasalahan pokok Kebudayaan di Kabupaten Lamongan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin luntarnya nilai-nilai budaya di masyarakat 2. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah 3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan; asset budaya 4. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya
	<p>Perpustakaan</p> <p>Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, budaya gemar membaca terus ditumbuhkan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Adapun permasalahan pokok Perpustakaan di Kabupaten Lamongan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas bangsa 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan 3. Belum tersedianya perpustakaan di semua wilayah (Kecamatan dan Desa) dan fasilitas umum
	<p>Kearsipan</p> <p>Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p>

No	Permasalahan Pembangunan
	<p>Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.</p> <p>Adapun permasalahan pokok Kearsipan di Kabupaten Lamongan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya tata kelola kearsipan 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola kearsipan
3	<p>Urusan Pilihan</p> <p>Kelautan dan Perikanan</p> <p>Potensi sumber daya perikanan yang ada di Lamongan meliputi perikanan tangkap laut dan tangkap perairan umum serta perikanan budidaya yang terdiri dari sawah tambak, tambak, kolam dan keramba jaring apung. Pada tahun 2015 produksi perikanan di Kabupaten Lamongan mencapai 121.915,4 ton. Produksi ini didukung oleh potensi laut, sawah tambak, tambak, kolam, rawa, waduk dan sungai seluas. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya jumlah populasi dan jenis ikan tangkapan nelayan disekitar pantai yang menyebabkan daerah penangkapan menjadi jauh sehingga memerlukan biaya operasional kapal yang tinggi 2. Adanya penurunan tingkat kualitas lingkungan dengan berkurangnya lahan tanaman mangrove serta rusaknya terumbu karang yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan 3. Kondisi infrasruktur budidaya yang masih belum layak, sehingga menghambat distribusi sarana produksi maupun pemasaran 4. Kurangnya alokasi pupuk bagi pembudidaya ikan karena pupuk bersubsidi oleh pemerintah masih belum sesuai kebutuhan pembudidaya 5. Kurangnya persediaan stok benih ikan yang tersedia pada saat musim tebar ikan 6. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah <p>Pariwisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lamongan 2. Kurang optimalnya pengembangan potensi wisata sehingga belum menjadi destinasi wisata

No	Permasalahan Pembangunan
	<p data-bbox="402 306 542 344">Pertanian</p> <p data-bbox="402 352 1385 620">Kabupaten Lamongan merupakan salah satu produsen gabah terbesar di Jawa Timur dan salah satu penyangga beras nasional. Produksi gabah pada tahun 2015 sebesar 1.028.254 ton GKG. Demikian pula untuk tanaman Buah-buahan (melon, semangka, pepaya, mangga dan blewah), palawija (jagung, kedelai dan kacang tanah serta kacang hijau) dan perkebunan (tebu dan tembakau) terus berkembang. Namun demikian capaian tersebut tidak lepas dari permasalahan antara lain :</p> <ol data-bbox="402 628 1385 1413" style="list-style-type: none"> 1. Pupuk anorganik masih banyak digunakan oleh petani, sehingga berdampak pada tingkat kesuburan tanah dan lingkungan 2. Petani masih banyak yang menggunakan peralatan tradisional, sehingga memerlukan sarana produksi yang lebih modern untuk meningkatkan produktifitas 3. Terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian terutama untuk wilayah tadah hujan, sehingga menghambat peningkatan produksi 4. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang diakibatkan oleh besarnya biaya produksi, akan tetapi pendapatan yang dihasilkan petani masih relatif belum memadai, sehingga selisih antara biaya produksi dan pendapatan relatif sempit 5. Nilai tambah produk pertanian masih rendah, hal ini dikarenakan petani/ masyarakat belum melakukan pengolahan hasil pertanian dan banyak dijual dalam kondisi bahan baku/ mentah 6. Terbatasnya Bibit ternak akibat dari belum intensif pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) 7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemotongan sapi betina produktif 8. Belum maksimalnya pengawasan produk pangan asal hewan (daging dan telur)
	<p data-bbox="402 1413 586 1451">Perdagangan</p> <p data-bbox="402 1459 1385 1768">Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu penyumbang pada PDRB. Usaha perdagangan terus berkembang hal ini didukung oleh banyak berdirinya toko-toko, swalayan, rumah toko (ruko), pedagang kaki lima dan meningkatnya pasar tradisional. Peningkatan lapangan usaha ini terutama pada wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi yang baru misalnya ibukota kecamatan. Namun demikian perkembangan lapangan usaha ini belum optimal, mengingat masih adanya permasalahan yang dihadapi, antara lain :</p> <ol data-bbox="402 1776 1385 2045" style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pasar tradisional yang belum nyaman, rapid dan bersih, sehingga perlu terus dilakukan revitalisasi baik dari sisi manajemen maupun bangunan 2. Keberadaan PKL selama ini masih menggunakan fasilitas umum utamanya trotoar dan jalan umum, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan lalu lintas. Disamping itu keberadaan PKL kurang memperhatikan faktor keindahan, ketertiban & kebersihan lingkungan.

No	Permasalahan Pembangunan
	<p data-bbox="407 303 597 344">Perindustrian</p> <p data-bbox="407 344 1383 620">Jumlah industri di Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 mencapai 15.595 industri (terdiri dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah dan industri besar) jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 13.252 industri terjadi kenaikan sebesar 17,68%. Meningkatnya jumlah industry di Kabupaaten Lamongan baik IRT/IKM maupun besar tidak lepas dari terus berkembangnya perekonomian. Namun demikian perkembangan industri masih menghadapi permasalahan, antara lain :</p> <ol data-bbox="407 620 1383 975" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="407 620 1383 897">1. Sampai saat ini IKM/IRT dalam persaingan ditingkat regional dan nasional masih rendah, apalagi menghadapi persaingan di ASEAN Economic Community (AEC) yang berlangsung sejak desember 2015. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kualitas SDM yang masih rendah, manajemen usaha belum modern, informasi pasar dan pemasaran terbatas dan kualitas produk terutama kemasan masih sederhana serta belum semua IKM / IRT mempunyai legalisasi usaha <li data-bbox="407 897 1383 975">2. Sentra IKM masih terbatas jumlahnya sehingga perlu terus dikembangkan dengan mensinergikan seluruh stakeholder yang terkait
4	<p data-bbox="407 975 760 1016">Tata Kelola Pemerintahan</p> <p data-bbox="407 1016 1383 1257">Tata kelola pemerintah yang baik merupakan aspek mendasar dalam mengimplementasikan pembangunan daerah. Sebagai subyek utama pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip good govornance dan clean government. Salah satu permasalahan tata kelola pemerintahan adalah berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.</p> <p data-bbox="407 1257 1383 1580">Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan perlu ditingkatkan.</p> <p data-bbox="407 1580 1383 1806">Permasalahan lainnya adalah berkaitan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu juga perlu memfokuskan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dievaluasi secara periodik dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat di beberapa unit layanan yang ada.</p>

4.1.1 Permasalahan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur)

Salah satu fokus pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan. Pencapaian pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan hingga tahun 2015 baik berupa jalan kabupaten, poros strategis, poros potensial, poros desa dan lingkungan mencapai diatas 90 % dalam kondisi baik.

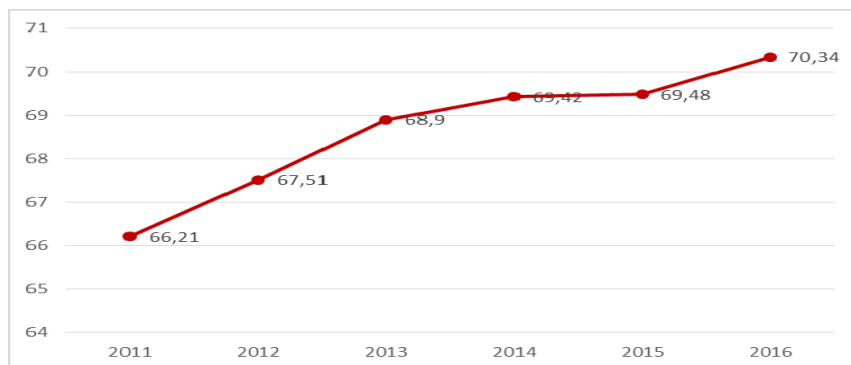
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Terkait Capaian Indikator Daerah

4.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai outcome pembangunan multi dimensi dan jangka panjang. IPM juga merupakan Indeks komposit atas Indeks Pendidikan , Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Capaian IPM Kabupaten Lamongan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 senantiasa menunjukkan progress yang cukup signifikan dan berada diatas capaian Jawa Timur, sebagaimana tabel dibawah ini :

Grafik 4.1

**Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016**



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2016

4.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi modern yang ditujukan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah/wilayah dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB dapat ditunjukkan berdasarkan struktur lapangan usaha.

Laju pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2016 sebesar 5,86 persen, melambat dibanding tahun 2015 mencapai 5,77 persen. Agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 terbentuk dari pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha yang bervariasi dan semua mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Lamongan pada kurun waktu 2011-2016 selalu diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dari 17 sektor atau lapangan usaha sebanyak 14 sektor lapangan usaha yang

pertumbuhannya diatas 5 %, sedangkan 3 sektor atau lapangan usaha yang pertumbuhannya dibawah 5 %. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha secara detail pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan
Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011- 2016

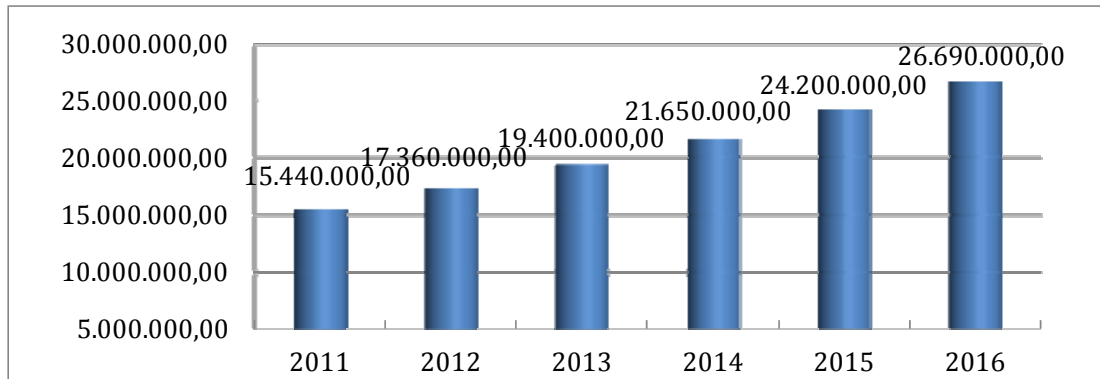
KATEGORI		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,29	7,16	5,94	4,98	4,6	4,32
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,73	2,79	1,65	6,08	9,64	3,42
C.	Industri Pengolahan	8,31	6,44	6,94	11,6	7,71	8,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,33	10,16	3,78	6,29	1,57	8,95
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,85	4,33	7,91	3,46	5,43	5,49
F.	Konstruksi	4,67	4,01	5,86	5,05	1,66	6,34
G.	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,25	9,4	9,85	7,84	7,22	6,99
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,07	6,28	8,09	8,87	7,61	8,66
I.	Penyediaan akomodasi & makan minum	10,38	5,69	6,04	9,66	12,8	9,84
J.	Informasi dan Komunikasi	7,81	7,84	7,81	6,8	7,02	7,04
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,34	10,33	13,75	6,39	7,14	6,82
L.	Real Estate	11,75	10,84	9,09	8,07	8,03	5,95
M. N.	Jasa Perusahaan	4,44	3,97	5,85	6,36	6,84	5,77
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,18	1,44	1,69	0,38	6,05	4,17
P.	Jasa Pendidikan	7,29	8,4	8,74	7,99	7,96	6,4
Q.	Sosial	19,08	11,96	9,1	9,69	9,14	8,26
R. S. T. U.	Jasa lainnya	6,19	1,63	4,72	7,34	7,06	3,35
	Produk Domestik Regional Bruto	6,67	6,92	6,93	6,3	5,77	5,86

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2016

4.1.2.3 PDRB Per Kapita

Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Perkapita adalah indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB Perkapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku dipasar, sehingga pengaruh inflasi menjadi cukup dominan. Trend perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pertumbuhannya relatif stabil. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Lamongan tersaji dalam grafik berikut :

Grafik 4.2
Nilai dan Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2016



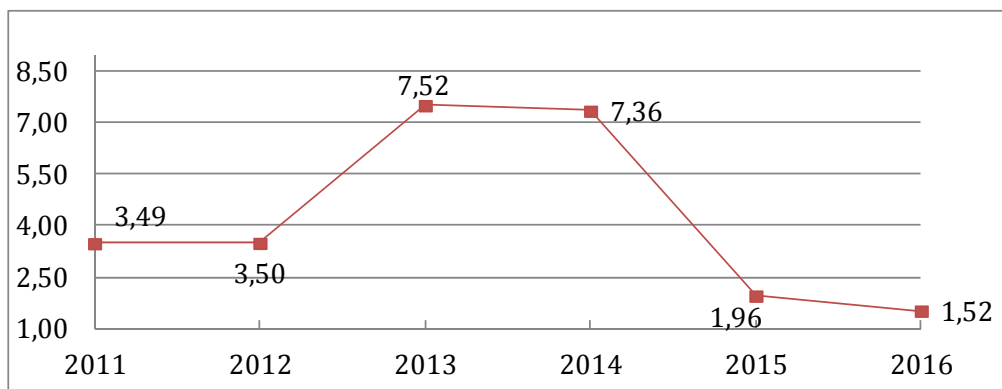
Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

4.1.2.4 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Inflasi di Kabupaten Lamongan relative belum stabil. Pada tahun 2011 dan 2012 berada pada kisaran 3%, namun pada tahun 2013 dan 2014 naik pada kisaran 7% dan turun tajam pada tahun 2015 menjadi 1,96%. Penurunan angka inflasi tersebut sangat dipengaruhi rendahnya inflasi di komoditas bahan makanan, pendidikan, rekreasi, olahraga, perumahan, air, listrik dan bbm, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Grafik Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Grafik 4.3
Inflasi Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

4.1.2.5 Indeks Kinerja Infrastruktur

Salah satu fokus pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan. Pencapaian pembangunan jalan di Kabupaten Lamongan hingga tahun 2016 baik berupa jalan kabupaten, poros strategis, poros potensial, poros desa dan lingkungan kondisinya diatas 90 % dalam kondisi baik.

Meskipun tren jalan di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun dalam kondisi baik, namun struktur tanah di Kabupaten Lamongan yang rata-rata lembek dan labil hampir di semua ruas, sehingga mengakibatkan usia fisik jalan secara alami lebih cepat menurun. Di samping itu, rendahnya kesadaran pemakai jalan, untuk mematuhi batas maximum tonase yang diijinkan juga mempercepat kerusakan badan jalan. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur ke depan disamping memperluas akses tetapi juga meningkatkan kualitas jalan melalui pemeliharaan sehingga memiliki kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Terlebih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah, mutlak adanya pemantapan kondisi infrastruktur daerah.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan genangan air di wilayah Bengawan Jero yang merupakan wilayah cekungan dan memiliki elevasi di bawah permukaan air laut sehingga dalam kondisi tertentu akan mengalami banjir. Dampak banjir tersebut yang dirasakan setiap tahun oleh masyarakat di 9 kecamatan yang dilalui Sungai Bengawan Solo adalah kerusakan jalan, saluran irigasi, gagal panen, kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum. Di sisi lain terjadinya pendangkalan waduk dan rawa yang memiliki sedimentasi sangat tinggi karena lebih dari 25 tahun tidak pernah dilakukan pengerukan terutama waduk-waduk dan rawa kewenangan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, sehingga berpengaruh terhadap penyediaan air baku yang dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun petani.

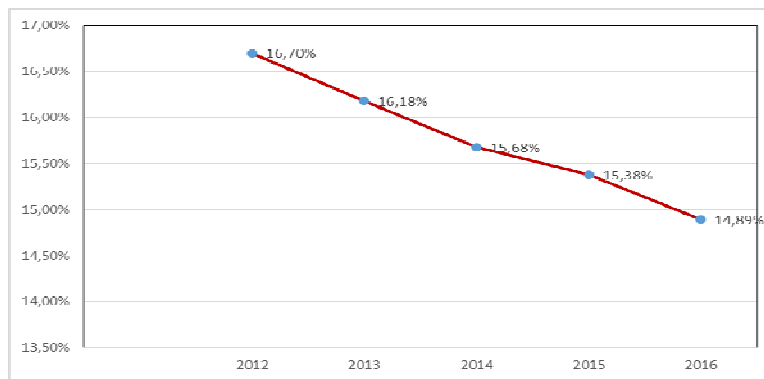
4.1.2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan. Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan berturut-turut yaitu 74.34; 78.73 dan 79.26.

4.1.2.7 Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih relatif tinggi sehingga upaya-upaya pendampingan, bantuan dan pemberdayaan perlu dilakukan untuk memutus lingkaran siklus kemiskinan guna menurunkan angka kemiskinan.

Grafik 4.5
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan Tahun 2012-2016

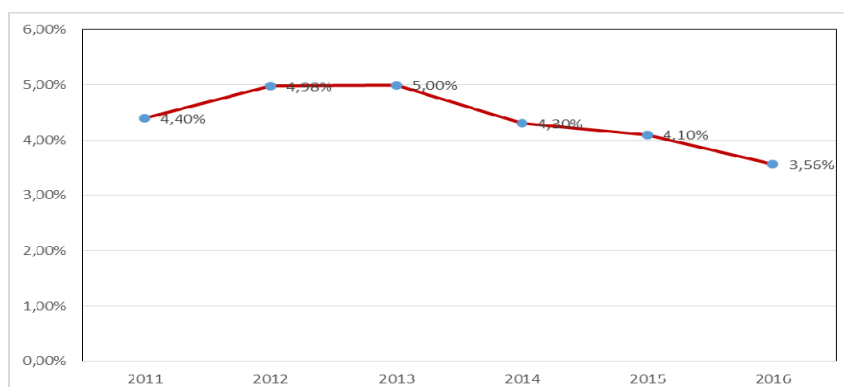


Sumber: BPSKabupaten Lamongan 2017

4.1.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Grafik 4.6
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 2017

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan utama di Kabupaten lamongan dapat dikelompokkan menjadi 5 hal utama, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia yang belum sepenuhnya berdaya saing sehingga perlu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut ditandai dengan masih belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai, masih terbatasnya fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan masih belum maksimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.
2. Daya saing perekonomian yang masih belum optimal dalam menggali potensi daerah. Hal tersebut ditandai dengan belum optimalnya kinerja sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro, realisasi investasi dan kunjungan wisata.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan untuk lokasi-lokasi tertentu, belum maksimalnya pemanfaatan tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat, masih terdapatnya permukiman kumuh dan tidak layak huni, belum maksimalnya konservasi Lingkungan, belum optimalnya pengendalian bencana kebakaran dan bencana alam lainnya.
4. Belum maksimalnya reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut ditandai dengan masih belum optimalnya konsistensi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan, terbatasnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah, belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usaha aset, terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah, terbatasnya kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, belum efektifnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, belum optimalnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya, terbatasnya pengelolaan arsip pemerintah daerah dan administrasi kependudukan yang tertib, belum optimalnya pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal, masih rendahnya kapabilitas birokrasi yang efektif dan efisien, belum efektifnya Sistem Informasi dan Komunikasi dalam mendukung Pelayanan Publik, dan belum maksimalnya kepuasan masyarakat.

5. Belum optimalnya kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Hal tersebut ditandai dengan masih belum maksimalnya pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat, jumlah transmigran yang berhasil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana, peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa, prestasi pemuda dan olahrag, seni dan budaya daerah, pencari kerja yang ditempatkan, harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum dan kesadaran politik masyarakat

4.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis Kabupaten Lamongan dirumuskan dengan melakukan analisis SWOT terhadap kondisi eksisting Kabupaten Lamongan dengan kondisi lingkungan kebijakan di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

4.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kabupaten Lamongan memiliki banyak potensi yang dapat menjadi kekuatan daerah dalam membangun di masa yang akan datang. Berikut beberapa potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan.

4.2.1.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana

Kabupaten Lamongan memiliki lokasi yang strategis jika dilihat dari kontelasi regional. Berada di jalur Pantai Utara Jawa Timur, Kabupaten Lamongan memiliki akses yang sangat terbuka baik melalui jalan darat maupun laut.

Pada aspek fisik dan sarana prasarana Kabupaten Lamongan memiliki potensi sebagai berikut.

1. Pengembangan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan Strategis Nasional dengan didukung oleh Perkotaan Lamongan, pengembangan Perkotaan Paciran sebagai pusat pengembangan industri dan pariwisata, pengembangan Perkotaan Brondong sebagai kawasan pelabuhan serta industri, serta pengembangan Perkotaan Babat sebagai kawasan perdagangan dan jasa regional, Perkotaan Ngimbang sebagai pusat agribisnis berpotensi menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai pusat pertumbuhan yang mampu.
2. Kabupaten Lamongan memiliki angkutan kereta api komuter dengan rute Surabaya – Lamongan – Babat, yang memudahkan akses sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Di Pantai Utara Kabupaten Lamongan berkembang beberapa prasarana transportasi laut guna peningkatan sistem transportasi laut regional dan nasional.
4. Di Lamongan juga sudah terdapat pelabuhan perikanan yang berskala besar yaitu Pelabuhan perikanan nusantara Brondong.

4.2.1.2 Kondisi Sosial dan Budaya

Kabupaten Lamongan memiliki keragaman dan kekayaan budaya Lamongan secara historis terbagi menjadi 2 (dua) wilayah sesuai karakteristik budaya dan kesenian yakni:

1. Wilayah Selatan yang kental dengan budaya Jawa (Mojopahit);
2. Wilayah Utara yang sangat dominan dan monumental dengan budaya Islam (Budaya Pesisir).

Adanya perbedaan kondisi budaya tersebut melahirkan aneka seni budaya Jawa di Kawasan Selatan, seperti: Wayang Kulit, Sandur, Ketoprak, Tayub, Kepang Dor dan lain sebagainya. Sedangkan di Kawasan Utara yang diilhami oleh Kesenian dan Budaya Islam antara lain: Samroh, Seni Hadrah, Jidor, Sholawatan, Kentrung, Pencak Silat, Qosidah dan lain sebagainya, yang memang seharusnya dilestarikan dan dikembangkan sebagai upaya untuk memperkokoh budaya bangsa.

Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lamongan menjadi sektor yang sangat prospektif dan strategis untuk dikembangkan sebagai potensi daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah khususnya dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian serta kepariwisataan yang bernuansa global sesuai kondisi yang sedang berkembang.

4.2.1.3 Kondisi Perekonomian

Pada aspek perekonomian, Kabupaten Lamongan memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi kekuatan, yaitu:

➤ Pertanian

Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Lamongan. Kontribusi kategori ini pada tahun 2015 sebesar 38,58 % terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Dominasi kategori ini disokong oleh sub kategori tanaman pangan yang mencapai 20,76%.

Pada tahun 2016 produksi padi sebesar 1.053.796 ton GKG dengan luas areal tanaman mencapai 151.746 hektar dan produktivitasnya sebesar 6,48 ton per hektar. Produksi padi tersebut, apabila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang disebabkan karena factor iklim. Namun demikian produksi padi tetap menjadi penghasil padi nomor dua di Jawa Timur.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian terutama untuk tanaman padi antara lain: bantuan sarana produksi berupa benih dan alat-alat pertanian yang lebih modern, peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi, mengembangkan kawasan agropolitan, peningkatan kualitas SDM pertanian, mendorong penggunaan pupuk organik, agent hayati dan bantuan modal.

Selain sub kategori tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong berkembangnya sumber pangan dan energy lainnya yaitu sub kategori peternakan. Berkembangnya peternakan ditunjukkan oleh terus bertambahnya populasi ternak di Kabupaten Lamongan. Pada tahun 2015 populasi ternak besar yang meliputi sapi, kerbau dan kuda sebanyak 102.255 ekor, ternak kecil sebanyak 180.284 ekor yang terdiri dari kambing dan domba, serta unggas yang meliputi ayam buras, ayam ras, itik dan itik manila sebanyak 48.447.059 ekor.

Berkembangnya peternakan di Kabupaten Lamongan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui kegiatan pemberian bantuan ternak untuk dibudidayakan berupa sapi, kambing, ayam, puyuh serta itik, bantuan cooper, pembinaan dan pengembangan agribis peternakan serta didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana peternakan.

➤ **Perikanan**

Potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan cukup besar, pada tahun 2016 produksi ikan mencapai 127.441,8 ton. Besarnya potensi ini didukung oleh panjang pantai yang dimiliki sepanjang 47 km, sawah tambak seluas 23,454,73 ha, tambak 1.380,05 ha, kolam 341,95 ha, rawa seluas 7.087 ha, waduk 3.068 ha dan sungai seluas 855,50 km serta adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pusat Pendaratan Ikan (PPI).

Fokus pembangunan perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, antara lain:

1. Pengembangan kawasan minapolitan tangkap yang meliputi kecamatan Brondong dan Paciran dengan minapolisnya di PPN Brondong.
2. Pengembangan kawasan minapolitan budidaya yang meliputi kecamatan Kecamatan Karangbinangun, Deket, Lamongan, Turi, Karanggeneng, Kalitengah dengan minapolisnya di Kecamatan Glagah.
3. Peningkatan kualitas SDM pembudidaya dan nelayan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai
4. Serta Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN).
5. Melakukan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pusat terkait dengan pengelolaan wilayah laut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

➤ **Potensi Perdagangan**

Pemerintah Kabupaten Lamongan memahami bahwa pembangunan perdagangan memiliki peranan penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam menciptakan kategori serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Aktivitas perdagangan terus dipacu baik perdagangan besar maupun eceran melalui peningkatan fasilitas perdagangan berupa pasar tradisional yang lebih representative serta penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), juga peran swasta melalui pembangunan toko dan ruko.

Berbagai aktivitas diatas memberikan dampak terhadap besaran sumbangan untuk Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran : reparasi mobil dan motor sebesar 18,81% pada PDRB ADHB(estimasi). Tentunya didukung oleh tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru seperti Tikung, Kedungpring, Sekaran, Sugio dan Karanggeneng serta Lamongan, Babat, Ngimbang, Paciran, Brondong dan mantup yang merupakan jalur distribusi barang antar wilayah.

➤ **Potensi Industri Pengolahan**

Industri pengolahan di Kabupaten Lamongan terus berkembang, hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah industry yang ada, juga semakin *variatif* antara lain: industri pengolahan makanan dan minuman, pengolahan tembakau, pakaian jadi, kayu dan furniture. Berkembangnya industri pengolahan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya memfasilitasi ketersediaan infrastruktur, kawasan-kawasan industri serta kemudahan perijinan bagi industri besar.

Demikian pula pada Industri Kecil dan Menengah (IKM)/ Industri Rumah Tangga (IRT) terus dipacu melalui peningkatan skill bagi SDM IKM/IRT, bantuan modal, pemasaran, pengembangan sentra-sentra dan fasilitasi legalisasi usaha. Mengingat IKM/IRT merupakan usaha yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat lamongan dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.

Berkembangannya industri pengolahan ini telah memberikan dampak terhadap perekonomian, hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya kontribusi kategori industri pengolahan. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 7,29% pada PDRB ADHB (estimasi).

➤ **Potensi Wisata**

Kabupaten Lamongan memiliki 6 (enam) obyek wisata yang telah terkelola dengan baik dan menjadi destinasi wisata antara lain :

1. Wisata Religi Makam Sendang Duwur
2. Wisata Religi Sunan Drajat dan Museum Sunan Drajat
3. Wisata Bahari Lamongan
4. Obyek Wisata Maharani Zoo dan Goa
5. Obyek Wisata Waduk Gondang
6. Wisata Alam Mata Air Panas Brumbun

Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta melakukan promosi wisata. Hasil dari upaya ini ditunjukkan oleh tingkat kunjungan wisata yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

4.2.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

Beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian lebih di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

4.2.2.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana

Kelemahan Kabupaten Lamongan yang berhubungan dengan kondisi fisik dan sarana prasarana adalah keberadaan infrastruktur jalan yang memiliki usia fisik yang pendek. Kerusakan infrastruktur jalan dan sarana prasarana lain dikarenakan struktur tanah yang rata-rata lembek dan labil hampir di semua ruas. Kelemahan ini juga ditunjang dengan bencana banjir yang kerap mengancam Kabupaten Lamongan dengan meluapnya Sungai Bengawan Solo atau gelombang pasang di pesisir Utara.

Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Selatan, jika ancaman bencana banjir dan gelombang menjadi permasalahan terjadi Utara, di Selatan ketersediaan saluran air bersih kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu permasalahan ketika musim kemarau. Beberapa kecamatan di wilayah Selatan Kabupaten Lamongan memiliki keterbatasan terhadap akses air bersih.

Pada aspek yang lain, kondisi sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan juga masih belum optimal di Kabupaten Lamongan. Kelemahan yang muncul utamanya berkaitan dengan pemerataan terhadap akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Di beberapa kecamatan masih ditemukan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan kecamatan yang ada di sekitar kota. Semakin jauh dari pusat kota, semakin banyak ditemukan ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2.2 Kondisi Sosial Budaya

Kelemahan yang muncul di Kabupaten Lamongan berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat adalah problem klasik kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana uraian sebelumnya, fenomena kemiskinan di Lamongan meliputi kurang sinkronnya beberapa program pengentasan kemiskinan. Meski sudah sangat banyak program pengentasan kemiskinan dijalankan, ternyata hanya memberikan dampak yang sangat kecil terhadap penurunan angka kemiskinan.

Sedangkan permasalahan pengangguran muncul dikarenakan penambahan angkatan kerja tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh pertanian, penambahan lapangan pekerjaan menjadi sulit untuk bertambah secara cepat jika tidak diiringi oleh pertumbuhan pada sektor-sektor riil yang lain. Di sisi yang lain, pertumbuhan sektor riil tanpa diimbangi dengan peningkatan

kualitas sumberdaya manusia/tenaga kerja juga berpotensi memunculkan permasalahan tidak terserapnya tenaga kerja lokal karena gagal bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Kendala ini yang ke depan harus direspon dengan berbagai kebijakan yang simultan dan komprehensif.

4.2.2.3 Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan pada kurun waktu 2011-2014 mengalami tren fluktuatif. Jika dilihat pada laju pertumbuhan ekonomi Lamongan tahun 2014 sebesar 6,41 persen, melambat dibanding tahun 2013 mencapai 6,86 persen. Agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 terbentuk dari pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha yang bervariasi. Perlambatan pertumbuhan ini bukan hanya terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan saja, tetapi perlambatan ini dialami kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten yang berdampingan dan wilayah provinsi. Pertumbuhan Lamongan lebih tinggi dan perlambatan yang dialami Lamongan lebih landai. Perlambatan yang dialami perekonomian Indonesia ini diduga disamping karena kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank kebijakan pemerintah (*BI rate*).

Di sisi yang lain, Kabupaten Lamongan sebagaimana kabupaten/kota lain di Indonesia rentan dengan inflasi yang tinggi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum. Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, terutama oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Hal ini karena tingginya tingkat ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga. Dan secara makro, dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

4.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Di tengah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa kondisi yang memberikan kesempatan dan peluang yaitu:

4.2.3.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana

Usia fisik infrastruktur terutama jalan dan jembatan menjadi salah satu kelemahan Kabupaten Lamongan. Untuk dapat mengejar perbaikan jalan dan jembatan dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Dengan kapasitas keuangan daerah yang terbatas, pembangunan jalan tidak dimungkinkan dilakukan dalam waktu yang cepat. Oleh

karenanya pemerintah daerah dapat mencari peluang dan kemungkinan agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tuntas dan cepat.

Beberapa peluang dan situasi yang memungkinkan terjadinya perbaikan kondisi infrastruktur adalah sebagai berikut.

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Implementasi Undang-Undang Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah. Adanya alokasi dana dari pemerintah pusat dan masuk dalam APBDes akan meringankan beban pemerintah daerah dalam membangun desa khususnya infrastruktur di tingkat desa.
2. Rencana Pembangunan Ring Road Lamongan
Rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan Ringroad Utara Lamongan menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah. Jalan yang rencananya dibangun di Deket Wetan hingga Plosowahyu, disamping menjadi solusi kemacetan akibat aktifitas kereta api juga akan mendorong aktifitas perekonomian dan sosial masyarakat. Meski dalam pelaksanaannya masih belum optimal, ke depan rencana pembangunan ini tetap menjadi peluang yang harus ditangkap oleh Kabupaten Lamongan.
3. Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jawa Timur
Rencana pengembangan SPAM akan memberikan keuntungan dan peluang bagi Kabupaten Lamongan. Pengembangan SPAM Regional Mojokerto-Lamongan (Mojolamong) dilakukan untuk mengoptimisasi pemanfaatan air baku di Mojokerto sekaligus membantu Kabupaten Lamongan yang memiliki keterbatasan air baku. Untuk wilayah pelayanannya direncanakan meliputi wilayah di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan dengan kapasitas sebesar 300 l/det. Konsep Pengelolaan SPAM Regional, untuk unit air baku dan produksi oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jawa Timur sedangkan pendistribusian air minum ke masyarakat tetap dilakukan oleh PDAM Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan

4.2.3.2 Kondisi Sosial Budaya

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang menjadi salah satu kelemahan yang harus ditangani dan ditutup dengan kemampuan Kabupaten Lamongan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan kebijakannya. Beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kabupaten Lamongan di bidang sosial dan budaya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan wujud nyata keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi setiap

warganya. Dengan adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan tentunya memberikan motivasi bagi warga Negara untuk mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Jaminan tersebut memberikan keamanan untuk meningkatkan kualitas SDM serta derajat kesehatan masyarakat. Penerapan BPJS juga membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakatnya.

2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Kemiskinan Indonesia

Dokumen MP3EI bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan beragam investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan MP3KI bertujuan untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat secara langsung dan menerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua dokumen ini dirancang sebagai dokumen kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro-job dan pro-environment. MP3KI merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan konsep dan desain, arah kebijakan, strategi penanggulangan kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah dan sebagainya. MP3KI menitikberatkan pada pengembangan livelihood melalui berbagai kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Transformasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yaitu: pengembangan sistem perlindungan social secara menyeluruh, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupan (sustainable livelihood) masyarakat miskin dan rentan.

3. Komitmen terhadap pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk meneruskan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mengesahkan SDG's sebagai kesepakatan pembangunan global. Wakil Presiden Yusuf Kalla ikut hadir dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat bersama dengan 193 perwakilan negara-negara di dunia. Dalam konteks Indonesia, tujuan yang termuat dalam agenda SDG's memiliki kesesuaian dengan nawacita dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Upaya pemerintah untuk melaksanakan SDGs menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Lamongan.

4.2.3.3 Kondisi Perekonomian

Peluang dan kesempatan yang dapat menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Lamongan meliputi beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2011. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi Negara maju dan termasuk sepuluh besar Negara di dunia pada tahun 2025. Selain itu, MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air.

2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penerapan Undang-Undang Desa bukan saja berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat desa, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Salah satu klausul yang berkaitan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa akan dapat menjadi penggerak perekonomian di tingkat desa. Hal ini tentu saja menjadi peluang positif bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi perekonomian yang khas di masing-masing wilayahnya.

4.2.4 Ancaman (*Treath*)

Situasi dan kondisi yang menjadi ancaman Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

4.2.4.1 Kondisi Fisik dan Sarana Prasarana

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan, terutama kondisi jalan, menghadapi tantangan dan ancaman berkaitan dengan pemeliharaan kondisi jalan. Beberapa ancaman terhadap perawatan kondisi jalan yaitu:

1. Kepadatan lalu lintas angkutan barang yang melewati Lamongan

Lokasi Kabupaten Lamongan yang strategis memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian. Namun hal itu memunculkan resiko bahwa Kabupaten Lamongan juga menjadi akses dan jalur transportasi utama yang menghubungkan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Hal ini berdampak terhadap kerusakan jalan karena tonase yang berlebihan dan frekuensi yang padat kendaraan. Semakin padatnya transportasi dan perhubungan, mengancam kerusakan jalan ketika tidak mampu mengontrol bobot/tonase kendaraan barang yang melintasi Kabupaten Lamongan.

2. Ancaman bencana alam

Situasi lain yang juga menjadi ancaman terhadap kondisi infrastruktur adalah ancaman bencana alam. Beberapa kawasan di Kabupaten Lamongan merupakan kawasan rawan banjir terutama pada kawasan yang dilalui oleh aliran Sungai Bengawan Solo yaitu di Kecamatan Babat, Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Glagah dan Karangbinangun. Selain kawasan tersebut kawasan lainnya yang termasuk dalam rawan bencana banjir antara lain Kecamatan Deket dan Turi. Luas seluruh kawasan rawan bencana di Kabupaten Lamongan mencapai +29.273 Ha atau sekitar 16,15 % dari luas wilayah Kabupaten Lamongan.

4.2.4.2 Kondisi Sosial Budaya dan Perekonomian

Ancaman yang muncul dalam konteks sosial dan budaya berhubungan langsung dengan isu-isu strategis yang melingkupi Kabupaten Lamongan. Beberapa ancaman tersebut antara lain:

1. Persaingan perekonomian global

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi peluang sekaligus ancaman. MEA telah berjalan sejak tahun 2015 dicirikan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Pasar tunggal dan produksi dasar,
- b. Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah,
- c. Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan
- d. Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dengan situasi regional dan global tersebut, mau tidak mau mendorong daerah mempersiapkan diri agar tidak tergerus dengan persaingan global. Terintegrasinya pasar dengan perekonomian yang lebih kuat, kerap memangsa wilayah atau daerah yang lemah secara ekonomi. Oleh karenanya, dalam konteks Lamongan, tuntutan untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolak.

2. Persaingan dengan daerah sekitar dalam pengembangan perekonomian di Cluster Segitiga Emas.

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan masuk dalam *cluster* Segitiga Emas yang terdiri dari Kawasan Strategis Segitiga Emas Pertumbuhan Tuban, Lamongan dan Bojonegoro; Kawasan Strategis Agroindustri Gresik dan Lamongan; dan kawasan perbatasan antar-kabupaten/kota yang memiliki potensi pertumbuhan perekonomian sektoral yang tinggi pada Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bojonegoro.

Dengan kondisi serta potensi yang hampir sama antara Lamongan dengan daerah-daerah sekitar, ke depan perkembangan yang terjadi di daerah-daerah sekitar berpotensi menjadi ancaman terhadap Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dirumuskan isu-isu strategis Kabupaten Lamongan sebagai berikut.

1. Tuntutan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan SDM.
2. Pertumbuhan ekonomi relatif belum stabil dan belum inklusif.
3. Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh stabilitas harga barang/jasa atau inflasi.
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu dari Pemerintah Daerah.
5. Belum mantapnya kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan serta jaringan irigasi.
6. Relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT).
7. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas maka isu-isu strategis utama di Kabupaten Lamongan dapat dikelompokkan menjadi 5 hal utama, yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing sehingga perlu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengoptimalan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai, fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung budaya literasi guna meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.
2. Masih belum optimalnya daya saing perekonomian dalam menggali potensi daerah. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kinerja sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro, realisasi investasi dan kunjungan wisata.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dasar yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dilakukan melalui pengoptimalan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pengairan serta perhubungan untuk lokasi-lokasi tertentu, pemanfaatan tata ruang dengan skenario aman dan nyaman untuk masyarakat, permukiman yang layak huni, upaya konservasi Lingkungan, serta pengendalian bencana kebakaran dan bencana alam lainnya.
4. Tuntutan pelayanan pembangunan birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengoptimalan konsistensi antara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah, kinerja pengelolaan keuangan dan penataan usaha aset, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan daerah, kualitas dan kapasitas birokrat Pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, peran DPRD sesuai dengan fungsinya, pengelolaan arsip pemerintah daerah dan administrasi kependudukan yang tertib, pelayanan perijinan untuk mendukung peningkatan penanaman modal, kapabilitas birokrasi yang efektif dan efisien, Sistem Informasi dan Komunikasi dalam mendukung Pelayanan Publik, dan belum maksimalnya kepuasan masyarakat.

5. Perlu fasilitasi agar kehidupan masyarakat tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Hal tersebut dilakukan melalui pemaksimalan pelayanan sosial dalam upaya penurunan PMKS, ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat, jumlah transmigran yang berhasil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana, peran masyarakat dan lembaga dalam pembangunan desa, prestasi pemuda dan olahrag, seni dan budaya daerah, pencari kerja yang ditempatkan, harmoni sosial dan wawasan kebangsaan, ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum dan kesadaran politik masyarakat.

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi yang termuat dalam RPJMD perubahan merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah :

"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
 2. **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
 3. **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
 4. **Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
-

5.2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, "Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing" ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

- **Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

- **Misi 2 : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

- **Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- **Misi 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

- **Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.



5.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goals*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan adalah untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Sementara itu, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goals*) yang telah ditetapkan.

Dari lima misi yang telah diuraikan sebelumnya, berikut tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
3. Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
5. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, maka indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Lamongan adalah :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator kinerja utama Kabupaten Lamongan	Kondisi Awal 2016	Target Akhir 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,34	71,44 – 71,94
2	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,86	5,60 - 6,60
3	PDRB per Kapita (Rp.000.000) ADHB	26,69	42,90
4	Inflasi	1,52	3,00 – 4,00
5	Indeks Gini	0,304	0,314 – 0,299
6	Indeks Kinerja Infrastruktur	66,80	80,24
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,65	66,86
8	Indeks Refromasi Birokrasi	-	62,5
9	Tingkat Kemiskinan (%)	14,89	12,74 – 10,00
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	3,45 - 3,00

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, sampai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan, berikut dijelaskan secara lebih detail keterkaitan misi, tujuan dan sasaran.



- Misi 1** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, memiliki tujuan : *Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing.*
- Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :
1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Misi 2** : Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, memiliki tujuan: *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.*
- Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :
1. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani
 2. Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan
 3. Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro
 4. Meningkatnya realisasi investasi
 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan
- Misi 3** : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, memiliki tujuan : *Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.*
- Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
 2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan serta pengendalian bencana alam
- Misi 4** : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, memiliki tujuan : *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.*
- Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :
1. Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah
 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah
 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah daerah
-

4. Meningkatnya kinerja pelayanan publik
5. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-gov)

Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, memiliki tujuan : *Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.*

➤ Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS
 2. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat
 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
 4. Terwujudnya desa yang mandiri
 5. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
 6. Meningkatnya pengembangan seni dan budaya
 7. Meningkatnya penduduk yang bekerja
 8. Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan
 9. Meningkatnya ketertiban umum dan masyarakat taat hukum
-
-

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI KABUPATEN LAMONGAN											
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing											
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1 Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua	1 Indeks Pendidikan	0,62	0,627-0,632	0,634-0,639	0,641-0,646	0,654-0,659	0,654-0,659	0,654-0,659
			2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 Indeks Kesehatan	0,796	0,795 - 0,798	0,796 - 0,799	0,798 - 0,801	0,799 - 0,802	0,801 - 0,804	0,801 - 0,804
Misi 2 :Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah	2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat	2 Persentase Pertumbuhan ekonomi	3 Meningkatnya lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani	3 Nilai Tukar Petani	-	102,76	103,20	103,60	103,80	104,00	104,00
				4 Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian	4,32	4,16 - 4,71	4,17 - 4,72	4,18 - 4,73	4,19 - 4,74	4,20 - 4,75	4,21 - 4,76
		3 PDRB Per Kapita	4 Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan	5 Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	8,65	7,75 - 8,66	7,76 - 8,67	7,77 - 8,68	7,78 - 8,69	7,79 - 9,00	7,79 - 9,00
				6 Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	6,99%	6,56%-7,56%	6,57%-7,57%	6,58%-7,58%	6,59%-7,59%	6,60%-7,60%	6,60%-7,60%
		4 Inflasi	5 Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro	7 Persentase koperasi berkualitas	52,63%	53%	56%	59%	62%	65%	65%
				8 Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil	8,21%	8,41%	8,62%	8,82%	9,03%	9,23%	9,23%
		5 indek gini	6 Meningkatnya realisasi investasi	9 Persentase peningkatan realisasi investasi	22.242.684.773.608	4%	8%	12%	16%	20%	20%
				7 Meningkatnya kunjungan wisatawan	10 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	2.363.832	0,04%	0,08%	0,13%	0,17%	0,21%

VISI KABUPATEN LAMONGAN	Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing										
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi 4 : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik	4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	8 Indek Reformasi Birokrasi	10 Meningkatnya perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah	20 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)	B	BB	BB	BB	A	A	A
				21 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
				22 Persentase Kemampuan Fiskal	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%
				23 Persentase Derajat Desentralisasi	14,84%	15%	15,50%	16,00%	16,50%	17,00%	17%
				24 Nilai Opini pemeriksa eksternal	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				25 Persentase PD yang tidak terdapat temuan material dan keuangan	77%	80%	83%	86%	90%	95%	95%
				11 Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah	26 Jumlah Penelitian dan kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional			1	1	1	1
			12 Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	27 Indek Profesionalitas ASN	-	80	81	82	83	84	84
			13 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	28 Indeks Kepuasan Masyarakat	79,26	79,74	80,25	80,75	81,26	81,76	81,76
			14 Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-gov)	29 Nilai/Pemeringkatan e Government Indonesia (PeGI)	peringkat 4	peringkat 4	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 3

VISI KABUPATEN LAMONGAN	Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing											
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Misi 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal	5 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.	9	Persentase Tingkat kemiskinan	15 Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	30 Persentase Penurunan PMKS	2,37%	2,39%	2,41%	2,42%	3,05%	3,15%	3,15%
		10	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16 Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat	31 Indeks Ketahanan Pangan	-	0,4	0,36	0,32	0,29	0,26	0,26
				17 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	32 Indeks Pembangunan Gender	-	88.71	89.21	89.71	90.21	90.71	90.71
					33 Persentase Laju pertumbuhan penduduk	0,88	0,67%	0,67%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%
				18 Terwujudnya desa yang mandiri	34 Jumlah desa mandiri	1	4	5	6	7	8	8
				19 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	35 Persentase peningkatan prestasi pemuda dan atlet	100	6%	12%	18%	24%	30%	30%

4	indek gini	Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.	$GR = 1 - \sum fi [Yi + Yi-1]$	0,304	0,318-0,303	0,317-0,302	0,316-0,301	0,315-0,300	0,314-0,299	0,314-0,299
Misi 3		Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan								
Tujuan		Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan								
1	Indeks Infrastruktur	Ukuran capaian kinerja infrastruktur dalam satuan indeks	Indeks Jalan + Indeks Jembatan + Indeks Irigasi + Indeks Permukiman	66,80	77,02	77,80	78,67	79,40	80,24	80,24
			Jumlah Indeks							
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.	IKLH = 30% IPA + 30% IPU + 40% ITH	60,65	62,41	65	66,32	68,03	70,61	70,61
Misi 4		Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik								
Tujuan		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik								
1	Indek Reformasi Birokrasi	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB	-	-	61	61,5	62	62,5	62,5
Misi 5		Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal								
Tujuan		Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran.								
1	% Tingkat kemiskinan	Persentase Jumlah Penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan	jumlah Penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan	14,89	14,46-13,91	14,03-12,93	13,60-11,96	13,17-10,98	12,74-10,00	12,74-10,00
			$\frac{\text{jumlah Penduduk}}{\text{jumlah Penduduk}} \times 100$							
2	% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$	3,56	4,15-3,45	4,13-3,34	4,11-3,22	4,08-3,11	3,45-3,00	3,45-3,00

➤ **Penetapan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan**

Dalam rangka pencapaian **Misi Pertama** ditetapkan 2 (**Dua**) **Sasaran** yang diukur melalui 2 (**Dua**) **Indikator Sasaran** yang didukung 3 (**Tiga**) **Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah** meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Perpustakaan sebagaimana berikut:

Misi Pertama	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua	Indeks Pendidikan	Gambaran secara umum untuk mengetahui perkembangan pendidikan	Indeks Angka harapan lama sekolah (EYS) + rata - rata lama sekolah (MYS) $\frac{2}{2}$	0,62	0,627-0,632	0,634-0,639	0,641-0,646	0,654-0,659	0,654-0,659	0,654-0,659
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Gambaran umum untuk mengetahui perkembangan angka harapan hidup	$\frac{((e0 - 25)/(85-25)) \times 100}{100}$ Dimana : e0 : Angka Harapan Hidup; 25 Angka Minimum Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Maksimum Harapan Hidup (UNDP);	0,796	0,795 - 0,798	0,796 - 0,799	0,798 - 0,801	0,799 - 0,802	0,801 - 0,804	0,801 - 0,804

Dalam rangka pencapaian Misi Kedua ditetapkan 5 (Lima) Sasaran yang diukur melalui 8 (Delapan) Indikator Sasaran yang didukung 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal, Pariwisata dan kelautan & perikanan sebagaimana berikut:

Misi Kedua	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)	$(It / Ib) \times 100$	-	102,76	103,20	103,60	103,80	104,00	104,00	104,00
		Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian,	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan	$\frac{\text{PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sekarang} - \text{PDRB ADHK lapangan pertanian tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya}} \times 100$	4,32	4,16 - 4,71	4,17 - 4,72	4,18 - 4,73	4,19 - 4,74	4,20 - 4,75	4,21 - 4,76	4,21 - 4,76
	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha industri pengolahan dilihat dari perubahan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB ADHK	$\frac{\text{PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan tahun sekarang} - \text{PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK sub lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya}} \times 100$	8,65	7,75 - 8,66	7,76 - 8,67	7,77 - 8,68	7,78 - 8,69	7,79 - 9,00	7,79 - 9,00	7,79 - 9,00

Misi Kedua	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
		Persentase Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	PDRB ADHK lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang - PDRB ADHK lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sebelumnya x 100	6,99%		6,56%-7,56%	6,57%-7,57%	6,58%-7,58%	6,59%-7,59%	6,60%-7,60%	6,60%-7,60%
	Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi berkualitas	Gambaran terkait kondisi koperasi berkualitas, memenuhi tingkat kepatuhan dan kesehatan usaha	$\frac{\text{jml koperasi berkualitas}}{\text{jml koperasi aktif}} \times 100$	52,63%		53%	56%	59%	62%	65%	65%
		Persentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil	Gambaran unit usaha mikro yang meningkat kapasitasnya menjadi usaha kecil dimana kriterianya sesuai dengan Undang-undang No.20/2008 dalam satuan prosentase	$\frac{\text{jml usaha kecil}}{\text{jml usaha mikro \& kecil}} \times 100$	8,21%		8,41%	8,62%	8,82%	9,03%	9,23%	9,23%
	Meningkatnya realisasi investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini berdasarkan LKPM sesuai dengan UU 25 tahun 2007	Jumlah realisasi investasi sampai tahun sekarang - jumlah realisasi investasi baseline x 100	22.242.684.773.608		4%	8%	12%	16%	20%	20%
	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing	Jumlah kunjungan wisatawan tahun sekarang - jumlah kunjungan wisatawan baseline x 100	2.363.832		0,04%	0,08%	0,13%	0,17%	0,21%	0,21%

Dalam rangka pencapaian Misi Ketiga ditetapkan 2 (Dua) Sasaran yang diukur melalui 9 (Sembilan) Indikator Sasaran yang didukung 5 (Lima) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana berikut:

Misi Ketiga	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Indeks Infrastruktur Jalan	Ukuran kemantapan jalan kabupaten dan poros strategis	(indek jalan kabupaten+indek jalan poros strategis) / jumlah indek	-	80,82	81,88	83,38	84,20	85,06	85,06
		Indeks Infrastruktur Jembatan	Ukuran kemantapan jembatan	(indek jembatan kabupaten + jembatan strategis)/ jumlah indek	-	80,71	81,61	82,41	83,22	83,97	83,97
		Indeks Irigasi	Ukuran capaian kinerja irigasi	<u>IK. Jaringan Irigasi + IK. Air Baku</u> Jumlah Indek	-	74,64	75,08	75,54	76,14	77,18	77,18
		Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan	Ukuran kinerja layanan lalu lintas dan angkutan jalan	(IK pelayanan transportasi dan IK jaringan jalan) / 2	61,05	62,11	63,26	63,76	64,65	65,15	65,15
		Indek infrastruktur permukiman	Ukuran capaian kinerja peningkatan kualitas permukiman	(indek rumah layak huni + indek kawasan permukiman kumuh)/ jumlah indek	-	71,91	72,62	73,34	74,03	74,74	74,74

Misi Ketiga	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
	Terwujudnya peningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam	Indeks Kualitas Air (IKA)	Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index - PI).	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$ <p>Keterangan : (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j.</p>	61,76	63.27	65.42	65.92	68.02	70.92	70.92
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak empat kali per tahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rata-rata dr nilai konsentrasi triwulanan	$IPU = \frac{IP_{NO2} + IP_{SO2}}{2}$ <p>Keterangan : IPU = Indeks Pencemaran Udara IPNO2=Indeks Pencemar NO2 IPSO2=Indeks Pencemar SO2</p>	71,58	73.57	75.72	76.22	78.22	81.12	81.12
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan Didasarkan Pada Luas Tutupan Vegetasi yang ada di Kabupaten Lamongan dibandingkan Luas wilayah secara keseluruhan	$ITL = 100 - ((84,3 - (\frac{LTL}{LW} \times 100)) \times (50/54,3))$ <p>ITL = Indeks Tutupan Lahan LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah</p>	51,38	51,49	51,51	51,53	51,73	53,13	53,13
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Kemampuan desa rawan bencana dalam mengenali dan mengantisipasi bencana	<p>Jumlah Desa tangguh bencana</p> $\frac{\text{Jumlah Desa tangguh bencana}}{\text{Jumlah Desa rawan bencana}} \times 100$	7,04	23.94	40.85	57.75	74.65	91.55	91.55

Misi Keempat	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
	Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah	Jurnal Penelitian dan kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional	Gambaran terkait dengan hasil penelitian dan kajian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional	jumlah penelitian & kajian yang dipublikasikan $\frac{\text{jumlah penelitian \& kajian yang dilaksanakan}}{\text{jumlah penelitian \& kajian yang dilaksanakan}} \times 100$			1	1	1	1	4
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah	Indek Profesionalitas ASN	Indek profesionalitas aparatur merupakan fungsi kesesuaian antara kompetensi pejabat, kinerja pejabat, kompensasi dan kedisiplinan	Kompetensi Gap + Kinerja+ kompensasi + (disiplin-pelanggaran disiplin)	-	80	81	82	83	84	84
	Meningkatnya Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-gov)	Indeks Kepuasan Nilai/Pemeringkatan e-Government Indonesia	Ukuran untuk Gambaran pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah	Indek Kepuasan Masyarakat Penilaian Kemenkominfo/Kemenpan	79,26 peringkat 4	79,74 peringkat 4	80,25 peringkat 3	80,75 peringkat 3	81,26 peringkat 3	81,76 peringkat 3	81,76 peringkat 3

Dalam rangka pencapaian Misi Kelima ditetapkan 9 (Sembilan) Sasaran yang diukur melalui 9 (Sepuluh) Indikator Sasaran yang didukung 10 (Sepuluh) Agenda Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Sosial, Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Transmigrasi serta ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana berikut:

Misi Kelima	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Base Line 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal	Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	Gambaran terkait dengan penurunan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS th sebelumnya - PMKS th sebelumnya $\times 100$ Jumlah PMKS tahun sebelumnya	2,37%	2,39%	2,41%	2,42%	3,05%	3,15%	3,15%
	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Hasil hitungan Food Security and Vulnerability (FSVA) yaitu analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Hasil hitungan Food Security and Vulnerability (FSVA) Ketahanan dan Kerentanan Pangan	-	0,32	0,25	0,23	0,21	0,19	0,19
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Indeks Pembangunan Gender	Indeks yang berfungsi untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki	Angka menunjukkan rasio antara pembangunan gender dan pembangunan laki-laki, ketika mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata	-	88.71	89.21	89.71	90.21	90.71	90.71
		Persentase Laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan tahun dasar	Jumlah penduduk thn sekarang - jumlah penduduk tahun sebelumnya $\times 100$ jumlah penduduk tahun sebelumnya	0,88	0,67%	0,67%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan sebelumnya. RPJMD perubahan ini melanjutkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya yang dalam pelaksanaannya baru menyelesaikan tahun pertama 2016. RPJMD perubahan ini melanjutkan strategi dan arah kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya 2017 sd 2021. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Lamongan dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Berikut strategi dan arah kebijakan Kabupaten Lamongan dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMDP dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1 Strategi

Pembangunan Kabupaten Lamongan pada kurun waktu 2016-2021 masuk tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Pemantapan pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian berbasis keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Sejalan dengan itu, tahapan pembangunan lima tahun mendatang juga merupakan keberlanjutan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, H. Fadeli SH, MM yang terpilih kembali pada periode kedua. Oleh karenanya strategi umum yang dirumuskan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Pertama, pemantapan sarana dan prasarana dasar berbasis lingkungan

Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada lima tahun sebelumnya, pembangunan sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan pada berbagai aspek. Pemenuhan sarana dan prasarana pada lima tahun ke depan difokuskan pemantapan kondisi infrastruktur dengan memperhatikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. Pembangunan pada tahap lanjut, bukan hanya berhenti pada aspek fisik semata, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas kehidupan manusia dan daya dukung lingkungan.

Kedua, pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif
Strategi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan adalah pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif. Strategi ini fokus pada upaya pemantapan pelayanan pendidikan, kesehatan dan masyarakat secara umum (usia produktif), bukan hanya sekedar memperluas akses tetapi pada saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki pencapaian pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sangat baik. Namun dengan semakin tingginya tantangan serta ancaman yang dihadapi terkait dengan kompetisi antar wilayah dan antar bangsa (MEA), pemantapan kualitas SDM menjadi strategi umum yang harus dilaksanakan di Kabupaten Lamongan.

Ketiga, pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi dan produk-produk unggulan daerah

Strategi umum ketiga yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lamongan adalah pemantapan perekonomian dan kemandirian daerah. Pemantapan ekonomi dalam menunjang kemandirian daerah dilakukan dengan meningkatkan kontribusi potensi dan produk-produk unggulan daerah. Perekonomian Kabupaten Lamongan masih didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tetap memperkuat potensi produktifitas pertanian, ke depan juga diperlukan pengembangan sektor-sektor potensial yang lain di Lamongan. Beberapa sektor seperti perdagangan dan industri pengolahan dapat menjadi penopang baru perekonomian, ditunjang dengan perkembangan sub sektor lain seperti pariwisata.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD perubahan secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD perubahan.

Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis

permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar 6.1. sebagai berikut.

Gambar 6.1.
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021



Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas untuk semua	1	Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan	2017-2021	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan
				2017-2021	Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi dan kompetensi
				2017-2021	Pembangunan Sarana dan Prasarana lembaga Pendidikan yang memadai melalui pembangunan Ruang Kelas Baru pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendidikan dan peralatan pendidikan

				2017-2021	Pemberian Beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu
--	--	--	--	-----------	---

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
				2017-2021	Pemberian Beasiswa Mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN)
		2	Meningkatnya minat baca masyarakat yang didukung ketersediaan perpustakaan yang memadai	2017-2021	Mendorong gerakan budaya membaca/literasi masyarakat
				2017-2021	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan Lembaga Sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan	2017-2021	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan kesehatan
				2017-2021	Pengembangan profesionalitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kualifikasi

				2017-2021	Pembangunan Sarana dan Prasa-rana Kesehatan yang memadai melalui pembangunan Puskemas, Ponkesdes, Polindes, Pustu dan mobil sehat
VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
				2017-2021	Peningkatan mutu pelayanan prima di Rumah Sakit
				2017-2021	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM baik medis maupun non medis di Rumah sakit
				2017-2021	Peningkatan sarana dan prasarana baik medis maupun non medis di Rumah Sakit

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani	1	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh ketersediaan saprodi yang ramah lingkungan, infrastruktur, permodalan dan pengembangan SDM	2017-2021	Peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan bahan pangan pokok melalui pengamanan lahan pertanian produktif dan peman-faatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu
				2017-2021	Mengembangkan penyuluhan untuk peningkatan kualitas produk dengan didukung oleh benih yang berkualitas dan percontohan di wilayah kecamatan serta pengembangan kawasan
				2017-2021	Peningkatan penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan secara tepat untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi biaya

				dan antisipasi perubahan iklim
			2017-2021	Peningkatan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan disertai pembinaan manajemen usaha, penguatan kelompok tani dan fasilitasi kemitraan usaha.

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
					Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil dan pelatihan-pelatihan disertai fasilitasi pemasaran
		2	Meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak dengan didukung bibit yang unggul, pembinaan, sarana dan prasarana serta kemitraan usaha	2017-2021	Mendorong terbentuknya usaha pembibitan dan pakan ternak untuk menghindari ketergantungan dari daerah luar
				2017-2021	Pengembangan pola kemitraan antara peternak dengan perusahaan lokal sebagai penyedia bibit dan pakan ternak
				2017-2021	Pembinaan terhadap peternak/ kelompok secara terpadu disertai dengan percontohan dan pengembangan kawasan peternakan

				serta introducing tehcnology peternakan
			2017-2021	Peningkatan populasi melalui bantuan ternak dan inseminasi buatan disertai pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
				2017-2020	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha peternakan
		3	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan yg berdaya saing dengan didukung peningkatan tehnologi yang inovatif, efesien dan ramah lingkungan	2017-2021	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dengan pemanfaatan tehnologi perikanan yang ramah lingkungan yang efektif dan efesien
				2017-2021	Peningkatan penggunaan bibit ikan yang unggul serta mendorong pengembangan usaha pembibitan ikan untuk mengurangi ketergan-tungan dari daerah lain
				2017-2021	Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
				2017-2020	Mengembangkan Saluran Distribusi ikan untuk menjaga kualitas dan nilai

				jual
			2017-2021	Pengembangan pengolahan hasil berbasis perikanan untuk meningkatkan nilai jual dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha industri dan perdagangan	1	Peningkatan industri ber-skala besar dan menengah serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan bagi industri berskala mikro dan kecil	2017-2021	Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM
				2018-2021	Mendorong berkembangnya kawasan industri dan Pengembangan sentra IKM untuk mendorong kerjasama, kemitraan dan daya saing
				2017-2021	Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui pelatihan, pen-dampingan, magang dan studi banding;
				2017-2021	Fasilitasi legalisasi usaha bagi IKM untuk perlindungan usaha dan persaingan usaha

				2017-2021	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor serta <i>e-commerce</i>
--	--	--	--	-----------	--

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
		2	Pengembangan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	2017-2021	Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
				2017-2021	Mengembangkan informasi dan jaringan pasar baik tingkat regional, nasional dan internasional
				2017-2021	Fasilitasi legalisasi usaha dan pengembangan pasar online
				2017-2021	Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan

					konsumen
	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	3	Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	2017-2021	Peningkatan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada era perdagangan bebas / globalisasi
				2017-2021	Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMK untuk meningkatkan volume usaha
				2016-2021	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMK dalam era global yang kompetitif
VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
				2017-2021	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMK untuk peningkatan ketaatan dan kepatuhan thd Peraturan dan Perundangan
				2017-2021	Peningkatan aksesibilitas koperasi dan UMKM

				terhadap pembiayaan baik Lembaga Keuangan Bank maupun LK Non Bank
Meningkatnya realisasi investasi		Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	2017-2021	Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online
			2017-2021	Kemudahan pelayanan informasi investasi baik offline maupun online
			2017-2021	Promosi investasi untuk publikasi potensi investasi disertai kemitraan investasi
			2017-2021	Pemerataan investasi dengan memprioritaskan sumberdaya lokal untuk mewujudkan pemerataan ekonomi

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 2	Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya kunjungan wisata		Mengembangkan pariwisata didukung promosi dan infrastruktur yang memadai	2017-2021	Pengembangan destinasi wisata yang ada dengan mengkolaborasikan dengan sektor-sektor lainnya
				2017-2021	Menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada baik wisata budaya, alam dan religi serta buatan menjadi destinasi wisata
					2017-2021

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 3	Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap pemukiman sehat	1	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas serta meningkatkan tata kelola kepengairan dalam rangka mendukung produktivitas lahan.	2017-2021	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Lokasi dan Daya Dukung Tanah
				2017-2021	Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
				2017-2021	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintahan daerah lainnya dan dengan pemerintahan atasan
				2017-2021	Penguatan Base Line Data Pembangunan pengairan serta Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Kewenangan Penanganan
				2017-2021	Pembangunan Pasangan dan Normalisasi Jaringan Irigasi
				2017-2021	Normalisasi Daerah Tangkapan Air (Waduk,

					embung dan Rawa)
				2017-2021	Normalisasi Saluran Pembuang/ Sungai

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 3	Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
		2	Peningkatan sarana dan prasarana serta layanan perhubungan guna mendukung konektivitas antar wilayah Kemudahan dan kepastian Waktu Pelayanan Bidang Perhubungan	2017-2019	Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan
				2017-2020	Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat
				2017-2021	Koordinasi dan intensifikasi forum lalu lintas

				2017-2021	Peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan
				2017-2021	Pemenuhan dan Pemeliharaan traffic light, warning light.
				2017-2021	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas dengan peningkatan peran serta masyarakat
				2017-2021	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 3	Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
				2017-2020	Pengadaan dan pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
				2017-2021	Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

		3	Penanganan Infrastruktur Permukiman secara entitas (keterpaduan) guna menuju permukiman yang sehat dan layak, serta meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan.	2017-2021	Keterpaduan penanganan infrastruktur Permukiman kumuh (sektor air bersih, drainase, persampahan, airm limbah dan akses jalan)
				2017-2021	Mengoptimalkan Ketersediaan Sumber Air Bersih
				2017-2021	Pembangunan IPA dan Penambahan Jaringan Perpipaan/SR
				2017-2021	Optamilasi Instalasi Pengolahan lumpur Tinja (IPLT)
				2018-2021	Penegakan Perda terhadap Pengembang Perumahan untuk Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah rumah tangga yang septic / IPAL Komunal
				2017-2021	Penyediaan Perumahan yang layak bagi masyarakat

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 3	Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
				2017-2021	Pemenuhan ketersediaan perencanaan tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis;
				2017-2021	Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan.
	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam		Pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim, dan peningkatan keberdayaan masyarakat dalam melestarikan lingkungan yang didukung konservasi sumber daya alam serta tanggap darurat dalam menghadapi dan penanganan bencana.	2017-2021	Penguatan basis data terpadu dan ketersediaan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah

				2017-2021	Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
				2017-2021	Pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan dan penguatan pengolahan limbah/persampahan secara terpadu melalui reuse, reduce, recycle.
				2017-2021	Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu didukung kebijakan yang ramah lingkungan.

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING			
MISI 3	Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan			
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
				2017-2021 Kesiapsiagaan (kontijensi) dalam menghadapi Bencana Alam
				2017-2021 Pembinaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam
				2017-2021 Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam menghadapi bencana
				2017-2021 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 4	Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kemandirian fiskal daerah		Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja keuangan perangkat daerah guna mendukung pembangunan daerah	2017-2021	Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan
				2017-2021	Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
				2017-2021	Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
				2017-2021	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah
				2017-2021	Peningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
				2017-2021	Peningkatan penataan usaha asset daerah dengan tertib
				2017-2021	Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
				2017-2021	Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi dan pajak daerah

				2017-2021	Peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dan retribusi daerah
VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 4	Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah		Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	2017-2021	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan
				2017-2021	Peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang trans-paran, cepat, tepat dan akuntabel
				2017-2021	Meningkatkan kedisiplinan aparatur
	Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah		Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	2017-2021	Peningkatan kualitas penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan
				2017-2021	Pengembangan penelitian untuk inovasi daerah

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 4	Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya kinerja pelayanan publik		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan .	2017-2021	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan daerah dalam perumusan peraturan daerah inisiatif DPRD
				2017-2021	Peningkatan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan secara berkesinambungan
				2017-2019	Peningkatan kualitas SDM aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
				2017-2021	Peningkatan pemanfaatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan Administrasi

				Kependuduk-an dan Pencatatan Sipil
			2017-2021	Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait guna kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING			
MISI 4	Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
				2017-2021
				Mempermudah dan mempercepat pelayanan perijinan
				2017-2021
				Penyederhanaan proses perijinan
				2017-2021
				Peningkatan koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
				2017-2021
				Mempercepat layanan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik
				2017-2021
				Peningkatan penyelenggaraan

					pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan
	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-gov)		Peningkatan pelayanan masyarakat berbasis Teknologi Informasi (IT) dan komunikasi	2017-2021	Meningkatkan pemanfaatan tek-nologi informasi untuk mendukung pelayanan
				2017-2021	Promosi dan publikasi hasil-hasil pembangunan
				2017-2021	Meningkatkan akses komunikasi secara online maupun offline

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 5	Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan	Meningkatnya pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS		Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi	2017-2021	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program unggulan ke-miskinan dan peningkatan keber-dayaan masyarakat miskin maupun rentan miskin secara menyeluruh meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

dan pengangguran					peningkatan pendapatan dan pengembangan kegiatan perekonomian
	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat		Peningkatan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman dan ketersediaan pangan	2017-2021	Mengembangkan cadangan pangan dan penganekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan.
				2017-2021	Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 5	Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pelaksanaan KB serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk		Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kemudahan akses pelayanan keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi	2017-2021	Meningkatkan pemberdayaan perempuan yang mandiri dalam pembangunan dan peningkatan aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup yang berkualitas
			.	2017-2021	Meningkatkan jumlah keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi
	Terwujudnya desa yang mandiri		Meningkatnya status desa dari desa maju menjadi desa Mandiri	2017-2021	Pengembangan dan Peningkatan Peran Lembaga Ekonomi Perdesaan
				2017-2021	Menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong Dalam pembangunan desa
				2017-2021	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 5	Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
				2017-2021	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi perempuan didesa dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		Meningkatkan tumbuhkembang budaya olahraga dan prestasi dengan mengedepankan sportifitas didukung penguatan sarana infrastruktur dan suprastuktur kepemudaan dan olahraga	2017-2021	Peningkatan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual
	Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah		Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya.serta penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya oleh Badan Cagar Budaya (BCB)	2017-2021	Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal
	Meningkatnya penduduk yang bekerja		Menurunnya jumlah pengangguran di Kab. Lamongan	2017-2021	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja(JMF)

				2017-2021	Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja dan masyarakat
--	--	--	--	-----------	--

VISI	TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING				
MISI 5	Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal				
Tujuan	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan	
	Meningkatnya harmoni sosial dan wawasan kebangsaan		Meningkatnya toleransi beragama dan integrasi sosial, serta meningkatnya penanganan konflik sosial	2017-2021	Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan toleransi umat beragama
					Meningkatkan kerjasama penanganan konflik sosial
	Meningkatnya ketertiban masyarakat/ masyarakat taat hukum		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan yang berlaku	2017-2021	Peningkatan peranserta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
				2017-2021	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi



BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Lamongan berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Adapun salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah (kabupaten/kota) adalah dengan melihat indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pencapaian target-target indikator kinerja daerah menggambarkan kemampuan institusi dalam mengelola sumberdaya yang tersedia untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik. Keberhasilan suatu pengukuran tergantung pada ketersediaan data dan informasi yang ada dan memerlukan manajemen pengelolaan data yang handal dan tersistematis. Data dan informasi dapat memperlihatkan kondisi sebelum dan sesudah sesuatu program dilaksanakan. Terjadinya perubahan yang signifikan akibat adanya intervensi program menjadi bahan evaluasi pencapaian visi dan misi institusi tersebut.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Perubahan dapat tercapai. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 yang telah direncanakan.

Gambaran target pembangunan sekaligus target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan disajikan dalam kedua tabel indikator kinerja daerah dibawah ini. Pada tabel 9.1 terdapat 10 target Capaian Indikator Tujuan RPJMD Perubahan kabupaten Lamongan 2016-2021 dan pada tabel 9.2 terdapat 39 target capaian indikator sasaran RPJMD yang meliputi 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing.

TABEL 9.1
Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Tujuan) RPJMDP Kabupaten Lamongan 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		TARGET CAPAIAN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,84	70,34	70,56-70,66	70,78-70,98	71,00– 71,30	71,22– 71,62	71,44-71,94	71,44-71,94
2	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,77	5,86	5,56 - 6,56	5,57 - 6,57	5,58 - 6,58	5,59 - 6,59	5,60 - 6,60	5,60 - 6,60
3	Jumlah PDRB Per Kapita	24.22.000	26.690.000	29.300.000	32.230.000	35.460.000	39.000.000	42.900.000	42.900.000
4	Persentase Inflasi	1,96	1,52	1,50-3,00	1,50-3,00	1,50-3,00	1,50-3,00	1,50-3,00	1,50-3,00
5	Indeks Gini	0,310	0,304	0,318-0,303	0,317-0,302	0,316-0,301	0,315- 0,300	0,314-0,299	0,314-0,299
6	Indek Infrastruktur	0	66,80	77,02	77,80	78,67	79,40	80,24	80,24
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,04	60,65	61,65	62,95	63,25	64,56	66,86	66,86
8	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	61	61,5	62	62,5	62,5
9	Persentase Tingkat Kemiskinan	15,38	14,89	14,46-13,91	14,03-12,93	13,60-11,96	13,17-10,98	12,74-10,00	12,74-10,00

10	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,1	3,56	4,15-3,45	4,13-3,34	4,11-3,22	4,08-3,11	3,45-3,00	3,45-3,00
----	---	-----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tabel 9.2
Penetapan Target Capaian Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Sasaran) RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Tahun RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Tahun RPJMD (2021)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	Urusan Pertanian								
1.1.1	Nilai Tukar Petani	102	102,56	102,76	103,20	103,60	103,80	104	104
1.2	Urusan Sosial								
1.2.1	Persentase Penurunan PMKS	0,20%	2.37%	2.39%	2.41%	2.42%	3.05%	3.15%	3.15%
1.3	Urusan Pangan								
1.3.1	Indeks Ketahanan Pangan			0,4	0,36	0,32	0,29	0,26	0,26
1.4	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.4.1	Indeks Pembangunan Gender	87.21	88.21	88.71	89.21	89.71	90.21	90.71	90.71
1.5	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB								

1.5.1	Persentase laju pertumbuhan penduduk	0.26	0.68	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66
1.6	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1.6.1	Jumlah desa mandiri		1	4	5	6	7	8	8
1.7	Urusan Kebudayaan								
1.7.1	Jumlah seni, budaya lokal dan benda/situs cagar budaya yang dilestarikan	80	91	95	100	106	111	119	119
1.8	Urusan Ketenagakerjaan								
1.8.1	Persentase penduduk yg bekerja	96,44%	96,46%	95.85-96.55	95.87-96.66	95.89-96.78	95.92-96.89	96.55-97.00	96.55-97.00
1.9	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Linmas								
1.9.1	Persentase konflik sosial yg ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.9.2	Persentase penegakan pelanggaran perda dan gangguan tantribbun yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2.1	Urusan Pendidikan; Perpustakaan dan Kearsipan								
2.1.1	Indeks Pendidikan	0,62	0,62	0.627-0.632	0.634-0.639	0.641-0.646	0.648-0.652	0.654-0.659	0.654-0.659

2.2	Urusan Kesehatan								
2.2.1	Indeks Kesehatan	0,795	0,796	0,795-0.798	0,796-0.799	0,798-0.801	0,799-0.802	0,801-0.804	0,801-0.804
2.3	Urusan PU dan Tata Ruang								
2.3.1	Indeks Infrastruktur Jalan		-	80.82	81.88	83.38	84.20	85.06	85.06
2.3.2	Indeks Infrastruktur Jembatan		-	80.71	81.61	82.41	83.22	83.97	83.97
2.3.3	Indeks Irigasi		-	74.64	75.08	75.54	76.14	77.18	77.18
2.4	Urusan Perhubungan								
2.4.1	Indeks layanan lalu lintas dan angkutan jalan		61.05	62.11	63.26	63.76	64.65	65.15	65.15
2.5	Urusan Perumahan dan Permukiman								
2.5.1	Indeks infrastruktur pemukiman		-	71.91	72.62	73.34	74.03	74.74	74.74
2.6	Urusan Lingkungan Hidup								
2.6.1	Indeks Kualitas Air	60.77	61,76	63.27	65.42	65.92	68.02	70.92	70.92
2.6.2	Indeks Kualitas Udara	71.07	71,58	73.57	75.72	76.22	78.22	81.12	81.12
2.6.3	Indeks Tutupan Lahan	51.23	51.38	51.49	51.51	51.53	51.73	53.13	53.13
2.7	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Linmas								
2.7.1	Persentase Desa tangguh Bencana	5.63	7.04	23.94	40.85	57.75	74.65	91.55	91.55

2.8	Urusan Otda, Pem Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
2.8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.73	79.24	79.74	80.25	80.75	81.26	81.76	81.76
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
3.1	Urusan Pertanian dan Perikanan								
3.1.1	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	4,60	4.32	4.16 - 4,71	4,17 - 4,72	4,18 - 4,73	4,19 - 4,74	4,20 - 4,75	4,21 - 4,76
3.2	Urusan Perindustrian								
3.2.1	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8,14 %	8.65	7.75-8.66	7.76-8.67	7.77-8.68	7.78-8.69	7.79-9.00	7.79-9.00
3.3	Urusan Perdagangan								
3.3.1	Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	9.59	6.99	6.56-7.56	6.57-7.57	6.58-7.58	6.59-7.59	6.60-7.60	6.60-7.60
3.4	Urusan Koperasi dan UKM								
3.4.1	Persentase Koperasi Berkualitas	47,00	52.63	53	56	59	62	65	65
3.4.2	Persentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan Kecil	-	8.21	8.41	8.62	8.82	9.03	9.23	9.23
3.5	Urusan Penanaman Modal								
3.5.1	Persentase peningkatan Realisasi	-	22.242.684.773.608	4	8	12	16	20	20

	Investasi								
3.6	Urusan Pariwisata								
3.6.1	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	-	2.363.832	0,04	0,08	0,13	0,17	0,21	0,21
3.7	Urusan Otda, Pem Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.7.1	Nilai SAKIP	50,19	60,85	BB	BB	BB	A	A	A
3.7.2	Persentase Kemampuan fiskal	101	97	98	99	100	100	100	100
3.7.3	Persentase Derajat Desentralisasi		14.84%	15%	15.50%	16.00%	16.50%	17.00%	17.00%
3.7.4	Nilai Opini Pemeriksa Eksternal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.7.5	Persentase PD yg tidak terdapat temuan material keuangan	75%	77%	80%	83%	86%	90%	95%	95%
3.7.6	Nilai LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
3.7.7	Jumlah penelitian dan kajian yang dipublikasikan di jurnal nasional				1	1	1	1	4
3.7.8	Indeks profesionalitas ASN			80	81	82	83	84	84
3.7.9	Nilai/Pemeringkatan e-government Indonesia	peringkat 4	peringkat 4	peringkat 4	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 3	peringkat 3

3.8	Urusan Pemuda dan Olahraga								
3.8.1	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan atlet	<u>74 prestasi</u>	<u>100 prestasi</u>	<u>6 %</u>	<u>12%</u>	<u>18%</u>	<u>24%</u>	<u>30%</u>	<u>30%</u>
	TOTAL INDIKATOR SASARAN DARI KE 3 ASPEK ADALAH 39 INDIKATOR								

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang dan harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi. Tak lain agar RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh SKPD dalam koordinasi Bappeda.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru dapat terselesaikan.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan, menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Lamongan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan;
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
5. RKPD Kabupaten Lamongan harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
6. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Lamongan merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 masih digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 -2018 sedangkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 secara efektif berlaku pada penyusunan RKPD Tahun 2019 sampai dengan 2021

Guna mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD, maka diperlukan:

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD;
2. Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD;

3. Penguatan kemampuan dan kapasitas pihak non *pemerintah (non government stakeholders)* untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara PD dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itulah PD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD dalam Renstra PD.

Dalam proses pelaksanaannya, dimungkinkan dilakukan perubahan RPJMD sepanjang terjadi perubahan-perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan. Termasuk perubahan kebijakan ini adalah kebijakan nasional dan kebijakan daerah seperti Rencana Tata Ruang Wilayah yang menjadi acuan penyusunan RPJMD. Perubahan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kecuali perubahan pada capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Lamongan dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Lamongan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan dalam periode 2016-2021. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan DPRD Kabupaten Lamongan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Guna terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lamongan serta warga masyarakatnya harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI